

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DEPUTI BIDANG PENGAWASAN  
OBAT TRADISIONAL,  
SUPLEMEN KESEHATAN DAN  
KOSMETIK  
TAHUN 2022

---

Jakarta  
2023

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja, Deputy II BPOM selaku penyelenggara negara berkewajiban melaporkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan program yang dijalanannya.

Penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini berisi hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi serta pengungkapan hasil kinerja secara lengkap dan memadai atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan tahun 2022.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Deputy II BPOM selama tahun 2022 dalam mewujudkan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran strategi Deputy II BPOM, dengan mengacu pada arah kebijakan dan Strategi Badan POM. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memaparkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Deputy II BPOM selama tahun 2022. Keberhasilan atas program yang dijalankan diukur dari pencapaian kinerja terhadap target-target indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024.

Semoga Laporan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Jakarta, Februari 2023

Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional,  
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



Dra. Reri Indriani, M.Si., Apt

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Deputi II BPOM), sebagai bagian dari organisasi Badan POM, turut memberikan kontribusi terhadap pencapaian misi dan visi Badan POM melalui rencana strategis dan sasaran program yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2022 yang mengacu pada Reviu Renstra tahun 2020-2024 yang terdiri dari 10 sasaran strategis dengan 22 indikator kinerja utama. Dari 22 Indikator Kinerja Utama (IKU), diperoleh 16 IKU dengan kriteria "MEMENUHI EKSPEKTASI", 2 IKU dengan capaian "TIDAK DAPAT DISIMPULKAN", dan 4 IKU "BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI".

Keberhasilan capaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik disetiap sasaran strategis IKU sebagai berikut

1. Pada tahun 2022 Deputi II telah berupaya mewujudkan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebesar 95,25% dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi
2. Pada tahun 2022 Deputi II telah berhasil mewujudkan kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebesar 101,58 % dengan kriteria memenuhi ekspektasi
3. Pada tahun 2022 Deputi II telah berhasil mewujudkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebesar 103,36 % dengan kriteria memenuhi ekspektasi
4. Pada tahun 2022 Deputi II telah berupaya mewujudkan kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebesar 89,58% dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi
5. Pada tahun 2022 Deputi II telah berhasil mewujudkan efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebesar 101,46% dengan kriteria memenuhi ekspektasi

6. Pada tahun 2022 Deputy II telah berhasil mewujudkan regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebesar 110,30% dengan kriteria memenuhi ekspektasi
7. Pada tahun 2022 Deputy II telah berhasil mewujudkan tatakelola pemerintahan dan kerjasama Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebesar 101,12% dengan kriteria memenuhi ekspektasi
8. Pada tahun 2022 Deputy II telah mewujudkan SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebesar 101,07% dengan kriteria memenuhi ekspektasi
9. Pada tahun 2022 Deputy II telah berhasil mewujudkan Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebesar 128,89% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan
10. Pada tahun 2022 Deputy II telah berhasil mewujudkan Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara Akuntabel dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebesar 103,51% dengan kriteria memenuhi ekspektasi

Persentase capaian target indikator kinerja Deputy II pada tahun 2022 antara 89,58% sampai dengan 128,89%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Indeks Kualitas kebijakan pengawasan OT, SK dan Kos” sebesar 89,58%, sehingga perlu ditingkatkan pada tahun 2023. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos” sebesar 128,89% hal ini disebabkan perubahan mekanisme penilaian IKK pada tahun 2021 yang sebelumnya menggunakan penilaian secara manual dengan menggunakan expert judgement, untuk tahun 2021 dilakukan penilaian secara sistem dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang dibangun oleh Lembaga Administrasi Negara bersama Board Member. Untuk kedepannya dalam memperbaiki capaian kinerja akan melakukan penyusunan regulasi termasuk sosialisasinya dengan juga memperhatikan kaidah-kaidah yang terdapat dalam penilaian IKK dan melakukan penyesuaian target kinerja sesuai dengan kategori penilaian IKK yang terbaru.

Pada tahun 2022 melaksanakan 22 (dua puluh dua) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 10 sasaran strategis. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,9 hingga 0,29 Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat

Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Deputi II didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp43.854.522.000,- setelah dilakukan revisi realokasi anggaran blokir (automatic adjusment). Realisasi anggaran tahun 2022 adalah Rp 43,845,541,410,- atau 99,98%. Deputi II berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir tahun 2022.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR GRAFIK .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi .....	1
1.3. Struktur Organisasi.....	5
1.4. Isu Strategis dan Aspek Strategis Organisasi.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1. Rencana Strategis.....	13
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022 .....	17
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	19
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2022.....	22
2.5. Metode Pengukuran .....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	43
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	43
3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya .....	127
3.3. Realisasi Anggaran .....	127
BAB IV PENUTUP .....	132
LAMPIRAN .....	134

## DAFTAR TABEL

Table 1 Rencana Kinerja Tahunan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2022 .....	17
Table 2 Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2022 .....	19
Table 3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik .....	23
Table 4 Indikator Penyusun Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik .....	28
Table 5 Kriteria Capaian Indikator Kinerja .....	41
Table 6 Range Kategori Tingkat Efisiensi Anggaran .....	42
Table 7 Capaian Kinerja tahun 2022 .....	43
Table 8 Realisasi Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik .....	47
Table 9 Perbandingan realisasi Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya .....	47
Table 10 Tabel reliasasi Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA .....	48
Table 11 Realisasi Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat .....	53
Table 12 Perbandingan realisasi Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya .....	54
Table 13 Tabel reliasasi Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA .....	54
Table 14 Realisasi Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik .....	58
Table 15 Perbandingan realisasi Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya .....	59
Table 16 Tabel reliasasi Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA .....	59
Table 17 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik .....	65
Table 18 Perbandingan realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya .....	65
Table 19 Tabel reliasasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA .....	66
Table 20 Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik .....	70
Table 21 Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik .....	74
Table 22 Perbandingan realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya .....	75
Table 23 Tabel reliasasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA .....	75
Table 24 Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik .....	78
Table 25 Perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya .....	79
Table 26 Tabel reliasasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA .....	79
Table 27 Realisasi Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik .....	83
Table 28 Perbandingan realisasi Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya .....	84
Table 29 Tabel reliasasi Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen	

Kesehatan dan Kosmetik tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA .....	84
Table 30 Realisasi Presentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan .....	87
Table 31 Perbandingan realisasi Presentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya .....	87
Table 32 Tabel reliasasi Presentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA .....	87
Table 33 Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor .....	90
Table 34 Realisasi Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik .....	93
Table 35 Perbandingan realisasi Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya .....	94
Table 36 Tabel reliasasi Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA .....	94
Table 37 Realisasi Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik .....	95
Table 38 Perbandingan realisasi Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya .....	96
Table 39 Tabel reliasasi Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA .....	96
Table 40 Realisasi Presentase Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu .....	98
Table 41 Perbandingan realisasi Presentase Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya .....	99
Table 42 Tabel reliasasi Presentase Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA .....	99
Table 43 Realisasi Tingkat efektifitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik .....	101
Table 44 reliasasi Tingkat efektifitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA .....	102
Table 45 Realisasi Persentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar dilingkup registrasi obat tradisional .....	104
Table 46 Perbandingan realisasi Persentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar dilingkup registrasi obat tradisional dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya .....	104
Table 47 Tabel reliasasi Persentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar dilingkup registrasi obat tradisional tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA .....	105
Table 48 Realisasi Persentase UMKM obat tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap .....	106
Table 49 Perbandingan realisasi Persentase UMKM obat tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya .....	107
Table 50 Tabel reliasasi Persentase UMKM obat tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA .....	107
Table 51 Realisasi Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB bertahap .....	109
Table 52 Perbandingan realisasi Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB bertahap dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya .....	109
Table 53 reliasasi Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB bertahap tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA .....	110
Table 54 Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik .....	111
Table 55 Perbandingan realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya .....	112
Table 56 Realisasi Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan	

dan Kosmetik .....	114
Table 57 Perbandingan realisasi Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.....	114
Table 58 realisasi Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA.....	115
Table 59 Realisasi Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik .....	118
Table 60 Perbandingan realisasi Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.....	118
Table 61 realisasi Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA .....	119
Table 62 Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik .....	121
Table 63 Perbandingan realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.....	122
Table 64 realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA .....	122
Table 65 Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik .....	124
Table 66 Perbandingan realisasi Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya .....	125
Table 67 realisasi Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA .....	125
Table 68 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya .....	127
Table 69 Realisasi anggaran per sasaran program.....	128
Table 70 Tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian Sasaran Strategis.....	129

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.....	5
Gambar 2 Peta Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.....	15
Gambar 3 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022 .....	128

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Kompetensi SDM berdasarkan unit kerja dan.....	4
Grafik 2 Perbandingan jumlah pegawai existing, gap dan jumlah pegawai yang dibutuhkan berdasarkan ABK .....	5
Grafik 3 Perbandingan realisasi Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.....	48
Grafik 4 Perbandingan realisasi Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik .	55
Grafik 5 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dengan Satuan Kerja Lain .....	60
Grafik 6 Perbandingan realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik .....	66
Grafik 7 Perbandingan realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.....	71
Grafik 8 Perbandingan realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik .....	76
Grafik 9 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan Satuan Kerja Lain .....	80
Grafik 10 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks kualitas kebijakan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan Satuan Kerja Lain .....	84
Grafik 11 Perbandingan Capaian Kinerja Presentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan Satuan Kerja Lain .....	88
Grafik 12 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dengan Satuan Kerja Lain .....	97
Grafik 13 Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat efektifitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan Satuan Kerja Lain .....	102
Grafik 14 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik .....	112
Grafik 15 Perbandingan Capaian Kinerja Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan Satuan Kerja Lain .....	115
Grafik 16 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan Satuan Kerja Lain .....	119
Grafik 17 Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan Satuan Kerja Lain .....	123
Grafik 18 Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan Satuan Kerja Lain .....	126

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*, penyelenggaraan negara dan keuangan negara harus diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan. Pada Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat pola penganggaran dengan perubahan mendasar pada aspek-aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah (*Medium Term Expenditure Framework*), penerapan penganggaran secara terpadu (*Unified Budget*) dan penerapan penganggaran berdasarkan kinerja (*Performance Budget*).

Salah satu asas umum keuangan negara adalah asas akuntabilitas, yaitu berorientasi pada hasil. Hal ini mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pimpinan unit kerja di lingkungan Badan POM bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (*output*). Untuk memastikan bahwa *outcome/output* yang dihasilkan oleh unit kerja di lingkungan Badan POM telah sesuai dengan yang ditargetkan/direncanakan, perlu ada pengendalian pelaksanaan anggaran dan kegiatan. Laporan Kinerja merupakan pertanggungjawaban Deputy II BPOM sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas unit kerja kepada pihak-pihak yang memberi amanah/mandat. Penyusunannya telah dibuat sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

### 1.2. Gambaran Umum Organisasi

Dinamika perubahan zaman dan perkembangan kemajuan teknologi di masyarakat Indonesia, mendorong peningkatan pengawasan obat dan makanan menjadi lebih kuat dan tepat sasaran. Timbulnya beberapa permasalahan yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan efektif, menjadi dasar dalam perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/598/M.KT.01/2017.

Perubahan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan

(Badan POM) untuk melaksanakan misi dalam mencapai visi yang tidak terlepas dari rencana strategis pembangunan nasional periode 2020 - 2024, serta memberikan penjelasan tentang tugas dan fungsi setiap unit yang bernaung dibawahnya termasuk Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Dalam menunjang pencapaian visi, misi dan pelaksanaan sistem pengawasan di Badan POM serta mewujudkan *good governance*, Deputy II BPOM mempunyai tugas melakukan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, melalui:

1. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Penguatan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
6. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Ke-6 aspek tersebut merupakan fondasi peningkatan kualitas kelembagaan di Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Deputy II BPOM) dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi yang baru sehingga kinerja Deputy II BPOM dapat menjawab tantangan dan kendala di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang sangat dinamis.

Dinamika tantangan dan kendala tersebut salah satunya karena komoditi produk yang berada di bawah pengawasan Deputy II BPOM merupakan jenis produk yang bersifat dapat digunakan dan dikonsumsi secara umum dan bebas oleh masyarakat. Bervariasinya pelaku usaha yang bergerak di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik mulai dari industri besar hingga industri mikro bahkan dapat dilakukan di tingkat rumah tangga, menjadi kendala dan tantangan tersendiri, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan pelaku usaha.

Deputy II BPOM dituntut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu azas

penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja.

## **Tugas, Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mempunyai tugas untuk:

*menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik*

Dalam menjalankan tugasnya Deputy II BPOM menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

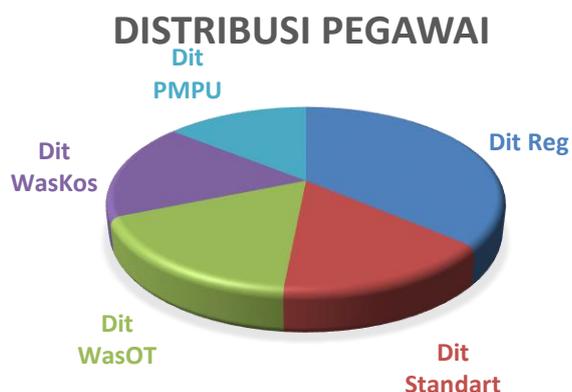
- a. penyusunan kebijakan di bidang Pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

## Sumber Daya Manusia

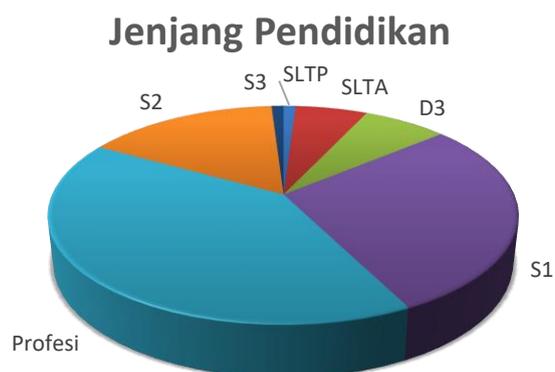
Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Deputy II BPOM adalah sebanyak 326 pegawai dengan proporsi 79,75% perempuan dan 20,25% laki-laki. Pegawai tersebut tersebar di 5 Direktorat dengan rincian: 1) Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebanyak 50 pegawai; 2) Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebanyak 116 pegawai; 3) Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sebanyak 57 pegawai; 4) Direktorat Pengawasan Kosmetik sebanyak 57 pegawai; dan 5) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebanyak 46 pegawai.

Jumlah tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung upaya pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik secara optimal. Berdasarkan analisis beban kerja Deputy II BPOM memerlukan SDM sebanyak 535 pegawai, sehingga dengan kondisi saat ini maka terdapat gap sebanyak 209 pegawai.

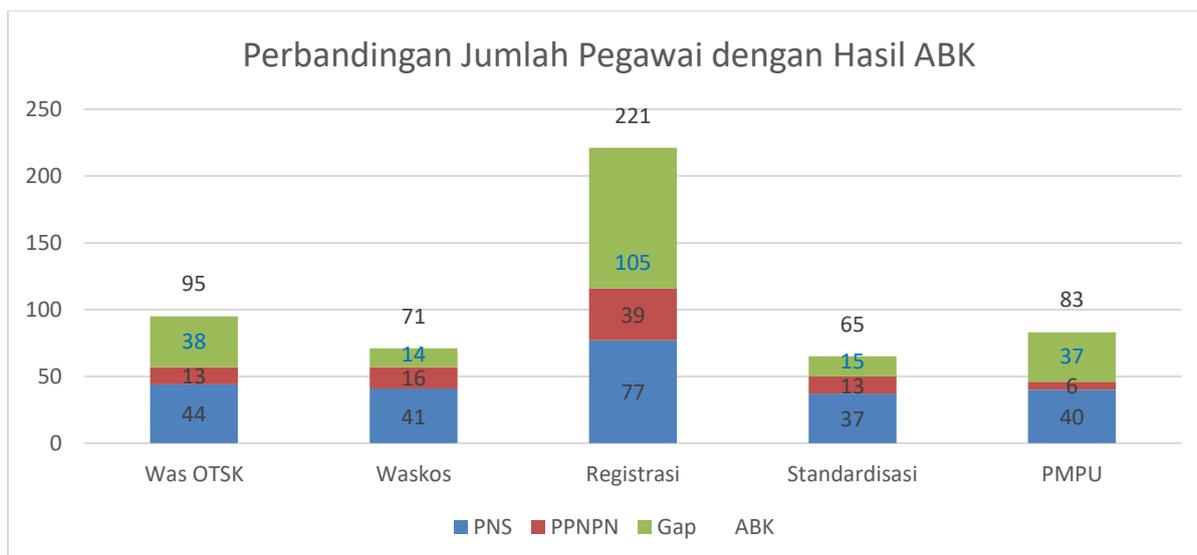
Selain dari sisi kuantitas, maka kualitas/kompetensi SDM juga perlu diperhatikan dan ditingkatkan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Berdasarkan jenjang pendidikan maka komposisi pegawai adalah : S3 sebanyak 3 orang (1%); S2 sebanyak 52 orang (16%); profesi sebanyak 133 orang (41%); S1 sebanyak 94 orang (29%); D3 sebanyak 23 orang (7%); SLTA sebanyak 19 orang (6%) dan SLTP sebanyak 2 orang (1%). Gambaran komposisi Sumber Daya Manusia di Deputy II BPOM adalah sebagaimana terlihat pada grafik berikut:



Grafik 1 Kompetensi SDM berdasarkan unit kerja dan



Grafik 1. Komposisi SDM berdasarkan unit kerja dan berdasarkan Jenjang Pendidikan



Grafik 2 Perbandingan jumlah pegawai existing, gap dan jumlah pegawai yang dibutuhkan berdasarkan ABK

### 1.3. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Deputy II didukung oleh 5 (lima) Direktorat sebagai unit kerja teknis yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, unit-unit tersebut yaitu:

1. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
2. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
3. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
4. Direktorat Pengawasan Kosmetik
5. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Susunan Organisasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berdasarkan Peraturan Badan POM No. 21 tahun 2020 adalah sebagaimana pada gambar berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

#### 1.4. Isu Strategis dan Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan proyeksi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia sebagai negara besar mempunyai jumlah penduduk pada tahun 2022 mencapai 274 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 138 juta jiwa laki-laki dan 136 juta jiwa perempuan, dengan populasi terbesar pada penduduk usia 5 – 39 tahun berada di kisaran jumlah 10 juta  $\leq x \leq 15$  juta\*. Ditinjau dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki kekuatan dalam sumber daya manusia yang produktif.

Dapat dikatakan bahwa dengan besaran jumlah serta kisaran usia tersebut, penduduk Indonesia merupakan konsumen aktif, sehingga Indonesia menjadi potensi pasar yang besar, baik bagi produk lokal maupun produk impor. Adanya dinamika teknologi, gaya hidup dan era globalisasi, banyak kendala dan tantangan yang harus dihadapi maupun peluang yang harus dikelola oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang kuat, sehat dan memiliki tingkat pendidikan yang baik.

Seiring dengan hal tersebut, Badan POM memiliki peran dalam salah satu program pemerintah yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat. Saat ini tindakan preventif (pencegahan) dan promotif (pemeliharaan) pada kesehatan cenderung lebih ditingkatkan daripada tindakan kuratif (pengobatan). Hal ini bertujuan agar peningkatan kesehatan masyarakat bersifat jangka panjang sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat, kuat dan memiliki tingkat kelayakan hidup yang tinggi.

Deputi II BPOM sebagai bagian dari Badan POM, melalui tugas dan fungsinya melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan peranan Badan POM tersebut. Aspek-aspek strategis yang dapat dikelola oleh Deputi II BPOM yaitu:

##### 1. Internal

Pelaksanaan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) yang optimal melalui peningkatan peran unit teknis di Deputi II BPOM serta koordinasi lintas unit di Badan POM seperti Sektama, Deputi I, Deputi III, Deputi IV BPOM, Pusat-Pusat serta Balai Besar/Balai POM dan Loka POM di seluruh wilayah Indonesia.

Koordinasi tersebut dapat dilakukan berupa sosialisasi, FGD, keterlibatan bersama seperti inspeksi gabungan, pembinaan Balai Besar/Balai POM dan Loka POM. Peningkatan peranan unit teknis di Deputi II BPOM melalui manajemen organisasi dan rapat koordinasi teknis yang dilakukan secara rutin sehingga kerjasama antar unit teknis terpelihara dengan baik.

Terjadinya musibah global yang telah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemik yaitu wabah Covid-19 telah memberikan dampak yang luar biasa pada semua lini. Namun dengan dukungan sistem pengawasan yang kuat yang ditetapkan di Badan PtOM

dan Deputy II BPOM khususnya tidak menyebabkan melemahnya sistem pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang dijalankan. Pandemi covid-19 meningkatkan pengawasan secara daring lebih optimal.

## 2. Eksternal

Adanya upaya dunia dalam mengendalikan dinamika perubahan zaman yang cepat melalui harmonisasi dan peningkatan hubungan kerja antar negara, mendorong peranan aktif Deputy II BPOM dalam jejaring hubungan kerja dengan instansi K/L lain, pelaku usaha, asosiasi baik dalam negeri maupun luar negeri.

Beberapa isu strategis yang menjadi dasar penetapan prioritas kinerja Deputy II pada tahun 2022 yaitu:

### a. Pandemi Covid-19

Potensi:

1. Peran Deputy II BPOM dibutuhkan dalam rangka pemberian persetujuan penggunaan kemasan lama untuk menunjang perekonomian yang sedang menurun. Sebagaimana diketahui bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan pembelian terhadap produk mengalami penurunan (kecuali produk dengan klaim daya tahan tubuh), sehingga stok kemasan lama masih banyak. Pelaku usaha mengajukan permohonan produksi menggunakan kemasan lama dan/atau penghabisan produk OT dan SK dengan kemasan lama di peredaran untuk memangkas biaya;
2. Peran Deputy II BPOM dibutuhkan dalam mengawasi informasi dan promosi OT dan SK yang dikaitkan dengan pencegahan dan pengobatan Covid-19. Di masa pandemi ini demand produk OT dan SK di dengan klaim daya tahan tubuh semakin meningkat, namun klaim yang dicantumkan dalam iklan berlebihan dan menyesatkan;
3. Peran Deputy II BPOM dalam mengawasi produk obat tradisional dan suplemen kesehatan yang masuk ke Indonesia untuk keperluan donasi dalam rangka penanganan Covid-19;
4. Peran Deputy II BPOM dalam mengawal keamanan dan mutu produk obat tradisional dan suplemen kesehatan yang makin meningkat penggunaannya oleh masyarakat untuk penanganan Covid-19;
5. Adanya Pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan kemampuan ekonomi serta modal pelaku usaha untuk pemenuhan persyaratan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik;

6. Percepatan Perizinan Sarana Produksi di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan diperlukan dalam rangka pemenuhan ketersediaan obat tradisional dan suplemen kesehatan di pasaran;
7. Peran Kedeputian Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dalam mengawal pengembangan fitofarmaka maupun obat tradisional lain yang dapat menjadi alternative dalam pengobatan COVID-19;
8. Sulitnya akses pasar pada masa pandemi Covid-19 menyebabkan tidak berkembangnya UMKM obat tradisional yang tidak memiliki kemampuan pemasaran secara digital;
9. Beredarnya produk obat tradisional dan suplemen kesehatan impor Tanpa Izin Edar (TIE) yang masuk melalui jalur tidak resmi selama masa pandemic COVID-19;
10. Kelangkaan stok vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh dari penularan COVID-19 dan melonjaknya harga vitamin karena banyaknya permintaan selama masa pandemic COVID-19;
11. Kondisi pandemi Covid-19 telah memberikan iklim usaha yang cukup kondusif bagi startup kosmetik;
12. Pada masa pandemi covid 19, meningkatkan jumlah pengguna media online di Indonesia. Hal ini mendorong inovasi penyebaran informasi melalui strategi komunikasi berbasis digital. Menyikapi hal ini, Badan POM mengadakan kegiatan KIE dalam bentuk webinar, podcast yang memiliki jangkauan luas ke masyarakat (*high impact*).

Permasalahan :

1. Pelaku usaha mengeluhkan masih banyaknya sisa stok kemasan lama setelah persetujuan registrasi variasi dan daftar ulang diterbitkan;
2. Maraknya penjualan/ promosi produk di peredaran yang mengklaim sebagai pengobatan covid, klaim bombastis, dan testimoni kesembuhan;
3. Masih rendahnya literasi masyarakat terutama di bidang kesehatan (digital health literacy), terutama dengan memanfaatkan ketakutan masyarakat terhadap kondisi terkini seperti pandemi Covid-19. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mampu menyaring dan menganalisis informasi yang benar untuk memilih dan menggunakan produk OT dan SK sesuai kebutuhan.
4. Meningkatnya pemasukan/ importasi obat tradisional dan suplemen kesehatan untuk tujuan penggunaan pribadi maupun donasi memerlukan intensifikasi

pengawasan baik pada saat pemasukan maupun setelah produk beredar di Indonesia;

5. Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik memerlukan komitmen perbaikan dari pelaku usaha, namun karena terdampak pandemi pelaku usaha tidak memiliki modal yang cukup untuk melakukan pemenuhan aspek dan perbaikan berkesinambungan;
6. Meningkatnya produksi dan peredaran obat-obatan seperti suplemen, vitamin dan obat-obat untuk penyembuhan COVID-19 sehingga perlu peran BPOM dalam pengawasan baik *pre /postmarket* produk tersebut;
7. Keterbatasan pengawasan fasilitas produksi dan distribusi secara optimal selama masa pandemic COVID-10 untuk mencegah penularan COVID-19 masuk masa pandemic;
8. Tidak ada data stok ketersediaan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh selama masa pandemic COVID-19 pada setiap daerah/provinsi di seluruh Indonesia;
9. Kapasitas Sumber Daya Manusia dan teknologi Deputy II BPOM masih sangat terbatas dibanding tuntutan dalam pemenuhan percepatan timeline registrasi produk peningkatan daya tahan tubuh;
10. Koordinasi dengan peneliti /*stakeholder* terkait dalam pengembangan produk yang belum optimal;
11. Tidak tersedia peraturan yang khusus mengatur penyimpanan dan penyaluran obat tradisional dan suplemen kesehatan untuk menjamin mutu dan keamanan produk selama di peredaran;
12. BPOM mendapatkan tantangan untuk mampu memberikan informasi perizinan kosmetik sedemikian rupa sehingga mudah diakses, mudah dimengerti dan mudah dilaksanakan

b. Promosi/Iklan OT, SK dan Kos di Media Online

Potensi:

Peran BPOM dibutuhkan dalam rangka mengawal peredaran promosi/iklan OT,SK dan Kos di media online (marketplace, website, media sosial, telemedisin, dll). Kemudahan dalam bertransaksi menyebabkan maraknya penjualan OT, SK dan Kos melalui media online baik oleh pelaku usaha maupun perseorangan.

Permasalahan:

1. Maraknya akun perseorangan/non official yang membuat promosi produk OT, SK dan Kos di media online (marketplace, website dan media sosial) tanpa sepengetahuan pemilik NIE;

2. Banyaknya iklan produk Tanpa Izin Edar dan produk palsu di media online;
  3. Munculnya beragam aplikasi media baru (seperti aplikasi telemedisine, aplikasi berita online, dan platform2 e-commerce baru yang belum pernah diawasi sebelumnya);
  4. Kesulitan dalam penanganan pelanggaran promosi OT, SK dan Kos di platform global atau situs internasional seperti Facebook, Google, Instagram karena belum ada regulasi yang mengaturnya.
- c. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)  
Potensi:
- Deputi II BPOM diharapkan peran sertanya dalam mendukung *Major Project* Reformasi Sistem kesehatan Nasional. Dalam SKN, BPOM mendukung area reformasi yaitu:
1. Area 4 “Pengendalian penyakit dan Imunisasi” Kontribusi Deputi II BPOM pada area ini melalui percepatan registrasi, intensifikasi pengawasan produksi dan distribusi dalam rangka menjaga mutu produk dan perluasan cakupan dan penajaman tindak lanjut Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT).
  2. Area ke-5 “Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan” Sehubungan dengan akan dimasukkannya produk Fitofarmaka (FF) ke dalam daftar obat Formularium Nasional untuk penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maka BPOM perlu melakukan sampling dan pengujian khusus untuk memastikan keamanan, mutu dan manfaat produk Fitofarmaka.
    - ✓ relaksasi dan percepatan perizinan di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan serta deregulasi standar untuk percepatan perijinan serta kemudahan akses dan ketersediaan obat tradisional dan suplemen kesehatan;
    - ✓ Memberikan dorongan Industri Obat Tradisional yang memproduksi Fitofarmaka untuk mengimplementasikan CPOTB terkini untuk menjamin produk aman, bermutu dan bermanfaat sesuai dengan tujuan penggunaan sehingga produk Fitofarmaka dapat masuk dalam JKN melalui pendampingan penelitian praklinik/ klinik;
    - ✓ Perlu adanya Laboratorium terpadu utk uji lab OT dan Kosmetik di Indonesia.
  3. Area ke-8 “Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat”
    - ✓ Sesuai amanat di dalam UU Cipta Kerja dan amanat PP 5 Tahun 2021 kemudahan berusaha diakomodir di dalam suatu sistem perijinan terpadu yang dikelola oleh BKPM yaitu system aplikasi perijinan

berbasis risiko. Termasuk didalamnya perijinan terkait sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik yang merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan ijin edar produk;

- ✓ Badan POM mempunyai salah satu misi yaitu memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha dengan keberpihakan terhadap UMKM OT untuk meningkatkan daya saing produk di pasar lokal dan global. Adapun tujuan utamanya adalah melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. Berkenaan hal itu perlu dilakukan kegiatan pendampingan UMKM OT untuk dapat langsung dibimbing dalam implementasi dan mendapatkan solusi dari permasalahan perizinan, pelaksanaan aspek CPOTB dan Ijin Edar;
- ✓ Badan POM memiliki program Badan POM goes to school/campus yang membentuk Duta Kosmetik/Jamu Aman. Program ini menghasilkan 33 Duta Kosmetik Aman dan 25 Duta Jamu Aman yang pada tahun 2021 telah melakukan KIE kepada komunitasnya dengan jumlah 11.069 peserta. Selanjutnya kegiatan ini akan dilakukan di seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan indeks kesadaran masyarakat di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik;
- ✓ Badan POM melakukan program sinergisitas/advokasi dengan lintas sektor dalam rangka kelancaran perizinan UMKM OT dan kosmetik

Permasalahan :

1. Dalam upaya pengawalan keamanan dan mutu produk Fitofarmaka, selain pengujian keamanan dan mutu secara umum juga diperlukan pengujian mutu kadar fraksi aktif atau senyawa aktif yang mendukung klaim sehingga memerlukan penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium BPOM, meliputi instrumentasi, Metode Analisa senyawa aktif dan kompetensi SDM penguji;
2. Pengawasan/pengawalan implementasi CPOTB terkini pada industri obat tradisional yang memproduksi fitofarmaka untuk menjamin produk aman, bermutu dan bermanfaat sesuai dengan tujuan penggunaan;
3. Kesadaran stakeholder dan masyarakat dalam melaporkan kasus efek samping obat dan makanan yang dibutuhkan dalam penguatan farmakovigilans masih relatif rendah;

4. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang pemanfaatan pengembangan obat herbal/OMAI sebagai obat rujukan dalam program JKN;
5. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait tata cara registrasi obat tradisional, tata cara pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui proses One Single Submission (OSS) dan penerapan aspek CPOTB bertahap, terutama selama masa pandemi ini. Badan POM telah memberikan beberapa relaksasi dalam proses registrasi obat tradisional untuk meningkatkan daya tahan tubuh;
6. Permasalahan inkonsistensi kualitas (higienes) jamu gendong di Indonesia, sehingga perlu sosialisasi yg berkesinambungan;
7. Keterbatasan modal usaha UMKM OT dan Kos, bagi para startup sehingga perlu dukungan modal atau bantuan sarana dari pemerintah atau ditingkatkan dukungan orang tua angkat;
8. Sulitnya mendapatkan Penanggung jawab teknis sarana produksi baik OT maupun Kos;
9. Masih maraknya produk expired, tidak mempunyai Izin Edar atau produk ilegal lainnya, sehingga perlu digalakkan sosialisasi terkait cek KLIK ke lapisan masyarakat seperti anak sekolah, dan kelompok masyarakat lainnya;
10. Pengaturan aspek-aspek komitmen (izin lokasi, IMB, dan izin lingkungan) dalam perizinan berusaha yang menjadi kewenangan otonomi Pemerintah Daerah tidak seluruhnya sama di Indonesia;
11. Tingkat Pemahaman dan kemampuan tiap duta jamu/ kosmetik aman didalam memiliki dan memanfaatkan teknologi informasi tidak sama sehingga terdapat perbedaan materi dalam penyajian KIE yang informatif dan menarik minat masyarakat;
12. Pemahaman peserta webinar/ podcast terkait materi yang disampaikan bisa berbeda, karena tidak ada interaksi langsung pada kanal media online;
13. Webinar dan podcast yang ditayangkan melalui kanal media online memerlukan dukungan perangkat dan koneksi jaringan yang menuntut biaya lebih dari peserta.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1. Rencana Strategis**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik telah menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik Nomor Hk.02.02.41.412.12.21.2444 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik Tahun 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tersebut disusun dengan mengacu/berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan telah mencantumkan Visi dan Misi yang sesuai dengan Visi dan Misi Badan POM Tahun 2020-2024.

#### **Visi dan Misi**

Sejalan dengan Visi Badan POM Tahun 2020-2024, maka Visi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagai berikut:

---

*“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”*

---

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan, dalam hal ini obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel dan diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, pengertian kata “Aman”, “Bermutu” dan “Berdaya Saing” adalah sebagai berikut:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri

Dalam upaya mewujudkan visi, Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menetapkan misi organisasi yang sejalan dengan misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

## **Tujuan**

Dalam rangka pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi pengawasan Obat dan Makanan serta sesuai dengan tugas Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan kosmetik maka tujuan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yaitu:

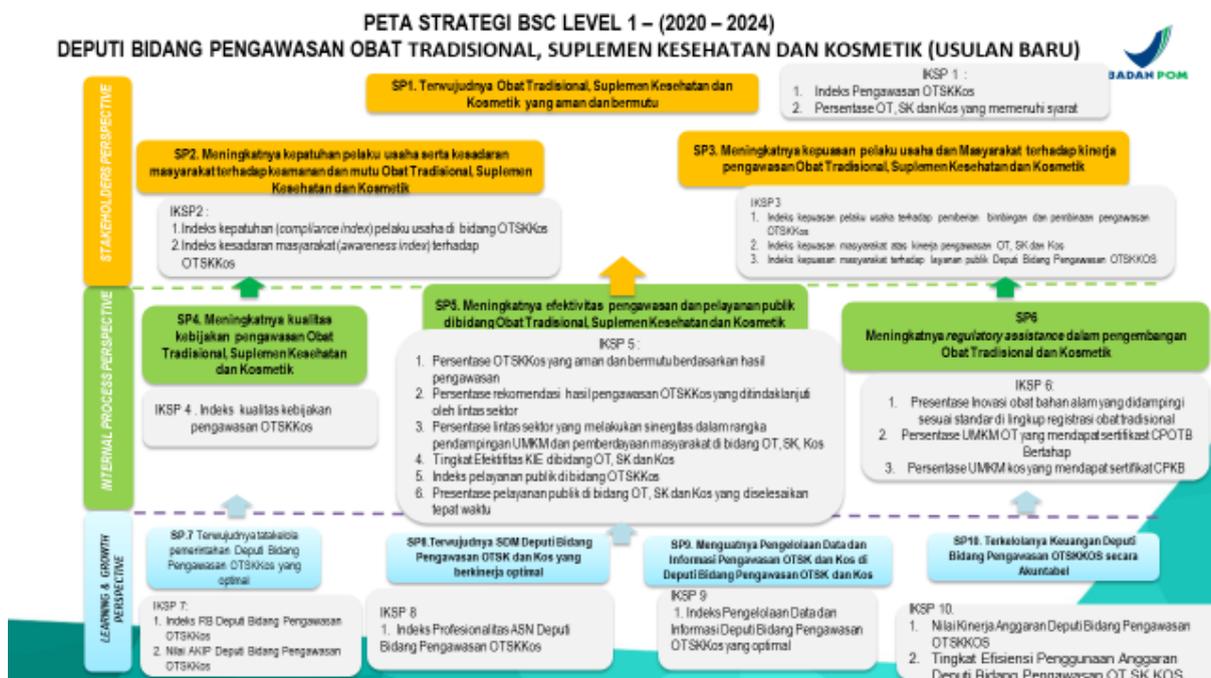
1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
2. Meningkatnya kapasitas SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan pemangku kepentingan, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat

Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM

4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan
6. Terwujudnya kelembagaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima

### Sasaran Strategis

Sasaran strategis kegiatan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik disusun berdasarkan Visi dan Misi serta tujuan yang dituangkan dalam Peta Strategis Level 0 Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Penetapan sasaran strategis diperlukan untuk penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai Rencana Strategis. Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektive dalam pendekatan Balance Scorecard (BSC) meliputi Learning & Growth, Internal Process, Customer dan Stakeholders maka sasaran strategis dalam peta strategi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berdasarkan Renstra 2020-2024 dan Reviu Renstra 2020-2024 sebagaimana bagan peta strategis berikut :



Gambar 2 Peta Strategis Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi maka deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menggunakan 10 (sepuluh) sasaran strategis dengan 22

(dua puluh dua) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Reviu Renstra Deputy tahun 2020-2024.

Pada tahun 2021, telah dilakukan Reviu Renstra 2020-2024 Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan berlaku mulai 01 Oktober 2021. Reviu Renstra tidak merubah Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis, hanya terdapat sedikit perubahan pada kebijakan dan strategi, serta perubahan nomenklatur indikator dan perubahan jumlah indikator.

## 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra 2020-2024 dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2022 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2022 Rencana Kinerja Tahunan Deputy II BPOM adalah sebagai berikut:

Table 1 Rencana Kinerja Tahunan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2022

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	86
	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	95
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	86
	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkualitas	78
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	89,3
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	75
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	84,38
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,5

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	78
	Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang OT SK dan Kos	82
	Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	4,36
	Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	90
	Tingkat efektifitas KIE dibidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	94.19
Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	85
	Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	90
	Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB	87
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85
	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	80,80
Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	84,85
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2,25
Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	92,90

### 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2020-2024 dan DIPA Deputy II Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar: Rp. 50,004,587,000,- (lima puluh milyar empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan selama periode mengalami penyesuaian anggaran menjadi sebesar Rp. 43.854.522.000,-- (empat puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Perjanjian Kinerja merupakan lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Badan POM kepada Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik untuk melaksanakan program yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja yang disusun yaitu Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 3 perspektif 10 Sasaran Program dan 22 Indikator Kinerja Sasaran Program dengan rincian sebagai berikut:

Table 2 Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2022

PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
<b>Stakeholder Perspective</b>	Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu	IKSP 1	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	86
		IKSP 2	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	95
	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 3	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	86
		IKSP 4	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkualitas	78
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan	IKSP 5	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	89,30

PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	Kosmetik	IKSP 6	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	75
		IKSP 7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	84,38
<b>Internal Process</b>	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 8	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89
	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 9	Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,50
		IKSP 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	78
		IKSP 11	Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang OT SK dan Kos	82
		IKSP 12	Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	4,36

PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
		IKSP 13	Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	90	
		IKSP 14	Tingkat efektifitas KIE dibidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	94,19	
	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	IKSP 15	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	85	
		IKSP 16	Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	90	
		IKSP 17	Persentase UMKM Kosmetik yang mendapat Sertifikat CPKB	87	
	<b>Learning and Growth Perspective</b>	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 18	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85
			IKSP 19	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	80,80
Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal		IKSP 20	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	84,85	
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		IKSP 21	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2,25	

PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara akuntabel	IKSP 22	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	92,90

#### 2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2022

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan satuan kerja untuk memantau, mengendalikan dan melaporkan pencapaian kinerja organisasi secara berkala (triwulanan, semesteran dan tahunan); sebagai acuan dalam penetapan target n+1; serta sebagai dasar penilaian keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Deputy II dimonitoring dan dievaluasi secara berkala melalui aplikasi e-performance untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan berikutnya. Dasar pemantauan secara berkala pada tahun 2022 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. RAPK Deputy II BPOM adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Table 3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN	
				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
<i>Stakeholder Perspective</i>	Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu	IKSP 1	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												86	2.414.330.300	
		IKSP 2	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	0	0	40	50	60	65	70	75	80	85	90	95	2.836.412.500	
	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 3	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik													86	1.654.566.100
		IKSP 4	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkualitas													78	2.437.637.000
		IKSP 5	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik													89.3	2.001.883.700

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2022

PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
		IKSP 6	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik												75	986.656.500
		IKSP 7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												84.38	2.147.731.600
Internal Process	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 8	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												89	4.652.857.000
	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 9	Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	0	0	40	50	60	65	70	75	80	85	90	91,5	5.768.881.500

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2022

PERSPEKTI F	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
		IKSP 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	1.344.795.800
		IKSP 11	Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang OT SK dan Kos	0	12	23	23	35	47	47	59	70	70	70	82	203.357.500
		IKSP 12	Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik											4.36	3.203.591.500	
		IKSP 13	Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	3.809.261.000

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2022

PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
		IKSP 14	Tingkat efektifitas KIE dibidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	0	15	15	30	30	45	60	75	90	91	92	94,19	5.441.730.000
	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	IKSP 15	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	703.039.000
		IKSP 16	Persentase UMKM OT yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional dan Kosmetik	0	10	16	20	25	25	30	40	50	60	70	90	1.199.329.000
		IKSP 17	Persentase UMKM Kosmetik yang mendapat Sertifikat CPKB	0	10	16	20	25	25	30	40	50	60	70	87	507.151.000
<b>Learning and Growth Perspective</b>	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 18	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												85	1.500.624.000
		IKSP 19	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik													80.8
	Terwujudnya SDM Deputy Bidang	IKSP 20	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat													84.85

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2022

PERSPEKTI F	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
	Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal		Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik													
	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 21	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik			2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.097.917000
	Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara akuntabel	IKSP 22	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik											92.9	1.766.177.000	

## 2.5. Metode Pengukuran

**SP 1**

***Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu***

Sistem pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang dilakukan Deputy II merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: pertama, standarisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Standarisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. Kedua, penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. Ketiga, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/ manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/ penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sasaran strategis ini diukur dengan 2 indikator kinerja sasaran program (IKSP), yaitu: (1) Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; dan (2) Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat.

### **1. Indeks pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik**

Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata capaian pada indikator pengawasan obat tradisional, indikator pengawasan suplemen kesehatan dan indikator pengawasan kosmetik. Pembentuk indikator penyusunnya adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Table 4 Indikator Penyusun Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

No	Indikator	Bobot
1	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	12,5%
2	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang berkualitas	12,5%

3	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	12,5%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	12,5%
5	Persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik Memenuhi Syarat	30%
6	Indeks kualitas kebijakan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	20%

Semakin tinggi capaian kinerja yang dicapai, semakin baik kinerja Deputy II BPOM dalam melakukan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

## **2. Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat**

Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat dengan jumlah obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang disampling. Dalam melakukan sampling terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n) berdasarkan Data Survei Produk Beredar. Sampling dilakukan terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.

Pengukuran terhadap indikator persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium

Keberhasilan sasaran program ini diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu: (1) Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; dan (2) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkualitas.

## SP 2

### ***Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik***

#### **1. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha**

Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, pengukurannya dilakukan oleh Pusat Riset Kebijakan Obat dan Makanan (PRKOM). Metode pengukuran yang digunakan yaitu *Desk Research*, yakni analisis data hasil pengawasan Obat dan Makanan tahun 2021, melalui pendekatan kuantitatif, data terdiri dari: 1) Data hasil pemeriksaan sarana produksi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik; 2) Data hasil pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik; dan 3) Data hasil pengawasan iklan dan penandaan. Satuan indikator ini dinyatakan dalam nilai, semakin tinggi nilai yang diraih, menunjukkan semakin tinggi upaya yang telah dilakukan oleh Deputy II BPOM dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

#### **2. Indeks Kesadaran Masyarakat**

Indeks Kesadaran Masyarakat merupakan ukuran kesadaran masyarakat terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik menggunakan pendekatan AIDA (*Awareness, Interest, Desire, Action*) untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Indikator Kesadaran Masyarakat diukur terhadap pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Aspek pengetahuan meliputi: manfaat produk, ciri-ciri produk yang aman dan bermutu, produk yang tidak aman dan berbahaya, aturan pakai yang tepat, logo pada kemasan. Aspek sikap meliputi kedaluarsa, tidak aman dan berbahaya serta palsu, penyimpanan produk. Aspek perilaku meliputi menyimpan produk, membaca label / kemasan / dus / brosur, produk aman dan bermutu.

Satuan indikator ini dinyatakan dalam nilai, semakin tinggi nilai yang dicapai menunjukkan semakin tinggi kinerja Deputy II BPOM dalam melakukan pembinaan, penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat dalam memilih / menggunakan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

**SP 3**

***Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik***

Sasaran proram ini diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator, yaitu: (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; (2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan OT, SK dan Kos; dan (3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

**1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan OTSKKos**

Indeks kepuasan pelaku usaha merupakan ukuran kepuasan pelaku usaha atas dalam kegiatan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Metodologi pengukurannya dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Survei dilakukan secara online dan paper based, yaitu dengan melakukan email blast kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM serta email blast kepada semua pelaku usaha yang terdaftar di BPOM. Selain itu survey juga dilakukan pada setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan.
- b. Target sampel dihitung dengan rumus Krejcie & Morgan dengan margin of error sebesar 2%.
- c. Analisis dilakukan secara statistic-kuantitatif dengan persamaan regresi dan AHP sebagai penimbang.

Kriteria yang digunakan adalah:

75,01 – 100: sangat puas

50,01 – 75 : puas

25,01 – 50 : kurang puas

0 – 25: tidak puas

**2. Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan OT, SK dan Kos**

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan ukuran kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Deputy II BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu

dari produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepuasan masyarakat yaitu:

- a. *Reliability*, kemampuan pengawasan;
- b. *Assurance*, kemampuan memberikan perlindungan;
- c. *Tangible*, layanan informasi tentang keamanan produk,
- d. *Empathy*, kepedulian atas kebutuhan masyarakat untuk produk yang aman,
- e. *Responsiveness*, tindakan atas produk berbahaya.

#### SP 4

#### ***Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik***

Regulasi dan kebijakan Badan POM merupakan landasan penting dalam rangka melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pengawasan obat dan makanan, termasuk didalamnya pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Untuk mengetahui keberhasilan capaian sasaran strategis ini, maka diukur dengan menggunakan indikator) : **Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**

Indeks Kualitas Kebijakan digunakan sebagai indikator dalam mengukur kualitas dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan POM terkait obat tradisional, suplemen kesehatan dan melalui variabel perencanaan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Dimensi pengukurannya terdiri dari Perencanaan kebijakan sebesar 50%, terdiri dari Agenda Setting (40%) dan formulasi kebijakan (60%); dan pelaksanaan kebijakan sebesar 50%, terdiri dari implementasi kebijakan (60%) dan evaluasi kebijakan (40%).

Satuan untuk indikator ini adalah nilai, semakin tinggi nilai yang dicapai, semakin tinggi kualitas kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Deputy II BPOM.

#### SP 5

#### ***Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik***

Keberhasilan sasaran program ini diukur dengan menggunakan 6 (Enam) IKSP, yaitu: 1) Persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; 2) Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor; 3) Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; 4) Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik; 5) Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat

waktu; 6) Tingkat efektifitas KIE dibidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Penjelasan metode pengukuran terhadap Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

**1. Persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**

Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat dengan jumlah obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang disampling. Dalam melakukan sampling terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n) berdasarkan Data Survei Produk Beredar. Sampling dilakukan terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik beredar berdasarkan kerangka sampling targeted di tahun berjalan.

Pengukuran terhadap indikator persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium

**2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor**

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti oleh lintas sektor. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi terkait pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diberikan oleh Deputy II BPOM baik melalui unit pusat maupun Unit Pelaksana Teknis di daerah kepada lintas sektor terkait yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Pengukurannya dilakukan berdasarkan perbandingan antara jumlah tindak lanjut yang diterima terhadap jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dikeluarkan.

Satuan untuk indikator ini adalah persen, semakin tinggi nilai yang dicapai, menunjukkan semakin tinggi kinerja Deputy II BPOM dalam melakukan kerja sama dengan lintas sektor untuk melakukan pengawasan di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

**3. Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase lintas sector yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan dan pemberdayaan UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik dengan melihat jumlah lintas sector yang berperan dalam melakukan pendampingan UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik dan melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik setelah didampingi. Lintas sector meliputi pemerintah daerah, kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan. Lintas sektor yang bersinergi adalah lintas sektor yang dilibatkan/diadvokasi/didampingi oleh Badan POM dalam rangkaian pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

#### **4. Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik**

Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di Deputy II BPOM, berdasarkan 6 (enam) aspek penilaian meliputi:

- a. Kebijakan Pelayanan, dengan bobot 30%;
- b. Profesionalitas SDM, dengan bobot 18%;
- c. Sarana Prasarana, dengan bobot 15%;
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), dengan bobot 15%;
- e. Konsultasi dan Pengaduan, dengan bobot 15%;
- f. Inovasi, dengan bobot 7%.

Pengukuran Indeks ini dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi. Satuan untuk indikator ini dinyatakan dalam persen, semakin tinggi nilai yang dicapai menunjukkan semakin tinggi kinerja Deputy II BPOM dalam memberikan pelayanan publik.

#### **5. Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu**

Indikator ini digunakan untuk mengetahui presentase pelayanan publik Deputy II BPOM yang diselesaikan tepat waktu (sesuai dengan *time line* yang ditetapkan). Pengukurannya dihitung berdasarkan perbandingan jumlah pelayanan publik yang tepat waktu terhadap jumlah permohonan pelayanan publik yang diterima.

Satuan untuk indikator ini adalah persen, semakin tinggi nilai yang dicapai menunjukkan semakin tinggi kinerja Deputy II BPOM dalam memberikan pelayanan publik secara tepat waktu.

## 6. Tingkat efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

Tingkat Efektifitas KIE Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik merupakan sebuah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan melalui kegiatan KIE. Tingkat Efektifitas KIE Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE Dep Bidang Pengawasan OT,SK dan Kos melalui berbagai media pada tahun berjalan.

Pengukurannya dilakukan melalui survey yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Organisasi. Satuan untuk indikator ini adalah nilai, semakin tinggi nilai yang dicapai menunjukkan semakin tinggi kualitas kinerja Deputy II BPOM dalam memberikan KIE kepada masyarakat.

### SP 6

#### *Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik*

Dalam pengembangan obat tradisional Deputy II mengawal hilirisasi hasil riset/inovasi pengembangan obat bahan alam dalam rangka pemenuhan standar kualitas dan keamanan produk. Selain itu, pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik juga menjadi salah satu prioritas Deputy II ke depan, agar UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik dapat berdaya saing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu: 1) Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar; 2) Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap; 3) Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikar CPKB

#### 1. Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja Deputy II BPOM dalam mengawal inovasi bahan alam. Inovasi obat bahan alam mencakup hasil penelitian bahan baku atau produk obat bahan alam siap hilirisasi yang sedang dikembangkan dan/atau dibuat oleh industri farmasi/obat tradisional atau institusi riset di Indonesia menuju obat herbal terstandar dan fitofarmaka.

Pengawasan yang dilakukan berdasarkan pada beberapa pedoman berupa pedoman uji toksisitas in vivo, pedoman CUKB, kriteria dan tata laksana registrasi obat tradisional, serta regulasi lain yang berlaku.

Tahapan pendampingan yang dilakukan terdiri dari 3 tahap, yaitu:

- a. Penyusunan protokol uji praklinik/klinik (70%)

- b. Pelaksanaan penelitian (25%) mencakup persiapan (5%) dan pelaksanaan (20%)
- c. Standardisasi produk dan/atau submit dokumen NIE (5%)
- d. Jika hasil sudah selesai atau Jika dalam 3 bulan pendaftar tidak merespon surat Tambahan Data dianggap selesai (100%)

Pengukuran dilakukan berdasarkan rata-rata persentase tahapan pendampingan yang dilakukan. (Jumlah persentase tahapan masing-masing produk) / (Jumlah produk yang didampingi)

## **2. Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Obat Tradisional adalah 1) Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) adalah usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional kecuali bentuk sediaan tablet, efervesen, suppositoria, dan kapsul lunak. 2) Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah usaha yang membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan. Sertifikat CPOTB bertahap adalah tanda atau keterangan tertulis dari Badan POM sebagai bukti dari pemenuhan sebagian aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya dan sesuai dengan pentahapan yang diberikan. Pentahapan untuk UKOT adalah Tahap 1: Sanitasi dan Higiene dan Dokumentasi; Tahap 2: Sistem Manajemen Mutu, Produksi, Pengawasan Mutu, dan Penyimpanan; Tahap 3: Bangunan Fasilitas dan Peralatan, Inspeksi Diri, Personalia dan Penanganan keluhan terhadap produk, Penarikan kembali produk jadi dan Produk Kembalian. Pentahapan untuk UMOT adalah Tahap 1: Sanitasi dan Higiene; dan Tahap 2: Dokumentasi.

## **3. Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB**

Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB adalah Jumlah UMKM kosmetik yang Memperoleh Sertifikat CPKB dibandingkan dengan jumlah UMKM kosmetik yang Mengajukan. Sertifikat CPKB yang dikeluarkan dapat berupa Sertifikat Baru Maupun Perpanjangan (resertifikasi).

UMKM adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah, mengacu pada Undang-undang no. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu yang memiliki modal sebesar: 1) Mikro (< Rp 50 juta); 2) Kecil (Rp 50 juta - < 500 juta); 3) Menengah (Rp 500 juta - 10 M). Perhitungan dilakukan dengan Perbandingan Jumlah UMKM Kosmetik yang Memperoleh Sertifikat CPKB dibandingkan dengan jumlah UMKM kosmetik yang Mengajukan.

**SP 7**

***Terwujudnya tatakelola pemerintahan Deputy Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang optimal***

Dalam menjalankan tugasnya, Deputy II memerlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Untuk mengetahui keberhasilan capaian sasaran strategis ini, maka diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu: 1) Nilai Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; dan 2) Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

**1. Nilai Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan pada Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik ditandai dengan indikator kinerja utama berupa pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dimana aspek yang dinilai adalah melalui penilaian terhadap 8 area perubahan yang telah dilakukan oleh Deputy II. Adapun 8 area perubahan adalah sebagai berikut:

- a. Manajemen Perubahan
- b. Penataan peraturan perundang-undangan
- c. Penguatan pengawasan
- d. Penguatan dan penataan organisasi
- e. Penataan tata laksana
- f. Penataan sistem management sumber daya manusia
- g. Penguatan akuntabilitas kinerja
- h. Penguatan kualitas pelayanan publik

**2. Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**

Indikator ini merupakan gambaran capaian kinerja Deputy II dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja, dimana pengukurannya meliputi aspek- aspek sebagai berikut:

- a. Aspek perencanaan, mempunyai bobot sebesar 30% meliputi perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, kontrak kinerja dan pemanfaatan dokumen perencanaan.
- b. Aspek pengukuran kinerja, mempunyai bobot sebesar 25% meliputi indikator kinerja (umum), indikator kinerja utama (IKU), pengukuran kinerja dan analisa

hasil pengukuran.

- c. Aspek pelaporan kinerja, mempunyai bobot sebesar 15% meliputi ketaatan, pengungkapan dan kinerja penyajian serta pemanfaatan.
- d. Aspek evaluasi kinerja, mempunyai bobot 10% meliputi pedoman evaluasi, pelaksanaan kinerja evaluasi dan pemanfaatan hasil evaluasi.
- e. Aspek capaian kinerja, mempunyai bobot 20% meliputi kinerja yang diungkapkan (indikator/kinerja, target, keandalan data) dan pencapaian kinerja.

Penilaian terhadap AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dilakukan oleh Inspektorat.

## SP 8

### *Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal*

Penguatan kapasitas dan pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: **Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.**

Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- a. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, dengan bobot penilaian sebesar 25%.
- b. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan, dengan bobot penilaian sebesar 40%.
- c. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, dengan bobot penilaian sebesar 30%

- d. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami, dengan bobot penilaian sebesar 5%.

Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Manfaat yang dapat diraih dari pengukuran Indeks ini antara lain:

- a. sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai Pegawai ASN.
- b. sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional.
- c. sebagai instrumen kontrol sosial agar Pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Pengukuran terhadap indikator kinerja ini dilakukan oleh Biro Umum dan SDM pada akhir tahun. Satuan untuk indikator ini adalah nilai, semakin tinggi nilai yang dicapai, menunjukkan bahwa kualitas SDM di Deputy II BPOM juga tinggi, sesuai kriteria yang ditetapkan.

## SP 9

### *Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik*

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, Deputy II telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: **Indeks pengelolaan data dan informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang baik.**

Komponen pengelolaan data dan informasi Satker/Unit Kerja dan UPT mencakup komponen:

- a. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di Badan POM *Command Centre* (BCC)  
Penetapan indikator ini berfungsi untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat

sasaran. Dimana data dan informasi yang dimaksud merupakan data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang akan digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.

b. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM

Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan teknologi informasi meliputi *email corporate* dan *dashboard* BCC oleh unit kerja dalam dalam pelaksanaan bisnis proses di unitnya masing-masing.

**SP 10**

***Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik***

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Deputy II dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-10.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini ditetapkan dengan Indikator:

**1. Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) yang diukur oleh Kementerian Keuangan. NKA didapatkan dari penjumlahan 40% nilai IKPA dan 60% nilai EKA.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 12 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- a. Revisi DIPA
- b. Deviasi Halaman III DIPA
- c. Pengelolaan UP
- d. Rekon LPJ Bendahara
- e. Data Kontrak

- f. Penyelesaian Tagihan
- g. Penyerapan Anggaran
- h. Retur SP2D
- i. Perencanaan Kas (Renkas)
- j. Pengembalian/Kesalahan SPM
- k. Dispensasi Penyampaian SPM
- l. Pagu Minus

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Deputy II adalah sebagai berikut:

1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas sebagai penanggungjawab data di Lingkup deputy dan 1(satu) orang petugas masing2 unit di kedeputian II.
2. Penanggung jawab data di setiap unit meng-input data kinerja pada data base online
3. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan monitoring setiap bulan.
4. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

Kesimpulan dari efektivitas capaian masing masing indikator dilakukan dengan mengkategorikan persentase capaian indikator dengan kriteria berikut:

Table 5 Kriteria Capaian Indikator Kinerja

KRITERIA	CAPAIAN	KETERANGAN	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	Abu Gelap	-
Memenuhi Ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum Memenuhi Ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak Memenuhi Ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

Selain kesimpulan mengenai capaian kinerja fisik, dilakukan juga pengukuran capaian efisiensi penggunaan anggaran terhadap masing masing sasaran/indikator kinerja kegiatan (Indeks Efisiensi). Indeks efisiensi tersebut dihitung menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Nilai Indeks Efisiensi ini adalah salah satu angka untuk menentukan kesimpulan dari penggunaan anggaran dari masing masing indikator (Tingkat Efisiensi). Tingkat Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila  $IE \geq SE$  maka kegiatan dianggap efisien, apabila  $IE \leq SE$  maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya, dari Tingkat Efisiensi (TE) ini dibuat dalam bentuk range untuk menyimpulkan efisiensi penggunaan anggaran setiap indikator. Berikut range parameter untuk menyimpulkan efisiensi penggunaan anggaran:

Table 6 Range Kategori Tingkat Efisiensi Anggaran

TINGKAT EFISIENSI	CAPAIAN
< 0	Tidak Efisien
0 – 0,2	100% (Efisien)
0.21 – 0,4	95% (Efisien)
0,41 – 0,6	92% (Efisien)
0,61 – 0,8	90% (Efisien)
0,81 – 1,0	88% (Efisien)
1,01 – 1,2	86% (Tidak Efisien)
1,21 – 1,4	84% (Tidak Efisien)
1,41 – 1,6	80% (Tidak Efisien)
0,61 – 1,8	78% (Tidak Efisien)
> 1,81	75% (Tidak Efisien)

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik disajikan berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2022 sebagai awal periode Renstra 2021-2024, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pengukuran kinerja Deputy II BPOM, dilakukan terhadap 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang menggambarkan 10 sasaran Program (SP) dengan menggunakan 3 perspektif.

Berdasarkan aplikasi e-performance didalam aplikasi Simetris yang merupakan aplikasi perencanaan dan pengukuran kinerja, diperoleh nilai NPSS sebesar 103.05 dengan kriteria memenuhi ekspektasi, terdiri dari NPS perspektif stakeholder sebesar 100.06, NPS perspektif internal proses sebesar 100.44, NPS perspektif learning & growth sebesar 108.64.

Rincian dari capaian 22 IKSP Deputy II BPOM yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

*Table 7 Capaian Kinerja tahun 2022*

No.	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
<b>Stakeholder perspective</b>				<b>100,06%</b>	
<b>SP 1</b>	<b>Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu</b>			<b>95.25%</b>	
IKSP 1	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	86.00	86.10	100.11	Memenuhi Ekspektasi
IKSP 2	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	95.00	85.87	90.39%	Belum Memenuhi Ekspektasi
<b>SP 2</b>	<b>Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>			<b>101.58%</b>	

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
IKSP 3	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	86.00	86.79	100.91%	Memenuhi Ekspektasi
IKSP 4	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	78.00	79.75	102.24%	Memenuhi Ekspektasi
<b>SP 3</b>	<b>Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>			<b>103,36</b>	
IKSP 5	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89.30	94.50	105.49%	Memenuhi Ekspektasi
IKSP 6	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	75.00	75.96	101.44%	Memenuhi Ekspektasi
IKSP 7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	84.38	87.05	103.16%	Memenuhi Ekspektasi
<b>Internal Process Perspective</b>				100.44%	
<b>SP 4</b>	<b>Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>			89.58%	
IKSP 8	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89.00	79.73	89.58%	Belum Memenuhi Ekspektasi
<b>SP 5</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>			<b>101.46%</b>	
IKSP 9	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91.50	83.63	91.40%	Belum Memenuhi Ekspektasi
IKSP 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	78.00	82.43	105.67%	Memenuhi Ekspektasi
IKPS 11	Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	82.00	83.75	102.13	Memenuhi Ekspektasi
IKPS 12	Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4.36	4.54	104.13	Memenuhi Ekspektasi
IKPS 13	Presentase pelayanan publik dibidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	90.00	93.41	103.79%	Memenuhi Ekspektas
IKPS 14	Tingkat efektifitas KIE dibidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	94.19	95.70	101.60%	Memenuhi Ekspektas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
<b>SP 6</b>	<b>Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik</b>			<b>110.30%</b>	Memenuhi Ekspektas
IKSP 15	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar dilingkup registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	85.00	85.72	100.85%	Memenuhi Ekspektasi
IKSP 16	Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	90.00	95.89	106.54%	Memenuhi Ekspektasi
IKSP 17	Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB	87.00	107.45	123,51%	Tidak Dapat Disimpulkan
<b>Learn &amp; Growth Perspective</b>				<b>108.64%</b>	
<b>SP 7</b>	<b>Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal</b>			<b>101.12%</b>	
IKSP 18	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85.00	91.58	107.74%	Memenuhi Ekspektasi
IKSP 19	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	80.80	76.36	94.50%	Belum Memenuhi Ekspektas
<b>SP 8</b>	<b>Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal</b>			<b>101.07%</b>	
IKSP 20	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	84.85	85.76	101.07%	Memenuhi Ekspektasi
<b>SP 9</b>	<b>Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>			<b>128.89%</b>	
IKSP 21	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2.25	2.90	128,89%	Tidak Dapat Disimpulkan
<b>SP 10</b>	<b>Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara Akuntabel</b>			<b>103.51%</b>	
IKSP 22	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	92.90	96.16	103.51%	Memenuhi Ekspektasi
<b>Nilai Pencapaian Sasaran</b>				<b>103.05%</b>	

Keterangan

Kriteria	Capaian	Ket
<b>Tidak dapat disimpulkan</b>	> 120%	
<b>Memenuhi Ekspektasi</b>	100% < x ≤ 120%	
<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>	80% ≤ x < 100%	
<b>Tidak Memenuhi Ekspektasi</b>	x < 80%	

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksudkan untuk menjelaskan perbandingan sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra.
- Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis atau dengan sektor swasta yang melakukan fungsi sejenis atau dengan standar nasional/internasional jika ada (Benchmark Kinerja). Khusus untuk UPT di lingkungan BPOM, unit pembanding ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).
- Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).
- Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dari masing-masing sasaran program adalah sebagai berikut:

**SP 1**

***Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu***

Pada tahun 2022 Deputy II BPOM telah berupaya mewujudkan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik aman dan bermutu, dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) **95.25%** dengan **belum memenuhi ekspektasi**.

Keberhasilan ini diukur dengan menggunakan 2 IKSP yaitu (1) Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; dan (2) Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat.

**IKSP 1 - Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**

Pengukuran menggunakan indeks ini ditujukan untuk mengetahui secara mudah kondisi keamanan berdasarkan kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, baik untuk tiap produk maupun keseluruhan secara nasional, dengan deskripsi bahwa semakin tinggi angkanya (mendekati 100), maka semakin tinggi pula kualitas kinerja pengawasan yang dilakukan, begitu pula sebaliknya. Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical hierarchy process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks.

### Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Table 8 Realisasi Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	%CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	86	86.10	100.11	Memenuhi Ekspektasi

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2022 diperoleh nilai Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebesar 86.10. Capaian kinerja tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 86.00, dengan Nilai Pencapaian Indikator (NPI) sebesar **100,11 %** masuk dalam kategori **Memenuhi Ekspektasi**

### Perbandingan Realisasi 2022 dengan Tahun sebelumnya

Table 9 Perbandingan realisasi Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

2020			2021			2022		
Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
83	83.51	100.61	84	85.17	101,39	86	86.10	100.11

Berdasarkan data tersebut terdapat capaian indikator indeks pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik mengalami kenaikan tiap tahun. Pada tahun 2022 terdapat kenaikan realisasi dibandingkan tahun 2021 namun ada penurunan jika dilihat dari capaian terhadap target.

### Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah / Akhir Tahun

#### Renstra

Table 10 Tabel realisasi Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89	86.10	96.74	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2022 belum sepenuhnya mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria capaian belum memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai

### Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Satker yang setara di BPOM

Grafik 3 Perbandingan realisasi Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik lebih rendah jika dibandingkan dengan Deputi I dan lebih tinggi dibandingkan Deputi III.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):

**Penyebab keberhasilan capaian realisasi ini disebabkan :**

Deputi bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Deputi II)

dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsi pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik telah didukung oleh sistem yang telah *establish* dan mampu beradaptasi dengan kondisi pengawasan yang senantiasa berubah. Deputy II menyelaraskan kondisi saat ini dengan melakukan penyusunan regulasi terkini kemudian melakukan sosialisasi, bimbingan teknis bahkan pendampingan kepada pelaku usaha dalam implementasinya secara intensif yang berkesinambungan. Tentunya untuk mendampingi pelaku usaha diperlukan pula petugas Badan POM yang kompeten. Dalam mempersiapkan inspektornya, Deputy II telah memiliki program pembekalan dan supervisi baik pelatihan reguler secara berkala maupun tematik sesuai kebutuhan. Tak berhenti sampai disitu, Deputy II juga menyadari pentingnya peran lintas sektor dan masyarakat sehingga berbagai kegiatan koordinasi lintas sektor dan KIE kepada masyarakat senantiasa dilakukan.

#### **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan:**

Meskipun tahun 2022 capaian indikator telah memenuhi ekspektasi namun jika dibandingkan target Renstra tahun 2024 masih belum mencapai target sehingga Deputy II harus bekerja keras agar target Renstra 2024 dapat tercapai. Upaya yang telah dilakukan di tahun 2022 tetap dilakukan tetapi lebih intensif dan perlu adanya inovasi dalam meningkatkan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya perbaikan kinerja yaitu:

- 1) Meningkatkan kompetensi petugas pengawasan secara intensif melalui in house training / peningkatan kompetensi lainnya baik secara daring maupun luring. Melakukan terobosan dengan merilis beberapa aplikasi sebagai sarana / fasilitas operasional untuk mempermudah mekanisme pelaporan hasil pengawasan. Optimalisasi sinergitas peranan seluruh pihak internal dan eksternal (lintas sektor) dalam program / kegiatan pengawasan
- 2) Penguatan koordinasi dan komitmen dalam implementasi kerja sama lintas sektor terkait pengawasan
- 3) Melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pengawasan
- 4) Pelatihan pembentukan inspektur kosmetik secara berkelanjutan tidak hanya dilakukan oleh pusat namun juga bisa dilakukan secara mandiri UPT bekerja sama dengan pusat
- 5) Bimbingan teknis kepada pelaku usaha terutama start up

### Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- 1) Sosialisasi, bimbingan teknis maupun pendampingan kepada pelaku usaha dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta peran serta pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan maupun regulasi di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Deputy II tidak hanya melakukan pengawasan dan menuntut pelaku usaha untuk senantiasa mematuhi ketentuan tanpa melakukan pendampingan. Menyadari fasilitas produksi komoditi produk Kedeputian II sebagian besar adalah UMKM, maka Deputy II senantiasa melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, maupun pendampingan kepada pelaku usaha. Upaya yang dilakukan Deputy II tentunya membantu pelaku usaha dalam menerjemahkan peraturan serta bagaimana implementasinya. Keberhasilan kegiatan ini tentunya berdampak pada meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan. Setiap ada perubahan regulasi yang disesuaikan dengan perkembangan jaman perlu dilakukan komunikasi dan sosialisasi terutama pada UMKM yang memerlukan pemahaman terhadap perubahan regulasi. Dampak pemberian bimbingan teknis kepada pelaku usaha dapat dilihat dari peningkatan realisasi Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebesar sekitar 1% dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan pengetahuan dan pemahaman serta peran serta pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan maupun regulasi di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
- 2) Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran (awareness) masyarakat terhadap penggunaan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman, berkhasiat / bermanfaat dan bermutu serta cara pemanfaatan teknologi dan Informasi termasuk media online dan media social dalam melaksanakan pengawasan yang efektif.
- 3) Penyusunan regulasi di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dalam rangka meningkatkan keamanan dan mutu berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi serta lingkungan strategis. Dukungan teknologi sangat berdampak dan mengubah metode komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat. Perubahan yang sangat terlihat yaitu mudah dan cepatnya penyebaran informasi kepada masyarakat. Kedeputian II memaksimalkan penggunaan media online seperti website, media sosial, dan media komunikasi lainnya dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Selain itu komunikasi pun dapat terjadi dua arah dimana masyarakat dapat bertanya secara langsung melalui media online tersebut. Dengan perkembangan saat ini yang telah diimplementasikan

teknologi 4.0 dan menuju ke yang lebih tinggi yaitu teknologi 5.0, untuk mendapatkan informasi terkait produk yang aman cukup hanya menggunakan handphone dan ini membuat masyarakat kita menjadi konsumen yang cerdas

- 4) Pembekalan dan supervisi kepada petugas Badan POM dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensi petugas dalam untuk menghadapi tantangan dan meningkatkan efektivitas pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak pulau, dimana setiap propinsi mempunyai perwakilan Badan POM yaitu Balai Besar/Balai POM serta di beberapa loka di kabupaten. Pengawasan dilakukan diseluruh plosok Kualitas pengawasan yang baik bergantung pula dengan kehandalan petugas yang melaksanakan. Deputy II senantiasa menaruh perhatian penuh terhadap pengembangan kompetensi petugasnya. Kondisi pengawasan yang senantiasa berubah menuntut petugas Badan POM untuk memiliki kompetensi yang lengkap dan mampu beradaptasi dengan kondisi terkini. Kompetensi dari petugas POM perlu disesuaikan dengan ilmu yang saat ini berkembang.
- 5) BPOM secara berkala melakukan Pelatihan Sampling Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan kepada petugas pelaksana sampling di seluruh UPT BPOM untuk meningkatkan kompetensi petugas pelaksana sampling dan memastikan pelaksanaan sampling dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Sampling. Selain itu juga dilakukan Rapat Koordinasi Pusat dan UPT dalam manajemen sampling obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik untuk membahas permasalahan dalam pelaksanaan sampling agar dapat segera dicari solusinya serta perencanaan sampling tahun berikutnya.
- 6) Pemberian bantuan DAK Nonfisik Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong penguatan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan secara efektif. Badan POM telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan melalui skema DAK untuk melakukan pengawasan Usaha Mikro Obat Tradisional. Melalui DAK diharapkan pemerintah setempat berperan aktif tidak hanya dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro Obat Tradisional namun juga meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan regulasi. Diharapkan Dinas kesehatan melakukan pengawasan UMOT sesuai dengan tupoksi nya yaitu perizinan sarana dimana salah satunya adalah ketersediaan penanggung jawab sarana yaitu tenaga teknis kesehatan.
- 7) *Public Warning* produk obat tradisional dan suplemen kesehatan mengandung bahan

kimia obat dan kosmetik mengandung bahan dilarang / bahan berbahaya sebagai bentuk penyebaran informasi keamanan kepada masyarakat dan *stakeholder* lainnya. Setiap tahun telah dilakukan Public Warning kepada masyarakat terkait produk-produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang mengandung bahan dilarang / bahan berbahaya sehingga dapat meningkatkan awareness yang pada akhirnya masyarakat dapat turut serta meningkatkan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Public Warning atau penjelasan publik ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait hasil pengawasan produk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berbahaya, baik berdasarkan hasil pengawasan Badan POM maupun laporan dari Badan Otoritas Pengawas Obat dan Makanan di Negara Lain.

- 8) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder dalam rangka memperkuat pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Integrated Webinar Series Bahaya Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat dilakukan sebagai upaya untuk bersinergi dengan pemangku kepentingan dari komponen pentahelix untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam memberantas Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat. Selain untuk mengedukasi masyarakat, kegiatan ini memadukan secara sinergis program pemangku kepentingan terkait upaya penanganan peredaran obat tradisional mengandung BKO. Webinar Perkuatan Pencegahan dan Percepatan Penuntasan Peredaran Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Palsu, terhadap permasalahan maraknya obat tradisional dan suplemen kesehatan palsu perlu dilakukan pendekatan dengan lintas sektor atau pemangku kepentingan untuk perkuatan pencegahan dan penuntasannya, melalui pendekatan dengan melakukan sinergitas lintas fungsi dan lintas sektor disertai dengan peran serta masyarakat untuk memberantas peredaran produk palsu. Melalui webinar ini yang bertujuan untuk mengoptimalkan peran pemangku kepentingan dalam penanganannya sehingga dapat mengurangi produksi dan peredaran Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan palsu tersebut. Sesuai instruksi Presiden No. 3 tahun 2017, Badan POM bersama lintas sektor diinstruksikan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi masing-masing. Koordinasi diperlukan karena adanya kewenangan terbatas dalam melakukan tindak lanjut pengawasan sehingga melalui koordinasi Badan POM dengan lintas sektor akan menciptakan sistem pengawasan Obat dan Makanan yang lebih komprehensif. Lintas sector sangat diperlukan untuk diskusi dalam segala hal seperti perkembangan regulasi, permasalahan yang dihadapi pelaku usaha/trend pelanggaran

- 9) Forum Group Diskusi (FGD) antara Badan POM, Lintas Sektor dan Stake Holder (Pelaku Usaha) dalam rangka regulasi/standar, hasil pengawasan dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha serta menjalin sinergitas dalam pengembangan dan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dapat juga berupa pertukaran informasi. Banyaknya variasi komoditi produk di Kedeputian II tentunya menambah kompleksitas permasalahan dalam pengawasan. Tentunya dalam mencari solusi terhadap permasalahan tersebut Badan POM menggandeng lintas sektor terkait. Tidak hanya itu, Badan POM juga mengajak pelaku usaha untuk mengemukakan baik permasalahan yang sedang dihadapi maupun trend permasalahan yang saat ini sedang marak serta usulan solusi yang dapat diterapkan. Forum Grup Diskusi antara Badan POM, lintas sektor, dan stake holder menghasilkan solusi-solusi dalam mengatasi permasalahan pengawasan. Tindak lanjut dari FGD dapat berupa penyusunan/revisi regulasi baru, program/kegiatan, maupun kebijakan-kebijakan. Dengan FGD maka diharapkan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik menjadi tanggung jawab semua sesuai tupoksi masing-masing

## IKSP 2 - Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat

Pengukuran Indikator ini digunakan untuk mengetahui persentase jumlah obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik di peredaran yang memenuhi syarat. Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin aman dan bermutu produk yang beredar, sehingga tujuan terwujudnya produk yang aman dan bermutu dapat tercapai.

### Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Table 11 Realisasi Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	%CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	95	85.87	90.39	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2022 adalah 85.87%, diperoleh dari hasil pemeriksaan 29.983 sampel acak obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dengan hasil 25.476 sampel MS (memenuhi syarat) dan 4237 sampel TMS capaian persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun 2022 belum mencapai target yaitu 90.39 % dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”.

### Perbandingan Realisasi 2022 dengan Tahun sebelumnya

Table 12 Perbandingan realisasi Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

2020			2021			2022		
Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
93	89.88	96.64	94	94.63	100.67	95	85.87	90.39

Berdasarkan data tersebut, terdapat penurunan realisasi dan capaian persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik memenuhi syarat tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya.

### Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah / Akhir Tahun Renstra

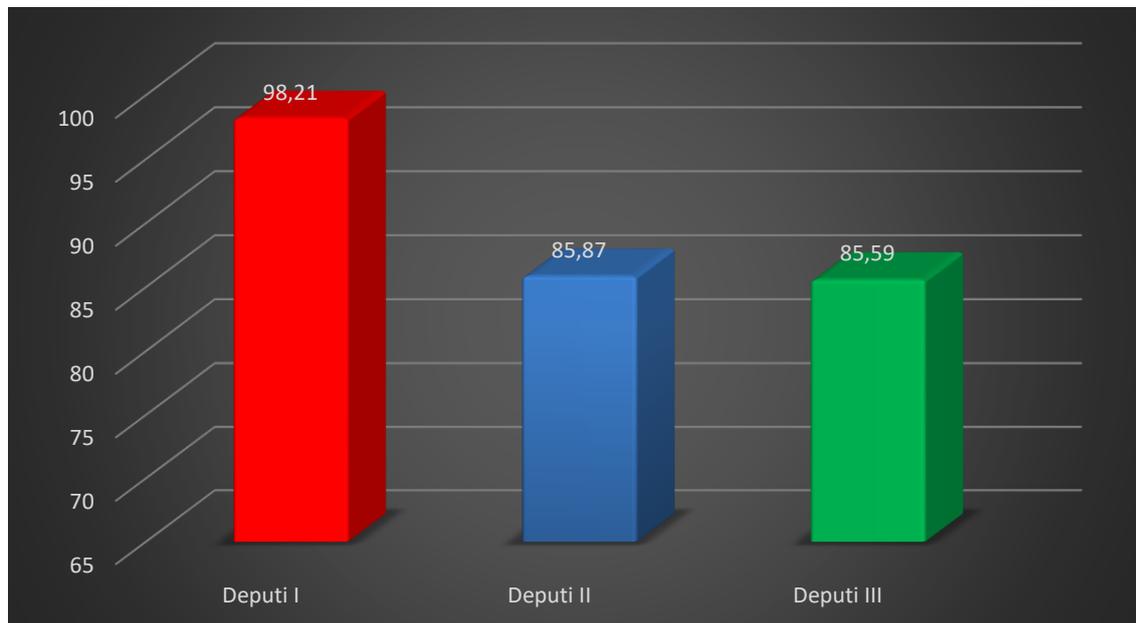
Table 13 Tabel realisasi Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	97	85.87	88.52	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik tahun 2022 belum sepenuhnya mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria capaian belum memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai

## Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Satker yang setara di BPOM

Grafik 4 Perbandingan realisasi Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2022 Deputy II lebih rendah dari Deputy I dan Deputy III.

**Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):**

### **Kegagalan capaian kinerja ini disebabkan :**

- 1) Masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha terutama UMKM dalam memenuhi ketentuan regulasi di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan, salah satunya masih banyaknya beredar produk dengan kemasan lama dikarenakan adanya registrasi ulang dan variasi yang berdampak pada perubahan desain kemasan yang disetujui.
- 2) Seiring pertumbuhan dunia usaha kosmetik yang meningkat, terutama UMKM sehingga menyebabkan semakin ketatnya persaingan di dunia usaha kosmetik. Hal ini menyebabkan pelaku usaha kosmetik membuat klaim berlebihan agar menarik konsumen (sebagai selling point ) serta ditambah dengan tidak adanya evaluasi pre-market penandaan kosmetik
- 3) Penyesuaian desain kemasan memerlukan biaya tambahan yang memberatkan pelaku usaha.
- 4) Kesadaran pelaku usaha untuk mencantumkan informasi yang memenuhi ketentuan

masih rendah terkait persaingan dunia usaha.

- 5) Masih ditemukan temuan berulang penandaan TMK karena pelaku usaha mengalami kesulitan dalam penarikan dan perbaikan penandaan kosmetik di toko-toko retail serta pembersihan tidak dilakukan secara tuntas.
- 6) Importir kosmetik seringkali kesulitan dalam menyesuaikan penandaan kosmetik impor dengan ketentuan di Indonesia karena prinsipal di luar negeri tidak bersedia membuat desain penandaan kosmetik yang khusus diedarkan di Indonesia. Hal ini umumnya disebabkan jumlah order dari pihak importir kosmetik yang tidak terlalu banyak.

#### **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan:**

- 1) Bimbingan teknis kepada pelaku usaha kosmetik terkait ketentuan penandaan dan iklan kosmetik terutama bagi para start-up di bidang kosmetik.
- 2) Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan melalui desk pendampingan kepada pelaku usaha sekaligus mencegah terjadinya temuan yang berulang
- 3) Penguatan regulasi dan kebijakan berdasarkan analisis risiko

#### **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja:**

- 1) Simplikasi dan percepatan registrasi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, melalui:
  - a. Simplikasi registrasi variasi perubahan *supplier* bahan baku (*do and tell*)
  - b. Kemudahan registrasi produk dengan komposisi sama beda jenis kemasan
  - c. Registrasi obat tradisional klaim penambah daya tahan tubuh
  - d. Persetujuan iklan obat tradisional/suplemen kesehatan disertai materi edukasi
  - e. Percepatan Perizinan Kosmetik (Percepatan timeline *Service Level Agreement* (SLA) untuk *Hand Moist Gel*, *Hand Gel*, dan *Hand Cleaner/handwash* dari 14 Hari Kerja menjadi 3 Hari Kerja
- 2) Pengawasan sarana produksi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik terhadap pemenuhan aspek-aspek cara produksi yang baik sebagai implementasi untuk memproduksi produk yang aman, bermutu dan bermanfaat
- 3) Pengawasan terhadap sarana distribusi terkait produk-produk yang diedarkan/diperjual belikan.
- 4) Melakukan sosialisasi peraturan terbaru yaitu peraturan Kepala Badan POM No. 32 Tahun 2019 tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional kepada pelaku

usaha dan Balai/Balai Besar dan Loka POM di seluruh Indonesia

- 5) Pelatihan Inspektur Kosmetik secara berkelanjutan
- 6) Bimbingan teknis inspektur di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan (tingkat dasar dan lanjutan)
- 7) Melakukan bimbingan teknis kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terkait penerapan cara produksi yang baik secara bertahap sehingga dapat memproduksi Obat Tradisional yang memenuhi syarat serta ketentuan penandaan dan iklan
- 8) Sampling dan pengujian produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.  
Prioritas sampling disusun berdasarkan hasil survei produk beredar untuk memastikan keterwakilan produk yang disampling dapat menggambarkan persentase pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu produk beredar.  
Tindak lanjut terhadap produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang tidak memenuhi syarat berupa pemeriksaan sarana, sampling dan pengujian penandaan dan iklan serta pembersihan pasar produk tidak memenuhi syarat di peredaran. Selain itu pemberian sanksi administratif untuk memberikan efek jera pada pelaku usaha yang memproduksi / mengedarkan produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Tidak Memenuhi Syarat.
- 9) Koordinasi dengan Lintas sektor terkait dalam pemeriksaan sarana dan produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dan kosmetik serta pengawasan peredaran produk daring.
- 10) Sosialisasi Peraturan Badan POM no 25 Tahun 2021 tentang penerapan cara pembuatan Obat Tradisional yang baik
- 11) Penetapan batasan jumlah barang impor tanpa izin edar melalui jalur khusus serta dilakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta sosialisasi kepada masyarakat luas baik melalui media banner maupun media sosial.
- 12) Desk Tindak lanjut hasil Pengawasan kosmetik untuk mempercepat proses pemenuhan CAPA sesuai ketentuan oleh pelaku usaha

**SP 2**

***Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik***

Pada tahun 2022 Deputy II BPOM telah berhasil meningkatkan kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, dengan NPS **101,58%** masuk dalam kriteria **memenuhi ekspektasi**.

Keberhasilan atas sasaran program ini diukur menggunakan 2 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), yaitu (1) Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dan (2) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

**IKSP 3 - Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik**

Kepatuhan (*compliance*) berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Tingkat kepatuhan pelaku usaha merupakan luaran dari proses-proses internal yang dilakukan oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang yaitu: penetapan peraturan, pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum, sehingga tingkat kepatuhan pelaku usaha sangat bermanfaat dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang telah dilakukan untuk mewujudkan kondisi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu.

**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

*Table 14 Realisasi Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik*

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	%CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	86	86.79	100.91	Memenuhi Ekspektasi

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2022 diperoleh nilai Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebesar 86.79. Capaian kinerja tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 86,00, dengan Nilai Pencapaian Indikator (NPI) sebesar **101,91%** masuk dalam kategori **Memenuhi Ekspektasi**.

### Perbandingan Realisasi 2022 dengan Tahun sebelumnya

Table 15 Perbandingan realisasi Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

2020			2021			2022		
Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
82	81,38	100.61	85	84.53	101,39	86	86.79	100.91

Berdasarkan data tersebut terdapat capaian indikator Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2022 terdapat kenaikan realisasi dibandingkan tahun 2021 namun ada penurunan jika dilihat dari capaian terhadap target.

### Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah / Akhir Tahun

#### Renstra

Table 16 Tabel realisasi Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	88	86.79	98.62	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik tahun 2022 belum sepenuhnya mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria capaian belum memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

### Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Satker yang setara di BPOM

Grafik 5 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dengan Satuan Kerja Lain



Bila dibandingkan dengan kinerja satuan kerja lainnya, maka capaian ini lebih tinggi daripada capaian kinerja Deputi III, namun lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerja Deputi I.

**Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):**

**Keberhasilan capaian kinerja ini disebabkan :**

- 1) Pelaku Usaha OT, SK dan Kos sebagian besar dari pelaku usaha UMKM yang mana lebih dari 90% UMKM belum memahami regulasi terkait aspek pemenuhan ketentuan Sarana Produksi dan Sarana Distribusi serta ketentuan penandaan dan periklanan.
- 2) Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha terkait pemenuhan ketentuan pemeriksaan sarana distribusi masih rendah sekitar 70%, dan kepatuhan terkait iklan juga sangat rendah yaitu sekitar 50%-60%. Terkait sarana distribusi karena belum adanya regulasi yang mengatur pendistribusian obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
- 3) Maraknya penjualan dan promosi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang *overclaim* di media internet, terutama didominasi oleh akun perseorangan (*non official*). Akun perseorangan ini tidak mengetahui mengenai ketentuan periklanan.
- 4) Persepsi pelaku usaha (termasuk agensi periklanan maupun pengelola media) terhadap regulasi periklanan belum sama

**upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan:**

- 1) Melakukan sosialisasi, pendampingan serta bimbingan teknis terkait peraturan di

bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik kepada pelaku usaha. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pendampingan terhadap pemenuhan regulasi, Kedeputusan II harus dapat memetakan kebutuhan pelaku usaha sehingga pendampingan lebih terarah dan sesuai kebutuhan. Salah satu upaya Kedeputusan II yaitu melakukan penilaian gap analysis penerapan CPOTB 2021 oleh pelaku usaha sehingga dengan adanya data gap analysis dapat menjadi bahan kajian untuk memberikan pendampingan yang tepat bagi pelaku usaha. Pendampingan dilakukan di b idang pendistribusian yang belum ada tetapi sudah dilaksanakan, dan perlu memberikan kesadaran kepada pelaku usaha untuk tetap menjalankan distribusi yang baik agar produk yang dijual tetap aman dan bermutu

- 2) Melakukan pemutakhiran data populasi pelaku usaha OT, SK dan Kosmetik yang dilengkapi dengan ID (nomor identitas, nama, dan alamat pelaku usaha)
- 3) Kolaborasi BPOM dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Indonesian E-commerce Association (idEA), dan 8 (delapan) platform marketplace ((1) Tokopedia, (2) Shopee, (3) Elevenia, (4) Bukalapak, (5) Blibli, (6) Lazada, (7) JDID, dan (8) Jakmall) dalam program “Zona Ramah Promosi Online Usaha Mikro Kecil Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan” untuk memberikan edukasi preventif kepada non-official seller Usaha Mikro Kecil yang mengedarkan dan mengiklankan produk pada media platform marketplace.
- 4) Meningkatkan penggunaan media sosial sebagai sarana dalam meng-update regulasi untuk lebih menjangkau audiens. Regulasi yang terbaru atau update revisi perlu diinformasikan kepada pelaku usaha dan masyarakat, sehingga untuk mutu dan kemanana merupakan tanggung jwb dari pelaku usaha. Dengan perkembangan saat ini yang telah diimplementasikan teknologi 4.0 dan menuju ke yang lebih tinggi yaitu teknologi 5.0, untuk mendapatkan informasil terkait produk yang aman cukup hanya menggunakan handphone dan ini membuat masyarakat kita menjadi konsumen yang cerdas
- 5) Pengembangan subsite yang memberikan informasi lebih luas dan live chat lebih komunikatif . Subsite merupakan suatu wadah yang memuat pelayanan public, informasi tentang pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan dan juga kegiatan dari Direktorat Pengawasan OTSK. Subsite memberikan kedekatan antara Palaku Usaha, Maryarakat dan Dit.Pengawasan OT dan SK melalui adanya live chat.Live tempat untuk bertanya segala hal terkait segala hal.
- 6) Perlu adanya regulasi yang mengatur terkait pendistribusian produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Menindaklanjuti hal tersebut saat ini Deputy II telah

membuat rancangan peraturan terkait pengawasan produksi dan peredaran obat tradisional dan suplemen kesehatan. Diharapkan dengan adanya regulasi ini dapat mengatasi permasalahan terkait pengawasan sarana distribusi obat tradisional dan suplemen kesehatan serta penyusunan dasar hukum / sanksi terhadap perorangan

- 7) Pemetaan/mapping dan clustering sarana produksi Obat Tradisional dalam rangka penentuan rencana intervensi pemenuhan persyaratan CPOTB yang efektif dan efisien. Kegiatan dimulai dari tahap penyusunan tools pemetaan, dibuka dengan Kick-off Mapping, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan serta evaluasi hasil pemetaan berupa klasterisasi sarana produksi Obat Tradisional, yang dilakukan pada seluruh Provinsi di Indonesia pada periode 2021-2023. Dengan kegiatan mapping ini akan sarana Obat tradisional berada pada cluster mana, dan dengan hasil mapping diharapkan sarana tersebut dapat menaikkan kapasitas produksinya sehingga sarana tersebut akan naik kelas.
- 8) Melakukan desk konsultasi kepada pelaku usaha terkait CAPA hasil pengawasan kosmetik

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja:**

- 1) Pendampingan pelaku usaha dalam pemenuhan regulasi penandaan dan Iklan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha UMKM dalam membuat penandaan dan iklan yang memenuhi regulasi yang berlaku.
- 2) Sosialisasi regulasi yang dilakukan secara daring sehingga dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha di seluruh Indonesia. Adanya dukungan teknologi memudahkan pelaku usaha dalam memperoleh informasi sehingga dapat meningkatkan pengetahuannya terkait regulasi terkini. Sosialisasi regulasi secara daring dapat diakses oleh masyarakat ataupun pelaku usaha dari segala penjuru/pelosok di Indonesia
- 3) Pemberian layanan konsultasi secara masif melalui pemanfaatan teknologi informasi memfasilitasi pelaku usaha untuk berkonsultasi terkait pemenuhan regulasi yang dapat dilakukan kapan saja tanpa perlu tatap muka secara langsung sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha dalam implementasi regulasi guna mencapai peningkatan indeks kepatuhan pelaku usaha. Saat ini telah tersedia media layanan konsultasi melalui email dan aplikasi perpesanan (whatsapp) dan juga konsultasi menggunakan zoom, sehingga pelaku usaha tidak repot harus ke BPOM tetapi dapat dilakukan di kantor dan dapat diikuti lebih banyak dengan staf karyawan dari perusahaan

- 4) Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Regulasi di Bidang Informasi dan Promosi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- 5) Forum komunikasi/dialog aktif Badan POM dengan pelaku usaha/assosiasi terkait regulasi/standar, hasil pengawasan dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha. Seringkali permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha karena terbatasnya komunikasi antara Badan POM selaku pemerintah dengan pelaku usaha. Melalui forum komunikasi/dialog aktif maka pelaku usaha dapat menyampaikan permasalahan yang dihadapi dan bertukar pendapat dengan Badan POM sehingga dapat diperoleh solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dengan tetap memenuhi ketentuan peraturan.
- 6) Bimbingan teknis kepada pengelola *marketplace* dan media sosial yang bertujuan untuk meningkatnya pengetahuan pengelola media penayang iklan secara daring terkait ketentuan dan regulasi promosi kosmetik
- 7) Penyusunan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.78 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Monitoring Efek Samping bagi Pemegang Izin Edar Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Petunjuk Teknis Penerapan Monitoring Efek Samping bagi Pemegang Izin Edar Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan telah diundangkan sebagai panduan dalam pelaksanaan monitoring efek samping bagi pemegang izin edar yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk menjamin keamanan atas produk yang diedarkannya.
- 8) Sosialisasi dan dialog interaktif dalam peningkatan kinerja monitoring efek samping Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan kosmetik melalui peran aktif pelaku usaha
- 9) Forum komunikasi pemangku kepentingan untuk percepatan ekspor jamu, sehingga mendapatkan gambaran ekspor jamu, tantangan dan peluangnya, serta solusi dan strategi sinergis dan komprehensif untuk akselerasi ekspor jamu.
- 10) Pendampingan dalam Rangka Pemberdayaan UMKM Serta Usaha Jamu Gendong Untuk Menjamin Keamanan Produk dengan Memenuhi Sanitasi Higiene dan Dokumentasi
- 11) Evaluasi pelaksanaan SKI Post Border termasuk verifikasi ke sarana importir untuk memastikan kepatuhan importir dalam pemenuhan persyaratan dokumen importasi dan pendistribusian bahan baku dan produk suplemen kesehatan yang dimasukkan ke wilayah Indonesia melalui mekanisme post border.
- 12) Memberikan bimbingan teknis dalam rangka percepatan tindak lanjut hasil pengawasan informasi dan promosi obat tradisional dan suplemen kesehatan serta penguatan tindak lanjut pengawasan Iklan pada media penyiaran Lokal
- 13) Memberikan sosialisasi penguatan tindak lanjut Pengawasan Iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan pada Media Penyiaran Lokal

- 14) Kerjasama dengan lintas sektor (Kementerian Kominfo dan asosiasi e-commerce) untuk penanganan hasil pengawasan dan sosialisasi kepada pengelola akun di E-Commerce
- 15) Industri dan UMKM Obat Tradisional di Indonesia memiliki kemampuan tahap penerepan CPOTB yang masih beragam, untuk menetapkan metode pengawasan dan pembinaan yang lebih efektif sehingga telah dilakukan kegiatan pemetaan dalam rangka clusterisasi level industri dan UMKM Obat Tradisional
- 16) Pengisian gap analysis penerapan CPOTB 2021 oleh pelaku usaha yang bertujuan untuk menilai kemampuan pelaku usaha dalam mengimplementasikan CPOTB 2021, karena tidak semua industri obat tradisional dengan cepat dapat menerapkan langsung, Adanya rentang yang cukup jauh antara pedoman CPOTB tahun 2011 dengan CPOTB 2021 tentunya pelaku usaha akan kesulitan dalam implementasinya. Adanya data gap penerapan CPOTB 2021 akan dikaji lebih lanjut untuk menciptakan kegiatan/program pendampingan yang tepat oleh tim ahli sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha, sehingga pelaku usaha dapat menerapkan CPOTB 2021 secara bertahap
- 17) Pengembangan UMKM Obat Tradisional Berbasis Hasil Kemandirian Pelaku Usaha dalam Mematuhi Ketentuan dengan Cara Pemberian Insentif / privilege (reward-based approach). Kegiatan ini juga sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan kepatuhan Pelaku UMKM Obat Tradisional tanpa perlu meningkatkan rasa takut akan sanksi yang diberikan dengan pemberian insentif / privilege (reward based) yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Usaha berupa pembuatan video yang berisi dari UMKM yang maju berkat pendampingan dari Badan POM. Pendampingannya bukan waktu pre market tetapi pendampingan pada post market.
- 18) Kegiatan pemetaan/mapping dalam rangka klasterisasi Industri dan UMKM Obat Tradisional bertujuan untuk menetapkan rencana intervensi/ metode pengawasan dan pembinaan yang lebih efektif kepada pelaku usaha sesuai profil kepatuhan CPOTB. Dikarenakan kemampuan Industri dan UMKM Obat Tradisional di Indonesia dalam hal penerapan CPOTB masih beragam, pengawasan dan pembinaan yang lebih efektif khususnya kepada pelaku usaha yang masih rendah tingkat kepatuhannya diharapkan dapat meningkatkan hasil indeks kepatuhan pelaku usaha. Dengan kegiatan mapping ini akan sarana Obat tradisional berada pada cluster mana, dan dengan hasil mapping diharapkan sarana tersebut dapat menaikkan kapasitas produksinya sehingga sarana tersebut akan naik kelas.
- 19) Pelaku usaha importir kosmetik banyak yang belum memahami proses self assessment pada sistem e-bpom serta adanya kendala pada sistem tersebut.

#### IKSP 4 - Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Sebagai upaya menjamin Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman, Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan melalui berbagai program dan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan. Keberhasilan program perlu diukur melalui capaian indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan dievaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan

#### Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Table 17 Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	%CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	78	79.75	102.24	Memenuhi Ekspektasi

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2022 diperoleh nilai Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebesar 79.75. Capaian kinerja tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 78, dengan Nilai Pencapaian Indikator (NPI) sebesar **102,24%** masuk dalam kategori **Memenuhi Ekspektasi**

#### Perbandingan Realisasi 2022 dengan Tahun sebelumnya

Table 18 Perbandingan realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

2020			2021			2022		
Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
82	71.02	86.60	74	76.23	103,01	78	79.75	102.24

Berdasarkan data tersebut terdapat capaian indikator indeks pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik mengalami kenaikan tiap tahun. Pada tahun 2022 terdapat

kenaikan realisasi dibandingkan tahun 2021 namun ada penurunan jika dilihat dari capaian terhadap target.

### Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah / Akhir Tahun Renstra

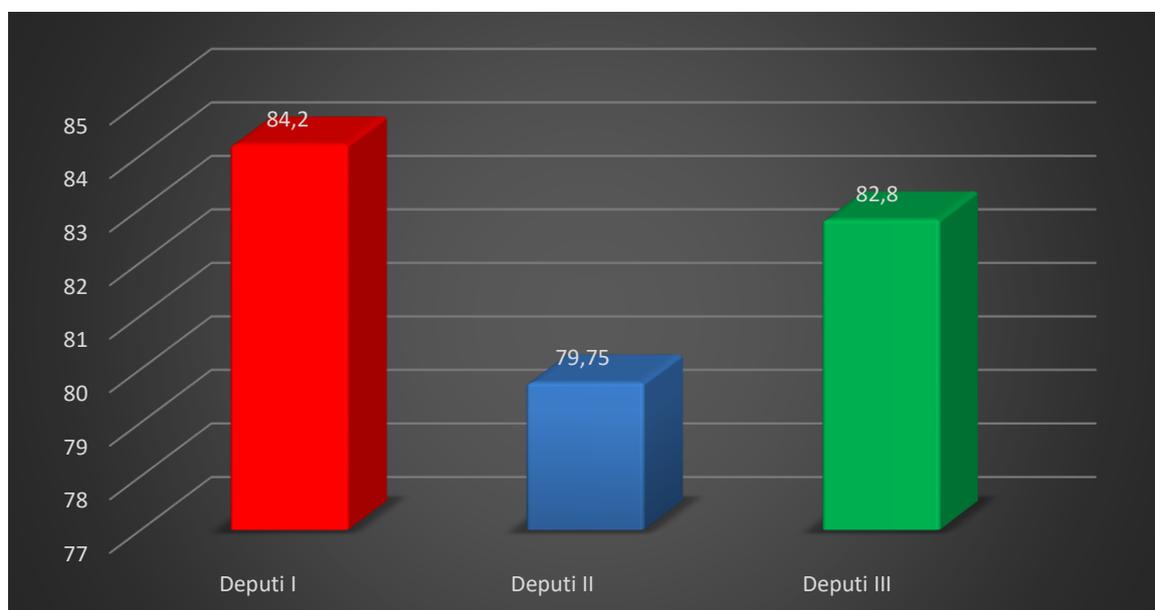
Table 19 Tabel realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	84	79.75	94.94	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2022 belum sepenuhnya mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria capaian belum memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai

### Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Satker yang setara di BPOM

Grafik 6 Perbandingan realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik lebih rendah jika dibandingkan dengan Deputi I dan Deputi III.

**Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):**

**Keberhasilan capaian kinerja disebabkan:**

Deputi bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik telah memberikan materi konten informasi kepada masyarakat yang mudah dipahami, sehingga meningkatkan awareness masyarakat untuk mengkonsumsi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu

**upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan:**

- 1) Dilakukan pengembangan subsite terkait informasi yang lebih luas yang sangat diperlukan oleh pelaku usaha
- 2) Membentuk jejaring Badan POM/ komunitas khusus untuk menjadi agen Badan POM dalam menyebarkan informasi terkait Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik terutama di daerah-daerah pelosok
- 3) Sosialisasi *Public Warning* obat tradisional dan suplemen kesehatan yang mengandung Bahan Kimia Obat yang berbahaya bagi kesehatan melalui media sosial/ media internet/ media elektronik/media cetak. *Public Warning* atau penjelasan public produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan mengandung Bahan Kimia Obat ini merupakan sebagai suatu bentuk edukasi masyarakat sebagai ujung tombak pengawasan obat dan makanan agar berdaya melindungi diri, keluarga, dan komunitas masyarakat terdekat dari produk yang berisiko terhadap kesehatan.
- 4) Meningkatkan strategi komunikasi, sosialisasi dan penyuluhan dengan cara:
  - memfokuskan tujuan dan tema KIE dengan mengacu pada pedoman strategi KIE;
  - penyampaian KIE dengan memperhatikan kebutuhan informasi masyarakat, media penyampaian yang tepat dan target penerima KIE dengan mempertimbangkan segmentasi target audience seperti gender, usia, pendidikan dan cakupan wilayah;
  - mengembangkan program KIE yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing misalnya KIE dengan menggunakan bahasa daerah;
  - melibatkan perangkat daerah/tokoh masyarakat/tokoh agama/organisasi dan komunitas masyarakat (PKK, Posyandu, dsb)
  - menggunakan media yang banyak diakses masyarakat yakni media televisi, kemasan produk dengan cara pencantuman NIE yang lebih jelas dan mudah terlihat serta mencantumkan logo BPOM pada kemasan, media sosial disesuaikan dengan usia dan platform media sosial, serta media luar ruang;
  - Melakukan upaya persuasif yang menyentuh sisi emosi dan dekat dengan gaya

hidup, kepercayaan, budaya, bahasa maupun nilai-nilai yang dianut masyarakat untuk membentuk sikap yang lebih positif mengenai pentingnya konsumsi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman, bermutu dan berkhasiat.

- Menyusun konten/materi informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan literasi kesehatan masyarakat seperti pengenalan logo obat pada kemasan obat sebagai penanda klasifikasi obat dan membaca informasi yang tertera pada label produk Obat dan Makanan terutama pada masyarakat di wilayah rural.
- Menggencarkan promosi penggunaan tagline cek KLIK, Kata BPOM dan BPOM Mobile melalui berbagai media.

#### Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- 1) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Masyarakat terkait Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik melalui webinar, pembuatan leaflet maupun melalui media sosial
- 2) *Public Warning* produk obat tradisional dan suplemen kesehatan mengandung bahan kimia obat dan kosmetik mengandung bahan dilarang / bahan berbahaya
- 3) Tersedianya website dan aplikasi mobile (IOS dan Android) BPOM e-Public Warning obat tradisional dan suplemen kesehatan mengandung bahan kimia obat. Aplikasi public warning untuk memberikan informasi kepada masyarakat produk yang telah ditarik dari peredaran karena mengandung bahan yang dilarang dan dapat berisiko bagi kesehatan. Website dan aplikasi ini terus dilakukan update / pengembangan sehingga dapat menyajikan data dan informasi mutakhir terkait produk OT dan SK yang berisiko terhadap kesehatan.
- 4) Tersedianya aplikasi pelaporan efek samping obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetika. Aplikasi pelaporan efek samping OT, SK, dan kosmetika dibuat user friendly sehingga masyarakat, tenaga kesehatan dan pelaku usaha dapat melaporkan efek samping produk yang diproduksi, diedarkan atau dikonsumsi. Aplikasi pelaporan efek samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan terus dilakukan pengembangan sehingga sesuai dengan regulasi yang ada dan penambahan fitur untuk melengkapi informasi dan memudahkan pelapor dalam melakukan pelaporan efek samping.
- 5) Adanya Subsite Pengawasan dan penilaian sarana dan produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
- 6) Pemberdayaan Masyarakat Tentang Pemilihan dan Penggunaan Kosmetika yang Baik

- 7) Tersedianya aplikasi *public warning* kosmetik dalam versi android dan web. Aplikasi *public warning* kosmetik dapat diakses oleh masyarakat untuk memberikan informasi produk-produk kosmetik yang mengandung bahan dilarang dan berbahaya yang berisiko bagi kesehatan dan produk obat tradisional dan suplemen kesehatan mengandung bahan kimia obat dan kosmetik mengandung bahan dilarang / bahan berbahaya
- 8) Aksi Nasional Kosmetik Bebas Merkuri
- 9) Pembentukan dan Pemberdayaan Duta Jamu Aman / Kosmetik Aman dalam program Badan POM goes to School/Campus, dengan hasil telah dibentuk 1.654 Duta Kosmetik Aman dan 261 Duta Jamu Aman seluruh Indonesia selanjutnya diberdayakan oleh Pusat untuk masing-masing 3 duta terbaik di masing-masing UPT yang berjumlah 213 Duta Kosmetik Aman dan 39 Duta Jamu Aman. 252 Duta terbaik tersebut berhasil melakukan KIE kepada 1.955.850 orang di tahun 2022 baik secara online maupun offline
- 10) Pembentukan dan Pemberdayaan Penyuluh dan Kader OT, SK dan Kosmetik Aman dengan pilot project di Jawa Tengah. Terbentuk 35 Penyuluh dari 16 Orsosmas yang berhasil membentuk 701 kader
- 11) Lomba Video KIE berbasis Digital OT, SK dan Kosmetik Aman Melalui Platform Media Sosial, diikuti oleh 152 peserta yang berasal dari Duta Kosmetik dan Jamu Aman yang menghasilkan 124 video kategori kosmetik, 24 video OT dan 4 video SK

SP 3

***Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik***

Sasaran program ini ditetapkan untuk mengukur tingkat kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja Deputy II BPOM dalam melakukan pengawasan baik *pre-market* maupun *post market* termasuk kinerja atas pelayanan publik yang diberikan.

Pada tahun 2022 Deputy II BPOM telah berhasil meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dengan nilai pencapaian NPS adalah **103.36%**, masuk dalam kriteria **memenuhi ekspektasi**.

Keberhasilan atas Sasaran Program ini diukur dengan menggunakan 3 IKSP, yaitu: (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik; (2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik; dan (3) Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional,

Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

### **IKSP 5 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik**

Pengukuran indeks ini dilakukan melalui survei yang bertujuan untuk mengukur kepuasan pelaku usaha yang telah mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari Deputy II BPOM dalam berbagai bentuk/jenis kegiatan, seperti pendampingan, desk, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Aspek pengukuran menggunakan kerangka konsep Customer Satisfaction dengan parameter Service Quality (ServQual) meliputi aspek 1) Tangible; 2) Reliability; 3) Assurance; 4) Responsiveness; dan 5) Empathy.

#### **Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

*Table 20 Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik*

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	%CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	89.30	94.50	105.49	Memenuhi Ekspektasi

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2022 diperoleh nilai Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sebesar 94.50. Capaian kinerja tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 89.30, dengan Nilai Pencapaian Indikator (NPI) sebesar **105.49%** masuk dalam kategori **Memenuhi Ekspektasi**

#### **Perbandingan Realisasi 2022 dengan Tahun sebelumnya**

Tabel 3.15 Perbandingan realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

2020			2021			2022		
Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
83	87.13	104.97	88.20	84.54	95.85	89.30	94.50	105.49

Berdasarkan data tersebut terdapat capaian indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik mengalami kenaikan pada tahun 2022.

### Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah / Akhir Tahun Renstra

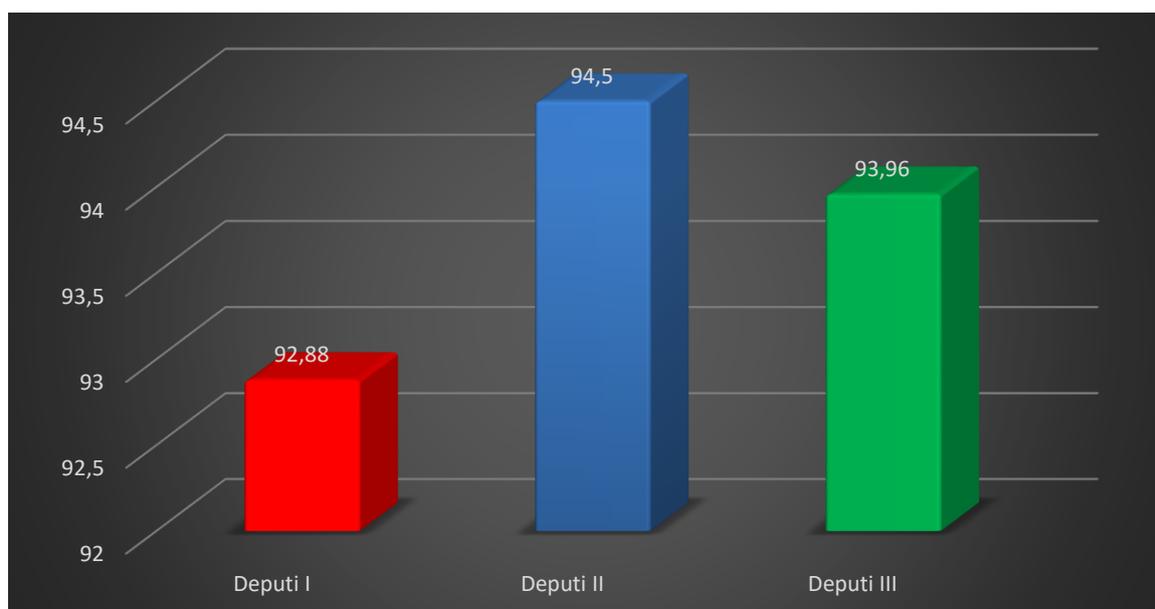
Tabel 3.16 Tabel realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	91.60	94.50	130.16	memenuhi ekspektasi

Realisasi Indeks Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik tahun 2022 telah mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria capaian memenuhi ekspektasi namun masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 tetap dapat tercapai.

### Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Satker yang setara di BPOM

Grafik 7 Perbandingan realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik



Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan deputy bidang pengawasan obat

tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik lebih rendah jika dibandingkan dengan Deputy I dan Deputy III

**Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

**Keberhasilan capaian kinerja disebabkan :**

Deputy bidang pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan kosmetik selama memberikan bimbingan, desk kepada pelaku usaha telah memberikan sesuai kebutuhan pelaku usaha.

**Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan:**

Beberapa upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap hasil survei kepada pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM dan melakukan tindak lanjut yang efektif atas feedback hasil survei yang diberikan pelaku usaha terhadap seluruh aspek tangibles, realibility, responsiveness, assurance, dan empathy. Dengan hasil dari survey kepuasan pelaku usaha maka akan diketahui kekurangan dari pelayanan kita, dan dari hasil itu dapat diperbaiki.
- 2) Melakukan identifikasi/pemetaan responden survei IKEPU untuk meminimalkan irisan dengan survei lainnya.
- 3) Melakukan inovasi atau perbaikan untuk mengatasi isu kecukupan waktu, , video/infografis materi, media komunikasi dengan pelaku usaha, teknik komunikasi sesuai karakteristik pelaku usaha dengan mempertimbangkan tingkat literasi,

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran program ini antara lain:

- 1) Sosialisasi regulasi di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
- 2) Pendampingan Pada Pelaku Usaha Dalam Pelaksanaan Uji Praklinik dan Uji Klinik
- 3) Pertemuan Pembahasan Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka
- 4) Pendampingan dalam Rangka Pemberdayaan UMKM Serta Usaha Jamu Gendong Untuk Menjamin Keamanan Produk dengan Memenuhi Sanitasi Higiene dan Dokumentasi
- 5) Bimbingan Teknis Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Prioritas Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19

- 6) Dukungan Percepatan Daya Saing Entrepreneur dan Start Up Kosmetik melalui Fasilitas Pemenuhan Regulasi
- 7) Pengembangan Kosmetik Tematik yang Diproduksi oleh UMKM Nasional
- 8) Intensifikasi pendampingan kepada pelaku usaha dalam pemenuhan peraturan melalui desk konsultasi dalam rangka penyelesaian temuan inspeksi sebagai perwujudan dari aspek reliability dan responsiveness layanan. Dengan desk konsultasi akan memudahkan pelaku usaha dalam menyelesaikan masalah yang ada serta mempercepat suatu proses pelayanan dalam hal pemenuhan kekurangan
- 9) Diskusi interaktif penguatan pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diproduksi berdasarkan kontrak
- 10) Pembekalan CPOTB Terkini bagi IOT dan IEBA dalam rangka percepatan penerapan CPOTB Terkini sesuai PerBPOM No. 25 Tahun 2021 tentang Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik sebagai upaya pemberian layanan yang reliable, responsive, dan empathy kepada pelaku usaha berkaitan masa transisi perubahan/pembaruan regulasi. Tidak semua pelaku usaha terutama untuk industry obat tradisional (IOT) dapat menerapkan CPOTB 2021 tetapi perlu adanya pendampingan berupa pembekalan/pelatihan kepada pelaku usaha
- 11) Pendampingan pelaku usaha impor Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan kosmetik dalam pemenuhan peraturan
- 12) Koordinasi dengan perwakilan RI di negara-negara tujuan ekspor melalui Kementerian Luar Negeri untuk mendapatkan data market intelligence OT, SK dan Kosmetik dalam rangka percepatan ekspor OT, SK dan Kosmetik.
- 13) Bimbingan Teknis dalam rangka Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Informasi dan Promosi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
- 14) Dialog Interaktif Prospektif Bisnis Kosmetik Ditinjau Dari Perizinan Sarana Dan Produk, Penyiapan DIP, Importasi Dan Eksportasi Serta Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pemenuhan Regulasi
- 15) Dialog interaktif obat tradisional yang kontrak termasuk pembahasan permasalahan yang ditimbulkan serta peningkatan kewaspadaan pelaku usaha dalam melakukan kontrak. Adanya celah dalam regulasi membuat pelaku usaha melakukan praktek kontrak yang tidak terdaftar di Badan POM. Selain Deputy II harus meningkatkan pengawasan terhadap produk kontrak, pelaku usaha harus diberikan pemahaman terkait peraturan kontrak produksi dan bahaya yang timbul bila melaksanakan kontrak tidak sesuai peraturan.
- 16) Konsultasi publik kesetaraan GMP yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk impor yang masuk ke Indonesia diproduksi sesuai dengan standar pembuatan yang baik (GMP) di Indonesia. Adanya perbedaan regulasi di tiap-tiap negara dalam

memproduksi obat tradisional dan suplemen kesehatan tentunya berdampak pada kualitas dari produk yang dihasilkan. Badan POM sendiri telah menetapkan standar pembuatan yang baik (GMP) yang berlaku di Indonesia dan harus dipatuhi oleh pelaku usaha sehingga produk-produk dari luar yang akan diimpor harus dibuat di fasilitas produksi yang menerapkan cara pembuatan yang baik minimal setara dengan standar pembuatan yang baik di Indonesia.

### **IKSP 6 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang dilakukan oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat.

Pengukuran menggunakan Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Deputy II BPOM dalam memberikan jaminan atas keamanan, khasiat / manfaat, dan mutu obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

#### **Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

*Table 21 Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik*

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	%CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	75	75.96	101.04	Memenuhi Ekspektasi

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2022 diperoleh nilai Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebesar 75.96. Capaian kinerja tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 75,00, dengan Nilai Pencapaian Indikator (NPI) sebesar **101,04%** masuk dalam kategori **Memenuhi Ekspektasi**

### Perbandingan Realisasi 2022 dengan Tahun sebelumnya

Table 22 Perbandingan realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

2020			2021			2022		
Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
86	70.90	82.44	73	68.74	94.16	75	75.96	101.44

Berdasarkan data tersebut terdapat capaian indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

### Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah / Akhir Tahun

#### Renstra

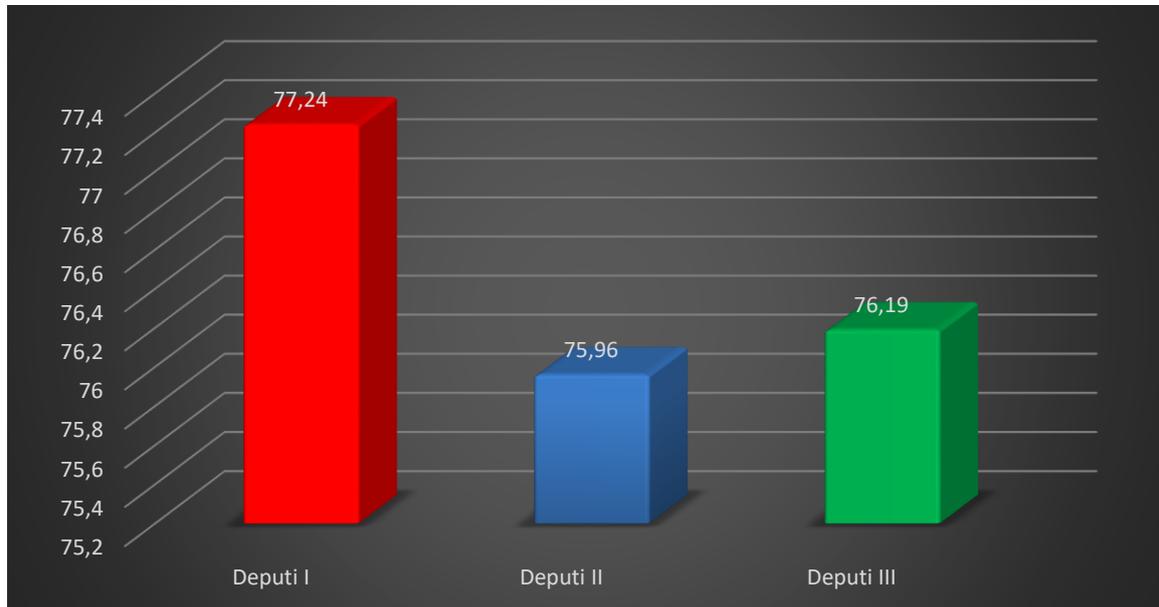
Table 23 Tabel realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.	79	75.96	96.15	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2022 belum sepenuhnya mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria capaian belum memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

## Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Satker yang setara di BPOM

Grafik 8 Perbandingan realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik deputy bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik lebih rendah jika dibandingkan dengan Deputi I dan Deputi III

**Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):**

### **Kegagalan capaian realisasi ini disebabkan:**

Kendala dalam pencapaian target Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik:

- 1) Masyarakat menilai aspek reliability yaitu kepuasan atas kemampuan pengawasan terkait obat tradisional dan suplemen kesehatan yang dilakukan masih dibawah harapan masyarakat.
- 2) Masyarakat memiliki harapan yang tinggi kepada BPOM untuk dapat memberikan kinerja pengawasan dalam penyediaan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan kosmetik yang saat ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat khususnya di masa pandemi seperti ini.

### **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan:**

Beberapa upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik antara lain:

- 1) Meningkatkan program KIE terkait capaian-capaian yang telah diraih kepada masyarakat dalam bentuk program / kegiatan yang lebih mudah dicerna / diterima oleh masyarakat.
- 2) Menggunakan teknologi informasi termasuk sosial media dalam mensosialisasikan hasil-hasil pengawasan kepada masyarakat, sehingga dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.
- 3) Memberikan informasi kepada publik terkait produk-produk yang mengandung bahan berbahaya.
- 4) Dilakukan pengembangan subsite terkait informasi yang lebih luas yang sangat diperlukan oleh pelaku usaha
- 5) Aktif membagikan informasi kepada publik terkait kegiatan pengawasan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti efek samping Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan, TIE dan produk ilegal melalui liputan media masa/ Sosial media, agar pesan ke masyarakat tersampaikan bahwa BPOM melindungi masyarakat.
- 6) Mengkomunikasikan langkah pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Deputy II BPOM melalui kerjasama dengan media agar masyarakat lebih terinformasi sehingga berdampak pada kepuasan masyarakat

#### Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai saran program ini antara lain:

- 1) Penajaman Mutu Prioritas Sampling dan Pengujian Kosmetik di Peredaran
- 2) Pembekalan Teknis Petugas dalam Rangka Pengawasan Kosmetik
- 3) Bimbingan Teknis Peningkatan kualifikasi inspektur obat tradisional dan suplemen kesehatan. Melalui pelatihan ini inspektur tidak hanya dibekali materi terkait secara langsung dengan pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan namun juga materi lainnya yang dapat menunjang dan meningkatkan kemampuan inspektur dalam melakukan pengawasan. Topik yang akan disampaikan disesuaikan dengan perkembangan saat ini
- 4) Intensifikasi Penelusuran Mutu dan Keamanan Kosmetik
- 5) Aksi Nasional Kosmetik Bebas Merkuri
- 6) *Public awareness* bahaya Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan kosmetika mengandung bahan kimia Obat/ berbahaya / dilarang
- 7) Optimalisasi penanganan OT dan SK yang mengandung bahan kimia obat
- 8) Penyelenggaraan Publik Warning Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dan

Kosmetik mengandung bahan kimia obat/ bahan terlarang tahun 2022

- 9) Adanya Subsite Pengawasan dan penilaian sarana dan produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
- 10) Konsultasi publik kesetaraan GMP yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk impor yang masuk ke Indonesia diproduksi sesuai dengan standar pembuatan yang baik (GMP) di Indonesia. Adanya perbedaan regulasi di tiap-tiap negara dalam memproduksi obat tradisional dan suplemen kesehatan tentunya berdampak pada kualitas dari produk yang dihasilkan. Badan POM sendiri telah menetapkan standar pembuatan yang baik (GMP) yang berlaku di Indonesia dan harus dipatuhi oleh pelaku usaha sehingga produk-produk dari luar yang akan diimpor harus dibuat di fasilitas produksi yang menerapkan cara pembuatan yang baik minimal setara dengan standar pembuatan yang baik di Indonesia.

### **IKSP 7 – Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**

Pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik yang diberikan / disediakan oleh Deputy II BPOM. Layanan publik yang diberikan oleh Deputy II BPOM antara lain: 1) Registrasi produk dan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan; 2) notifikasi kosmetika; 3) sertifikasi untuk keperluan ekspor dan impor; 3) sertifikasi cara pembuatan obat tradisional yang baik; 4) sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik.

Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik):

#### **Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

*Table 24 Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik*

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	%CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	84.38	87.05	103.16	Memenuhi Ekspektasi

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2022 diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 87.05. Capaian kinerja tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 84.38, dengan Nilai Pencapaian Indikator (NPI) sebesar **103,16 %** masuk dalam kategori **Memenuhi Ekspektasi**

Perbandingan Realisasi 2022 dengan Tahun sebelumnya

Table 25 Perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

2020			2021			2022		
Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
82.83	84.46	101.97	83.50	84,25	100.90	84.38	87.05	103.16

Berdasarkan data tersebut terdapat capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mengalami kenaikan di tahun 2022 meskipun pernah terjadi penurunan di tahun 2021.

Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target tengah Renstra dan akhir Renstra

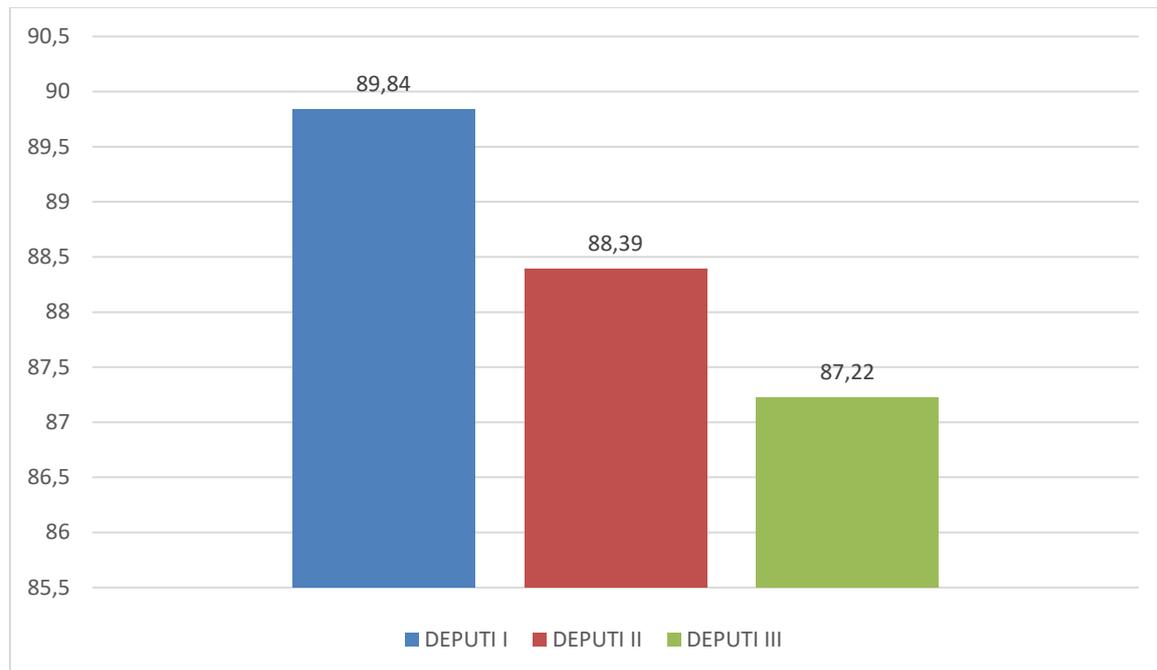
Table 26 Tabel realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	86.13	87.05	101.07	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2022 telah mencapai target Renstra tahun 2024 meskipun telah memenuhi ekspektasi sampai akhir renstra tetap diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Satker yang setara di BPOM

Grafik 9 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan Satuan Kerja Lain



Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik lebih rendah jika dibandingkan dengan Deputi I dan lebih tinggi dibandingkan Deputi III.

**Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):**

**Keberhasilan capaian kinerja ini disebabkan :**

- 1) Tersedianya kepastian terhadap biaya layanan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 2) Pelatihan, coaching dan mentoring kepada Petugas Pelayanan Publik telah dilakukan secara kontinyu dengan tujuan menjawab kebutuhan dan harapan pelaku usaha sebagai penerima layanan sehingga dapat mencapai unsur penilaian kepuasan terhadap Kompetensi Pelaksana dan Perilaku Pelaksanaan . Adanya diskusi aktif antar petugas pelayanan publik. Meningkatnya kompetensi petugas pelayanan publik sehingga mempercepat pelayanan dan memberikan kepuasan kepada konsumen. Sarana dan prasarana semakin dilengkapi dan ditingkatkan sehingga memberikan kenyamanan pada pengguna layanan, Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan

publik disusun dengan menyesuaikan situasi dan kondisi pemohon layanan

**Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan:**

Beberapa upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik antara lain:

- 1) Melakukan simplifikasi persyaratan layanan publik dan mensosialisasikannya kepada pelaku usaha sebagai upaya menjamin kemudahan berusaha.
- 2) Penatalaksanaan dan sosialisasi sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan publik yang dapat mempermudah aksesibilitas pelaku usaha dalam proses memperoleh layanan publik
- 3) Mempercepat waktu penyelesaian pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelaku usaha dengan tetap menjamin pemenuhan terhadap peraturan Perundang-undangan
- 4) Otomasi sistem perumusan dan penyampaian jawaban/ informasi kepada pelaku usaha yaitu dengan penyampaian jawaban yang identik secara otomatis berdasarkan bank record pertanyaan sebelumnya
- 5) Pemeliharaan, peninjauan dan pengembangan subsite secara berkelanjutan yang bertujuan memberikan informasi regulasi, hasil pengawasan dan pelayanan publik terupdate serta mudah diakses.
- 6) Membuat suatu inovasi yang terkait dengan percepatan pelayanan publik, sehingga percepatan pelaku usaha dalam mendapatkan pelayanan .
- 7) Aktif membagikan informasi kepada publik terkait kegiatan pengawasan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti efek samping Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan, TIE dan produk ilegal melalui liputan media masa/ Sosial media, agar pesan ke masyarakat tersampaikan bahwa BPOM melindungi masyarakat.

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

- 1) Peningkatan kompetensi Pegawai Pelayanan Publik melalui pelatihan, coaching dan mentoring sebagai upaya peningkatan penilaian dari pelaku usaha dan masyarakat terhadap aspek Kompetensi Pelaksana dan Perilaku Pelaksana layanan.
- 2) Pelayanan Prima Pendaftaran Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik di daerah
- 3) Melaksanakan forum komunikasi pelayanan publik sebagai bentuk keterbukaan informasi layanan kepada masyarakat khususnya pada unsur Persyaratan, Sistem,

Mekanisme, dan Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/ Tarif, dan Produk Spesifikasi Jenis Layanan.

- 4) Peningkatan Sistem Layanan Pengaduan di website ULPK dengan perhitungan timeline status pelaporan (verifikasi, proses, dan selesai) sebagai upaya pemenuhan unsur Waktu Penyelesaian dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dalam Survei Kepuasan Masyarakat
- 5) Pengadaan Alat Pengolah Data Ruang Pelayanan Publik
- 6) Menindaklanjuti saran dan masukan yang disampaikan oleh responden melalui Survei Kepuasan Masyarakat dalam rangka perbaikan berkelanjutan dan secara komprehensif terhadap pelayanan publik yang diberikan
- 7) Menyusun dan melaksanakan inovasi Pelayanan Publik berkelanjutan yang bertujuan memudahkan masyarakat untuk mengakses dan mendapatkan pelayanan
- 8) Memberikan pendampingan secara intensif kepada pelaku usaha dalam pemenuhan peraturan seperti desk konsultasi dalam rangka mempermudah dan mempercepat penyelesaian pelayanan publik (sertifikasi dan SKI/SKE)
- 9) Memfasilitasi layanan konsultasi yang mudah diakses secara langsung maupun melalui berbagai media seperti whatsapp, email, subsite dan media sosial serta konsultasi langsung secara daring melalui live chat subsite dan video conference
- 10) Sosialisasi kepada eksportir dan importir terkait terobosan dan percepatan Pelayanan Publik SKI SKE obat tradisional dan suplemen kesehatan dalam rangka dukungan pemulihan ekonomi nasional setelah Pandemi Covid-19
- 11) Tersedia subsite sebagai salah satu wadah informasi yang mudah diakses oleh pelaku usaha yang berisi antara lain informasi terkait regulasi di bidang Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, FAQ dan berita/artikel terbaru terkait Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
- 12) Adanya Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Badan POM memberikan gambaran kepada Badan POM kebutuhan akan layanan yang diinginkan oleh masyarakat serta aspek-aspek yang dapat diperbaiki atau dikembangkan oleh Badan POM secara berkelanjutan.

**SP 4**

***Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik***

Pada tahun 2022 Deputy II BPOM telah berupaya meningkatkan kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dengan Nilai Pencapaian Sasaran (**NPS**) **89,58 %** dengan **belum memenuhi ekspektasi**.

Keberhasilan ini diukur dengan menggunakan 1 IKSP yaitu (1) Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

**IKSP 8 – Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**

Pengukuran menggunakan Indeks kualitas kebijakan dimaksudkan untuk mengetahui kualitas kebijakan yang dikeluarkan oleh Deputy II BPOM dalam melakukan kegiatan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi (menggunakan *tools* yang dikeluarkan oleh LAN) pada tahun 2020 terhadap kebijakan yang disusun oleh Deputy II BPOM.

**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

*Table 27 Realisasi Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik*

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	%CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89	79.73	89.58	Belum memenuhi ekspektasi

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2022 diperoleh nilai Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebesar 79.73. Capaian kinerja tersebut telah belum memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 89.00, dengan Nilai Pencapaian Indikator (NPI) sebesar **89.58 %** masuk dalam kategori **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

### Perbandingan Realisasi 2022 dengan Tahun sebelumnya

Table 28 Perbandingan realisasi Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

2020			2021			2022		
Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
81	87.53	108.06	88	87.53	99,46	89	79.73	89.58

Berdasarkan data tersebut terdapat capaian indikator Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mengalami penurunan tiap tahunnya.

### Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah / Akhir Tahun

#### Renstra

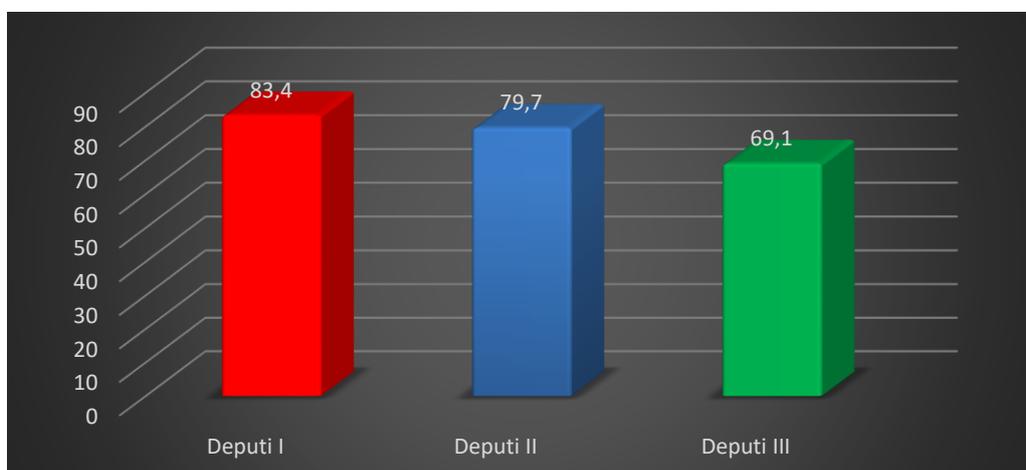
Table 29 Tabel realisasi Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	90	79.73	88.58	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi Indeks Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2022 belum sepenuhnya mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria capaian belum memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai

### Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Satker yang setara di BPOM

Grafik 10 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks kualitas kebijakan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan Satuan Kerja Lain



Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik lebih rendah jika dibandingkan dengan Deputi I dan lebih tinggi dibandingkan Deputi III

**Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):**

**Kegagalan capaian kinerja ini disebabkan :**

- 1) Terdapat perubahan mekanisme penilaian IKK pada tahun 2021 yang sebelumnya menggunakan penilaian secara manual dengan menggunakan expert judgement, untuk tahun 2021 dilakukan penilaian secara sistem dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang dibangun oleh Lembaga Administrasi Negara bersama Board Member.
- 2) Terdapat perubahan kategori indeks penilaian, dimana semula untuk mendapatkan predikat sangat baik harus memiliki skor indeks 90- 100 namun dengan menggunakan tools baru predikat tersebut sudah dapat dicapai dengan skor 80,00 – 90,99. Hal ini disebabkan terdapat perubahan framework IKK dengan lebih menyederhanakan jumlah pertanyaan dan mengganti pertanyaan yang lebih memfokuskan dalam melakukan analisis kebijakan, sehingga untuk mencapainya diperlukan kualitas kebijakan yang lebih baik.

**Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan:**

Dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan kinerja, maka akan dilakukan beberapa hal antara lain:

- 1) Peningkatan kompetensi staf terkait kebijakan baru penilaian Indeks Kualitas Kebijakan melalui pelatihan yang melibatkan LAN selaku instansi penilai.
- 2) Melakukan penyusunan regulasi termasuk sosialisasinya dengan juga memperhatikan kaidah-kaidah yang terdapat dalam penilaian IKK
- 3) Melakukan penyesuaian target kinerja sesuai dengan kategori penilaian IKK yang terbaru.

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Brainstorming / Perencanaan penyusunan standar dibidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

2. Review dan Penyusunan Standar di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
3. Sosialisasi regulasi di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
4. Pelatihan legislative drafting
5. Pelatihan *Regulatory Impact Assessment*

SP 5

***Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik***

Pada tahun 2022 Deputy II BPOM telah berhasil mewujudkan efektivitas pengawasan dan pelayanan public Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) **101,46%** dan telah **memenuhi ekspektasi**.

Keberhasilan atas sasaran program ini diukur dengan menggunakan 6 (enam) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), yaitu: 1) Presentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; 2) Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor; 3) Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; 4) Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; 5) Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu; dan 6) Tingkat efektifitas KIE di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

**IKSP 9 - Presentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**

Pengukuran menggunakan indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Deputy II BPOM dalam melakukan pengawasan untuk memberikan jaminan bahwa obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang beredar telah memenuhi syarat aman dan bermutu. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dengan menggunakan sampling targeted/purposive, kriteria pemeriksaan meliputi: nomor izin edar/produk ilegal termasuk palsu, kedaluwarsa, rusak, label dan penandaan serta pengujian laboratorium

### Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Table 30 Realisasi Presentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	%CAPAIAN	KRITERIA
Presentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91.50	83.63	91.40%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2022 diperoleh nilai Presentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 83.63. Capaian kinerja tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 91.50, dengan Nilai Pencapaian Indikator (NPI) sebesar **91.40 %** masuk dalam kategori **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

### Perbandingan Realisasi 2022 dengan Tahun sebelumnya

Table 31 Perbandingan realisasi Presentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

2020			2021			2022		
Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
86	90.58	105.44	91	88.60	97.25	91.50	83.63	91.40

Berdasarkan data tersebut terdapat capaian indikator Presentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan mengalami penurunan tiap tahun.

### Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah / Akhir Tahun

#### Renstra

Table 32 Tabel realisasi Presentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA

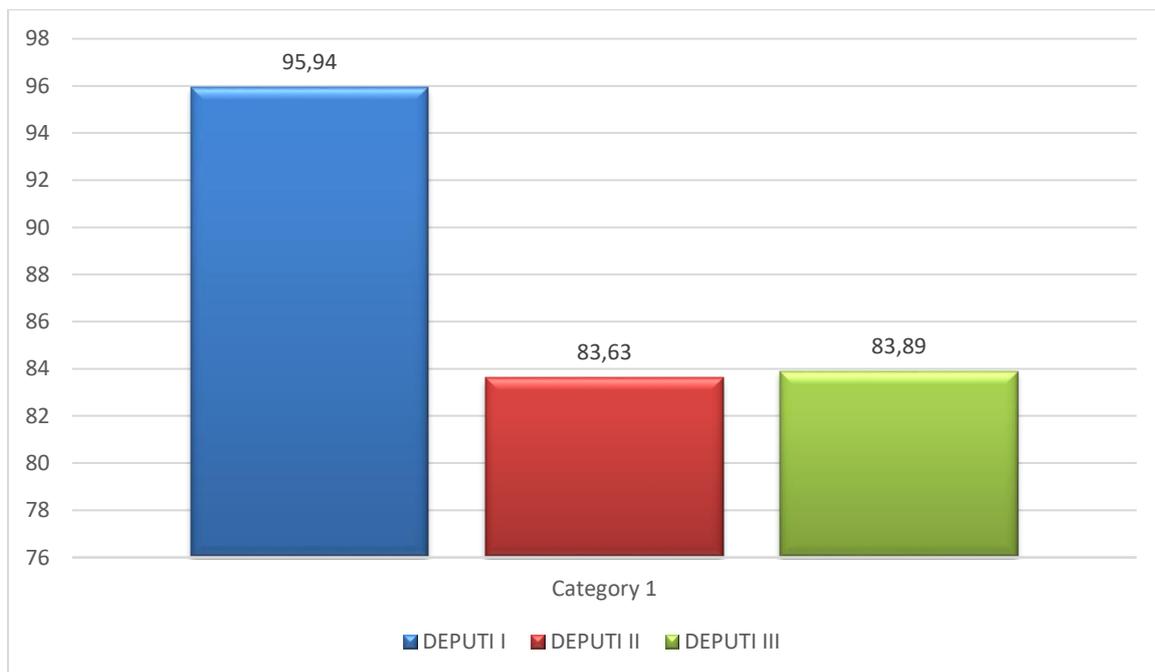
Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Presentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92.50	83.63	90.41%	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi Presentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi

syarat aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 belum sepenuhnya mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria capaian belum memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

### Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Satker yang setara di BPOM

Grafik 11 Perbandingan Capaian Kinerja Presentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan Satuan Kerja Lain



Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi Presentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan lebih rendah jika dibandingkan dengan Deputy I dan Deputy III.

### Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):

#### **Kegagalan capaian kinerja ini disebabkan:**

Dalam proses produksi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan seiring dengan peningkatan demand masyarakat dan persaingan harga pasar menyebabkan terdapat pelaku usaha yang mengabaikan beberapa aspek CPOTB dalam memenuhi persyaratan dan keamanan mutu seperti kadar air yang tidak memenuhi syarat dikarenakan waktu/ metode pengeringan yang tidak tervalidasi sehingga berisiko terhadap produk yang dihasilkan. Adanya oknum yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan kebutuhan masyarakat dalam memelihara kesehatan dan penerapan proses dengan iklan dan penandaan yang TMK

**upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan:**

- 1) Ketepatan analisis pemilihan sampel targeted berdasarkan trend hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
- 2) Intervensi dari aspek supply:
  - a. Intensifikasi Pemeriksaan sarana, sampling dan pengujian serta pembersihan pasar
  - b. Koordinasi dengan lintas sector terkait dalam pemeriksanaan sarana dan produk, serta pengawasan peredaran produk daring
  - c. Sosialisasi kepada pelaku usaha terkait Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dan kosmetik yang Aman dan Bermutu
  - d. Reward and Punishment terhadap pelaku usaha Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dalam penerepan CPOTB
- 3) Intervensi dari aspek demand melalui intensifikasi KIE masyarakat untuk meningkatkan literasi dalam memilih dan menggunakan produk

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja:**

- 1) Penilaian Keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan bersama Tim Ahli
- 2) Analisis Evaluasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Resiko Tinggi
- 3) Intensifikasi Data Permohonan Notifikasi Kosmetika
- 4) Pembahasan aspek keamanan dan klaim kosmetika
- 5) Clustering Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan serta Clustering Notifikasi Kosmetik
- 6) Melakukan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga dan Lintas Sektor terkait lainnya dalam pengawasan sarana dan produk.
- 7) Pemberian bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk pelaporan efek samping obat tradisional dan suplemen kesehatan
- 8) Pembekalan kepada pelaku usaha Industri Obat Tradisional (IOT) berkaitan dengan adanya perubahan regulasi yaitu penerapan CPOTB terkini diberikan sebagai upaya pendampingan kepada pelaku usaha agar dapat memenuhi ketentuan CPOTB dalam proses produksi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat.
- 9) Melakukan rapat koordinasi dalam manajemen sampling dan pengujian Obat Tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik
- 10) Workshop Paradigma Baru Pengawasan Kosmetik

- 11) Penyelenggaraan pertemuan evaluasi implementasi sinergitas Lintas Fungsi bersama pihak kepolisian dalam penanganan Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat
- 12) Pendampingan pelaku usaha melalui kegiatan Forum Komunikasi Hasil Pengawasan Kosmetika Mengandung Bahan Dilarang/Berbahaya
- 13) Penyelenggaraan Forum Komunikasi CAPA (Corrective Action Preventive Action) Tindak Lanjut terhadap Temuan Kosmetika yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

### IKSP 10 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor

Pengukuran menggunakan indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Deputy II BPOM dalam menjalin kerjasama dengan lintas sektor, dengan melihat persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti oleh lintas sektor. Rekomendasi yang diberikan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, sarana pelayanan farmasi), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan, hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

#### Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Table 33 Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	%CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor	78	82.43	105.67	Memenuhi Ekspektasi

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2022 diperoleh nilai Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor sebesar 82.43. Capaian kinerja tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 78, dengan Nilai Pencapaian Indikator (NPI) sebesar **105,67%** masuk dalam kategori **Memenuhi Ekspektasi**.

### Perbandingan Realisasi 2022 dengan Tahun sebelumnya

Tabel 3.29 Perbandingan realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

2020			2021			2022		
Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
66	75.82	114.88	76	81.32	106.84	78	82.43	105.67

Berdasarkan data tersebut terdapat capaian indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor terdapat kenaikan capaian setiap tahunnya.

### Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah / Akhir Tahun Renstra

Tabel 3.30 Tabel realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor	82	82.43	100.52	Memenuhi ekspektasi

Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor tahun 2022 sudah mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria capaian memenuhi ekspektasi namun tetap diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

### Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):

#### Keberhasilan capaian kinerja ini disebabkan :

Adanya peningkatan koordinasi antara Badan POM dan lintas sektor dalam rangka perkuatan pengawasan Obat dan Makanan melalui penandatanganan kerja sama, rapat koordinasi

teknis, forum komunikasi, koordinasi pengawasan melalui skema DAK dan pembekalan terhadap lintas sektor terkait pengawasan fasilitas produksi. Melakukan komunikasi dan koordinasi secara aktif dengan lintas sektor dalam upaya percepatan penanganan tindak lanjut hasil pengawasan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi dengan lintas sektor secara berkala

**Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan:**

Akan dilakukan pengembangan aplikasi SMARTPOM sehingga dapat mendukung secara optimal pelaksanaan koordinasi dalam rangka rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan. Perlu dilakukan forum komunikasi yang intensif antara UPT dengan linsek terkait tindak lanjut pengawasan dari Obat Tradisional dan suplemen kesehatan dan optimalisasi sinergitas dan komitmen implementasi kerja sama lintas sektor serta Berkoordinasi dengan UPT Badan POM dalam upaya meningkatkan implementasi dengan lintas sektor (KPID) di wilayahnya. Melanjutkan program Zona Ramah Promosi Online dengan melakukan perluasan kerjasama dengan media social lainnya.

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja:**

- 1) Forum Komunikasi Efektifitas Implementasi Kesepakatan UPT Badan POM dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah terkait Pengawasan Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.
- 2) Kolaborasi BPOM dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Indonesian E-commerce Association (idEA), dan 8 (delapan) platform marketplace ((1) Tokopedia, (2) Shopee, (3) Elevenia, (4) Bukalapak, (5) Blibli, (6) Lazada, (7) JDID, dan (8) Jakmall) dalam program “Zona Ramah Promosi Online Usaha Mikro Kecil Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan” untuk memberikan edukasi preventif kepada non-official seller UMK yang mengedarkan dan mengiklankan produk pada media platform marketplace serta memberikan “keramahan” dalam memenuhi ketentuan OT dan SK serta memperbesar peluang untuk berkembang dan berdaya saing.
- 3) Forum komunikasi antara tim di Deputy II BPOM dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) dan Asosiasi.
- 4) Koordinasi dengan lintas sektor dalam pelaporan monitoring efek samping kosmetik.
- 5) Mengadakan rapat koordinasi teknis dengan seluruh UPT Badan POM di Indonesia, guna memberikan arahan dan bimbingan serta evaluasi agar Kepala UPT terus meningkatkan kerja sama dengan lintas sektor di daerahnya masing-masing.
- 6) Monitoring dan Koordinasi pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan

kosmetik serta peningkatan kerja sama lintas sektor.

- 7) Optimalisasi penggunaan aplikasi SMARTBPOM yang dapat terhubung antara Badan POM, UPT Badan POM, dan Pemerintah Daerah Setempat sehingga tindak lanjut pengawasan dapat terus dilaksanakan.
- 8) Membentuk jejaring Badan POM dengan Petugas PD. Pasar Jaya untuk menjadi perpanjangan tangan dalam melakukan pengawasan di pasar tradisional terkait obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik.
- 9) Diskusi Interaktif dengan lintas sector yaitu dinas kesehatan propinsi dan kabupaten serta assosiasi PAFI terkait dengan ketersediaan Tenaga Teknis Kesehatan sebagai Penanggung Jawab sarana UMOT dan UKOT.
- 10) Pembekalan bagi petugas dinas kesehatan kabupaten terkait persyaratan sanitasi, hygiene, dan dokumentasi bagi UMOT dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik

**IKSP 11 - Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik**

Pengukuran menggunakan indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Deputy II BPOM dalam melakukan sinergi dengan lintas sektor terkait pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

*Table 34 Realisasi Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik*

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	%CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	82	83.75	102.13	Memenuhi Ekspektasi

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2022 diperoleh nilai Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sebesar 83.75. Capaian kinerja

tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 82,00, dengan Nilai Pencapaian Indikator (NPI) sebesar **102,13%** masuk dalam kategori **Memenuhi Ekspektasi**.

#### Perbandingan Realisasi 2022 dengan Tahun sebelumnya

*Table 35 Perbandingan realisasi Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya*

2020			2021			2022		
Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
-	-	-	80	80	100	82	83.75	102.13

Berdasarkan data tersebut terdapat capaian Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik mengalami kenaikan setiap tahun.

#### Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah / Akhir Tahun Renstra

*Table 36 Tabel realisasi Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA*

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	86	83.75	97.38	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik 2022 belum sepenuhnya mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria capaian belum memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

**Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):**

#### **Keberhasilan capaian kinerja ini disebabkan :**

Deputi II telah berhasil membangun komunikasi yang intensif dan mutualisme dan melaksanakan tahapan secara sistematis dan produktif

**Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan:**

Melakukan koordinasi bersama lintas sektor untuk membangun komitmen program pemberdayaan masyarakat. sasaran Lintas Sektor. penyusunan pedoman / juknis dalam implementasi komitmen dan peran serta lintas sektor. Monitoring dan Evaluasi komitmen Lintas Sektor dalam program Pemberdayaan Masyarakat dari Perguruan Tinggi serta Sekolah. penyusunan RPS (Rencana Pembelajaran Semester) bersama Belmawa/program kolaborasi bersama Diktiristek.

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja:**

- 1) Melakukan koordinasi bersama lintas sektor untuk membangun komitmen program pemberdayaan masyarakat.
- 2) Disiplin dalam melaksanakan perencanaan target lintas sektor
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif terhadap komitmen lintas sektor

**IKSP 12 - Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik**

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan yang dinilai berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi : Kebijakan Pelayanan (bobot 30%); Profesionalitas SDM (18%); Sarana Prasarana (15%); Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%); Konsultasi dan Pengaduan (15%); Inovasi (7%). Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

*Table 37 Realisasi Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik*

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	%CAPAIAN	KRITERIA
Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	4.36	4.54	104.13	Memenuhi Ekspektasi

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2022 diperoleh nilai Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sebesar 4.54. Capaian kinerja tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 4.36, dengan Nilai Pencapaian Indikator (NPI) sebesar **104,13%** masuk dalam kategori **Memenuhi Ekspektasi**.

### Perbandingan Realisasi 2022 dengan Tahun sebelumnya

Table 38 Perbandingan realisasi Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

2020			2021			2022		
Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
3.38	4.25	120	3.28	4.04	123.17	4.36	4.54	104.13

Berdasarkan data tersebut terdapat capaian Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021.

### Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah / Akhir Tahun

#### Renstra

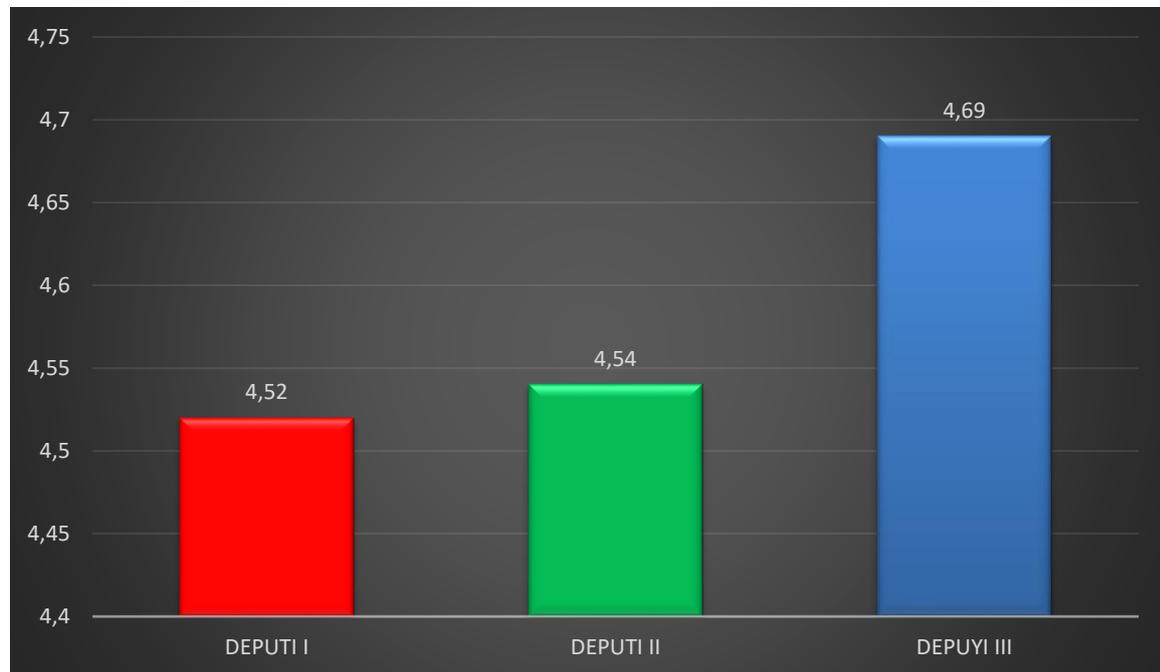
Table 39 Tabel realisasi Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	4.55	4.54	99.78	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi Indeks Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik tahun 2022 belum sepenuhnya mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria capaian belum memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

## Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Satker yang setara di BPOM

Grafik 12 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dengan Satuan Kerja Lain



Bila dibandingkan dengan kinerja satuan kerja lainnya, maka capaian ini lebih tinggi daripada capaian kinerja Deputy I, namun lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerja Deputy III.

**Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):**

### **Keberhasilan capaian kinerja ini disebabkan :**

Deputi II dalam pelaksanaan pelayanan public telah menerapkan Standar Pelayanan secara konsisten dengan menepati time line yang telah ditentukan untuk menjamin kepuasan konsumen, sesuai dengan Maklumat Pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan telah dipublikasikan melalui berbagai media untuk diketahui masyarakat.

### **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan:**

Kebijakan pelayanan yang tertuang dalam Standar Pelayanan Publik, dilakukan review setiap tahun untuk menyesuaikan peraturan dan kebijakan yang terbaru serta masukan dari konsumen serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik.

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja:**

- 1) Pembekalan kepada seluruh pegawai yang memberikan pelayanan publik melalui

pelatihan-pelatihan pelayanan prima yang dilakukan secara rutin.

- 2) Pemberian layanan konsultasi baik secara offline maupun online dengan menggunakan layanan via telpon atau whatsapp
- 3) Penyelenggaraan kegiatan Coaching clinic secara daring sehingga mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan bimbingan
- 4) Penyebarluasan informasi terkait pelayanan melalui sosial media
- 5) Penyediaan sarana dan prasarana layanan publik yang baik
- 6) Digitalisasi layanan publik untuk percepatan timeline layanan dan kemudahan akses oleh pelaku usaha
- 7) Membuat suatu system secara otomatis untuk menjawab pertanyaan sama dari pelaku usaha berdasarkan record bank pertanyaan sebelumnya
- 8) Dilakukan terus menerus pengembangan subsite yang memberikan informasi regulasi, pengawasan dan pelayanan public yang up to date
- 9) Supervisi dan konsultasi secara online (via WA dan zoom meeting) serta konsultasi tatap muka di Gedung Layanan Publik BPOM
- 10) Pembentukan ekosistem ekspor jamu yang kondusif untuk meningkatkan ekspor jamu melalui sinergitas antar pemangku kepentingan ekspor jamu.

### **IKSP 13 - Presentase Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Ketepatan waktu dalam pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik merupakan permohonan penilaian sarana dan produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan SLA (Service Level Agreement)/timeline yang telah ditetapkan.

#### **Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

*Table 40 Realisasi Presentase Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu*

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	%CAPAIAN	KRITERIA
Presentase Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu.	90	93.41	103.78	Memenuhi Ekspektasi

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2022 diperoleh nilai Indeks Presentase Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu sebesar 93.41. Capaian kinerja tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 90,00, dengan Nilai Pencapaian Indikator (NPI) sebesar **103,78%** masuk dalam kategori **Memenuhi Ekspektasi**.

#### Perbandingan Realisasi 2022 dengan Tahun sebelumnya

Table 41 Perbandingan realisasi Presentase Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

2020			2021			2022		
Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
82	92,67	113,01	89	92,64	104,09	90	93,41	103,78

Berdasarkan data tersebut terdapat capaian indikator Presentase Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021.

#### Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah / Akhir Tahun

##### Renstra

Table 42 Tabel realisasi Presentase Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Presentase Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu.	91	93,41	102,65	Memenuhi ekspektasi

Realisasi Indeks Presentase Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu tahun 2022 sudah mencapai target Renstra tahun 2024 namun masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

**Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):**

#### **Keberhasilan capaian kinerja ini disebabkan :**

Petugas pelayanan publik di Deputy II telah mampu melaksanakan/melayani permohonan dokumen pelayanan publik sesuai dengan SLA.

**Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan:**

- 1) Sosialisasi regulasi terkini terkait pengawasan pemasukan obat dan makanan.
- 2) Intensifikasi koordinasi lintas sektor bersama lembaga yang berwenang di bidang ekspor impor seperti INSW, DJBC dan Kementerian Perdagangan.
- 3) Peningkatan peran UPT dalam penerbitan SKI dan SKE
- 4) Peningkatan kompetensi petugas pelayanan publik dilakukan secara kontinyu
- 5) Membuat sistem pelatihan secara online untuk mempermudah personil kunci perusahaan mendapatkan informasi dan pengetahuan teknis terkait persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- 6) Mengintensifkan koordinasi dengan lintas sektor dan internal Badan POM untuk senantiasa mengupgrade dan mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi yang efektif dan mudah digunakan.
- 7) Memperbanyak media informasi yang berisi informasi terkait persyaratan dan tata cara pengajuan perizinan yang lebih inovatif dan mudah dipahami dengan memperhatikan kemampuan pengguna layanan yang beragam.

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja:**

- 1) Intensifikasi penilaian berkas pendaftaran melalui kegiatan Crash program
- 2) Pembahasan evaluasi berkas pendaftaran bersama tim ahli
- 3) Intensifikasi Data Permohonan Notifikasi Kosmetika
- 4) Simplifikasi regulasi yang mempunyai tujuan untuk percepatan pelayanan publik
- 5) Melaksanakan Pemeriksaan sarana Produksi dalam rangka penerbitan Sertifikat CPOTB dan penerbitan SKI, SKE dan SAS sesuai dengan SLA
- 6) Pendampingan pelaku usaha impor Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dan kosmetik dalam pemenuhan peraturan
- 7) Sosialisasi sistem E-Sertifikasi dalam rangka pengurusan sertifikat CPOTB kepada pelaku usaha
- 8) Memberikan pendampingan langsung kepada pelaku usaha dalam pemenuhan peraturan seperti desk konsultasi dalam rangka penyelesaian temuan inspeksi.
- 9) Melakukan verifikasi teknis secara online pada sarana importir obat tradisional, suplemen dan kosmetik kesehatan berupa sampling produk untuk dilakukan pengujian ke laboratorium eksternal sesuai dengan parameter pengujian yang berlaku
- 10) Desk Konsultasi Layanan Terpadu Kosmetika meliputi Notifikasi, Sertifikasi CPKB, Surat Keterangan Impor/Ekspor Kosmetik

#### IKSP 14 - Tingkat efektifitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman, maka dilakukan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Pengukuran menggunakan indikator ini ditujukan untuk mengetahui kinerja Deputy II BPOM dalam melakukan program KIE kepada masyarakat. Pelaksanaan program dibagi menjadi 3 (tiga) model yaitu secara langsung, melalui media cetak dan elektronik, dan menggunakan media sosial.

#### Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Table 43 Realisasi Tingkat efektifitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	%CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat efektifitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	94,19	95,7	101,60%	Memenuhi Ekspektasi

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2022 diperoleh nilai Tingkat efektifitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebesar 95.7. Capaian kinerja tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 94.19, dengan Nilai Pencapaian Indikator (NPI) sebesar **101,60%** masuk dalam kategori **Memenuhi Ekspektasi**.

#### Perbandingan Realisasi 2022 dengan Tahun sebelumnya

Tabel 3.41 Perbandingan realisasi Tingkat efektifitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

2020			2021			2022		
Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
71	93,33	120,00%	92,34	91,09	98,64%	94,19	95,7	101,60%

Berdasarkan data tersebut terdapat capaian Tingkat efektifitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mengalami kenaikan pada tahun 2022.

## Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah / Akhir Tahun

### Renstra

Table 44 realisasi Tingkat efektifitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Tingkat efektifitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	98	95.7	97,65%	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi Tingkat efektifitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2022 belum sepenuhnya mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria capaian belum memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

### Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Satker yang setara di BPOM

Grafik 13 Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat efektifitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan dengan Satuan Kerja Lain



Bila dibandingkan dengan kinerja satuan kerja lainnya, maka capaian ini lebih tinggi daripada capaian kinerja Deputi I dan Deputi III.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):

#### Keberhasilan capaian kinerja ini disebabkan :

Meskipun sudah mencapai target namun dalam pelaksanaannya masih ada kendala seperti

masih terbatas di daerah tertentu dalam melakukan KIE, Keterbatasan anggaran serta Kurangnya peran serta lintas sektor dalam melakukan pengawasan OT, SK dan kosmetik.

**Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan:**

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melalui berbagai media
- 2) Membentuk jejaring Badan POM/ komunitas khusus untuk menjadi agen Badan POM dalam menyebarkan informasi terkait Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik terutama di daerah-daerah pelosok
- 3) Melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada komunitas-komunitas tertentu
- 4) Memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan KIE sehingga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di seluruh nusantara.

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja:**

- 1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi terkait keamanan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik baik melalui webinar, leaflet maupun media sosial.
- 2) Kampanye Cerdas Memilih Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan pada Generasi Milenial
- 3) Pemberdayaan Masyarakat Tentang Pemilihan Dan Penggunaan Kosmetika Yang Baik
- 4) Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam rangka Pengawasan Kosmetika Beredar
- 5) Pembentukan duta, penyuluh serta kader jamu, suplemen kesehatan dan kosmetik aman

**SP 6**

***Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik***

Sasaran program ini ditetapkan untuk mengetahui kinerja Deputy II dalam melakukan pendampingan kepada pelaku usaha yang melakukan pengembangan obat tradisional dan kosmetik, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

Pada tahun 2022 Deputy II BPOM telah berhasil meningkatkan regulatory assistance dalam pengembangan obat tradisional dan kosmetik, dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 110,30% masuk dalam kategori Memenuhi Ekspektasi atau dengan kesimpulan pelaksanaan kegiatan telah Efektif.

Keberhasilan ini diukur dengan menggunakan 3 IKSP yaitu (1) Persentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar; dan (2) Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap; dan 3) Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB.

## IKSP 15 – Persentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar dilingkup registrasi obat tradisional

Pengukuran menggunakan indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Deputy II BPOM dalam mengawal dan mendukung inovasi obat bahan alam dari pelaksanaan riset sampai dengan hilirasi pemanfaatannya. Pendampingan dilakukan melalui pemberian bimbingan teknis/pelatihan, workshop, pemberian layanan konsultasi, dan vitasi, serta asistensi ke site penelitian dengan tujuan meningkatkan kapasitas lembaga penelitian dan kualitas hasil penelitian.

### Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Table 45 Realisasi Persentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar dilingkup registrasi obat tradisional

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	%CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar dilingkup registrasi obat tradisional	85	85,72	100,85%	Memenuhi Ekspektasi

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2022 diperoleh nilai Persentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar dilingkup registrasi obat tradisional sebesar 85.72. Capaian kinerja tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 85,00, dengan Nilai Pencapaian Indikator (NPI) sebesar **100,85%** masuk dalam kategori **Memenuhi Ekspektasi**.

### Perbandingan Realisasi 2022 dengan Tahun sebelumnya

Table 46 Perbandingan realisasi Persentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar dilingkup registrasi obat tradisional dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

2020			2021			2022		
Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
80	77,11	96,38	82	82.92	101,12	85	85,72	100,85

Berdasarkan data tersebut terdapat capaian indikator Persentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar dilingkup registrasi obat tradisional mengalami kenaikan setiap tahun.

## Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah / Akhir Tahun

### Renstra

Table 47 Tabel realisasi Persentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar dilingkup registrasi obat tradisional tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar dilingkup registrasi obat tradisional	90	85,72	95,24%	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi Persentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar dilingkup registrasi obat tradisional tahun 2022 belum sepenuhnya mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria capaian belum memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai

**Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):**

#### **Keberhasilan capaian kinerja ini disebabkan :**

Meskipun dalam pelaksanaannya sudah memenuhi ekspektasi namun masih terdapat kendala dalam pencapaian target Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Didampingi sesuai standar di lingkup Registrasi Obat Tradisional yaitu beragamnya pengetahuan beragamnya pengetahuan dan tingkat pemahaman pelaku usaha/peneliti/stakeholder terkait uji praklinik/klinik obat bahan alam.

#### **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan:**

- 1) Intensifikasi pendampingan penyusunan protokol uji praklinik maupun klinik kepada pelaku usaha/peneliti, termasuk akademisi baik secara online maupun kunjungan dan diskusi ke sentra sentra penelitian.
- 2) Melakukan sosialisasi tata cara dan persyaratan pengajuan PPUPK dan PPUK dalam rangka hilirisasi penelitian
- 3) Melakukan kegiatan coaching clinic secara rutin terkait Uji Praklinik/Klinik untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha/peneliti/stakeholder.
- 4) Intensifikasi desk konsultasi untuk akselerasi penerbitan hasil keputusan BPOM PPUK atau PPUPK.
- 5) Bimbingan teknis CUKB.
- 6) Pemanfaatan teknologi untuk pengajuan PPUK dan PPUPK melalui aplikasi SIAP-UK.
- 7) Koordinasi lintas sektor dengan LPDP, BRIN dan Kemendikbudristek untuk pendanaan

penelitian obat bahan alam

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja:

- 1) Pendampingan Penyusunan Protokol Uji Praklinik dan Uji Klinik Obat Bahan Alam
- 2) Pendampingan Pada Pelaku Usaha dan peneliti Dalam Pelaksanaan Uji Praklinik dan Uji Klinik
- 3) Inspeksi Cara Uji Klinik yang Baik (CUKB) dalam Pelaksanaan Uji Klinik Obat Bahan Alam
- 4) Pendampingan Intensif Penyusunan Protokol Uji Praklinik/Klinik dalam Rangka Percepatan Penanganan Wabah COVID-19
- 5) Penilaian Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik (PPUPK) dan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) Obat Bahan Alam
- 6) Evaluasi Data Uji Praklinik dan Uji Klinik Obat Bahan Alam
- 7) In House Training Uji Praklinik dan Uji Klinik
- 8) Bimbingan Teknis Cara Uji Klinik yang Baik (CUKB) kepada Pelaku Usaha
- 9) Pembahasan Pembentukan Tim Sekretariat Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi Pengembangan Fitofarmaka dalam rangka memberikan dukungan teknis dan administratif
- 10) Webinar dan workshop uji praklinik dan uji klinik obat bahan alam.

#### IKSP 16 – Persentase UMKM obat tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap

Pendampingan dan pembinaan kepada UMKM obat tradisional untuk memperoleh sertifikat CPOTB bertahap dilakukan oleh Deputy II BPOM guna menjamin obat tradisional yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan.

#### Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Table 48 Realisasi Persentase UMKM obat tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	%CAPAIAN	KRITERIA
Persentase UMKM obat tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap	90	95,89	106,54	Memenuhi Ekspektasi

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2022 diperoleh nilai Persentase UMKM obat tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap sebesar 95.89. Capaian kinerja tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 90, dengan Nilai Pencapaian Indikator (NPI) sebesar **106,54%** masuk dalam kategori **Memenuhi Ekspektasi**.

### Perbandingan Realisasi 2022 dengan Tahun sebelumnya

Table 49 Perbandingan realisasi Persentase UMKM obat tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

2020			2021			2022		
Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
-	-	-	80	86,7	108,37	90	95,89	106,54

Berdasarkan data tersebut terdapat capaian indikator Persentase UMKM obat tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap mengalami kenaikan setiap tahun.

### Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah / Akhir Tahun Renstra

Table 50 Tabel realisasi Persentase UMKM obat tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase UMKM obat tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap	96,7	95,89	99,16%	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi Persentase UMKM obat tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap tahun 2022 belum sepenuhnya mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria capaian belum memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

### Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):

#### Keberhasilan capaian kinerja ini disebabkan :

Deputi II telah berhasil melaksanakan kinerja sesuai dengan target namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala sebagaiberikut:

- 1) Adanya pengurangan target terkait refocusing anggaran
- 2) UMKM OT kesulitan dalam memenuhi PJT
- 3) Masih banyak UMKM yang belum memahami tentang pengurusan NIB melalui system Online Single Submission (OSS) dan pengurusan sertifikasi CPOTB bertahap melalui

aplikasi e-sertifikasi

- 4) UMKM OT belum memahami ketentuan denah / layout sarana
- 5) UMKM yang telah didampingi tidak melanjutkan proses perizinan karena kendala permodalan dimasa pandemi dan kurangnya komitmen pelaku usaha

**Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan:**

- 1) Memberikan bimbingan teknis kepada UMKM obat tradisional terkait terkait OSS, CPOTB Bertahap, denah bangunan, dan melakukan desk konsultasi serta desk on site secara Bertahap
- 2) Melakukan pendampingan secara on line dan off line dengan melibatkan UPT dan Lintas Sektor kepada UMKM obat tradisional yang mengajukan permohonan sertifikat CPOTB
- 3) Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan unit terkait penyelesaian kendala yang dialami UMKM obat tradisional
- 4) Perluasan fungsi pendampingan oleh UPT Badan POM dengan pembentukan Fasilitator Pemberdayaan UMKM OT di UPT.
- 5) Melakukan asistensi pendampingan bagi Fasilitator Pemberdayaan UMKM OT di UPT

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja:**

- 1) Bimtek Sertifikasi CPOTB bertahap dan Workshop Denah Bangunan bagi petugas Balai
- 2) Bimbingan Teknis bagi Pelaku Usaha UMKM di bidang Obat Tradisional
- 3) Pembekalan bagi industri di Bidang OT dalam rangka percepatan penerapan sertifikasi CPOTB/CPOTB Bertahap
- 4) Desk Capa sertifikasi/inspeksi CPOTB dalam rangka percepatan penyelesaian CAPA
- 5) Memberikan pendampingan langsung kepada pelaku usaha dalam pemenuhan peraturan seperti desk konsultasi dalam rangka penyelesaian temuan inspeksi.
- 6) Sosialisasi sistem E-Sertifikasi dalam rangka pengurusan sertifikat CPOTB kepada pelaku usaha
- 7) Supervisi dan konsultasi pelayanan publik secara online bagi petugas UPT BPOM dalam melaksanakan pelayanan publik
- 8) Simplifikasi prosedur yaitu penghapusan persyaratan denah bangunan UMKM OT asalkan mengikuti ketentuan CPOTB
- 9) Pemberian conditional approval sertifikasi CPOTB dan simplifikasi pemberian persetujuan penggunaan fasilitas bersama obat tradisional untuk memproduksi handgel
- 10) Pendampingan terhadap 1626 UMKM Obat Tradisional dan 3974 start up obat tradisional.
- 11) Intervensi terhadap 30 UMKM Obat Tradisional dalam program orang tua angkat, dari segi pemenuhan CPOTB, registrasi produk, pemilihan bahan baku, digital marketing, teknologi produksi, laboratorium sederhana hingga tips menembus pasar ekspor.
- 12) Bimbingan Teknis bagi Pelaku Usaha UMKM di bidang Obat Tradisional dan desk

konsultasi yang mencakup perizinan, ketentuan denah bagi UMKM dan Pemenuhan Aspek CPOTB Secara Bertahap.

- 13) Pendampingan UMKM secara on site khususnya dalam implementasi aspek CPOTB Bertahap.

### IKSP 17 – Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB bertahap

Pendampingan dan pembinaan kepada UMKM kosmetik untuk memperoleh sertifikat CPKB dilakukan oleh Deputy II BPOM guna menjamin produk kosmetik yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan

#### Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Table 51 Realisasi Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB bertahap

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	%CAPAIAN	KRITERIA
Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB bertahap	87	107,45	123,51	Tidak dapat disimpulkan

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2022 diperoleh nilai Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB bertahap sebesar 107.45. Capaian kinerja tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 87,00, dengan Nilai Pencapaian Indikator (NPI) sebesar **123,51%** masuk dalam kategori **Tidak dapat disimpulkan**.

#### Perbandingan Realisasi 2022 dengan Tahun sebelumnya

Table 52 Perbandingan realisasi Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB bertahap dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

2020			2021			2022		
Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
-	-	-	86	86	100	87	107.45	123.51

Berdasarkan data tersebut terdapat capaian Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB bertahap mengalami kenaikan setiap tahun.

## Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah / Akhir Tahun

### Renstra

Table 53 realisasi Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB bertahap tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB bertahap	89	107.45	120,73	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB bertahap tahun 2022 telah mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria capaian tidak dapat disimpulkan.

### Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):

- 1) Pendampingan UMKM dengan berbagai strategi seperti memberikan bimbingan teknis, pendampingan langsung ke sarana produksi, desk konsultasi secara offline/online
- 2) Memberikan bimbingan teknis/webinar kepada Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) terkait pengetahuan tentang kosmetik terutama tahapan perizinan kosmetik dengan harapan mengurangi kesulitan UMKM memperoleh penanggungjawab teknis berupa TTK yang memiliki kompetensi dibidang kosmetik
- 3) Bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga dalam upaya percepatan perizinan kosmetik

### Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja:

- 1) Bimbingan Teknis dalam Rangka Sertifikasi CPKB UMKM Kosmetik
- 2) Desk CAPA Sertifikasi CPKB
- 3) Penilaian Penerapan CPKB pada Industri Kosmetik dalam rangka Sertifikasi
- 4) Memberikan pendampingan langsung kepada pelaku usaha dalam pemenuhan peraturan seperti desk konsultasi dalam rangka penyelesaian temuan inspeksi.
- 5) pemberian conditional approval sertifikasi CPKB, percepatan dan simplifikasi pemberian persetujuan penggunaan fasilitas produksi kosmetik bersama dengan PKRT, kemudahan persyaratan persetujuan fasber penggunaan industri kosmetika untuk produksi hand sanitizer,
- 6) Percepatan pelayanan sertifikasi CPKB dengan meningkatkan keterlibatan Balai

- 7) Supervisi dan konsultasi pelayanan publik secara online
- 8) Penyelenggaraan webinar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) Series: Build Quality in Your Process,
- 9) Sosialisasi penggunaan aplikasi e-sertifikasi.pom.go.id dalam proses sertifikasi CPKB bagi pelaku usaha.

**SP 7**

***Terwujudnya tatakelola pemerintahan Deputy Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang optimal***

Sasaran program ini ditetapkan untuk mengetahui kinerja Deputy II dalam melakukan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Pada tahun 2022 Deputy II BPOM telah berhasil meningkatkan tata kelola pemerintahan yang optimal, dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 101,12% atau termasuk dalam kategori Memenuhi Ekspektasi.

Keberhasilan ini diukur dengan menggunakan 2 IKSP yaitu: 1) Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dan 2) Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

### **IKSP 18 – Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**

Pengukuran menggunakan indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Deputy II BPOM dalam menerapkan reformasi birokrasi di dalam organisasinya. Pengukuran dilakukan oleh Inspektorat Utama terhadap 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi.

#### **Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

*Table 54 Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik*

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	%CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85	91.58	107.74	Memenuhi Ekspektasi

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2022 diperoleh nilai Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebesar 91.58. Capaian kinerja tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 86,00, dengan Nilai Pencapaian Indikator (NPI) sebesar **107.74%** masuk dalam kategori **Memenuhi Ekspektasi**.

### Perbandingan Realisasi 2022 dengan Tahun sebelumnya

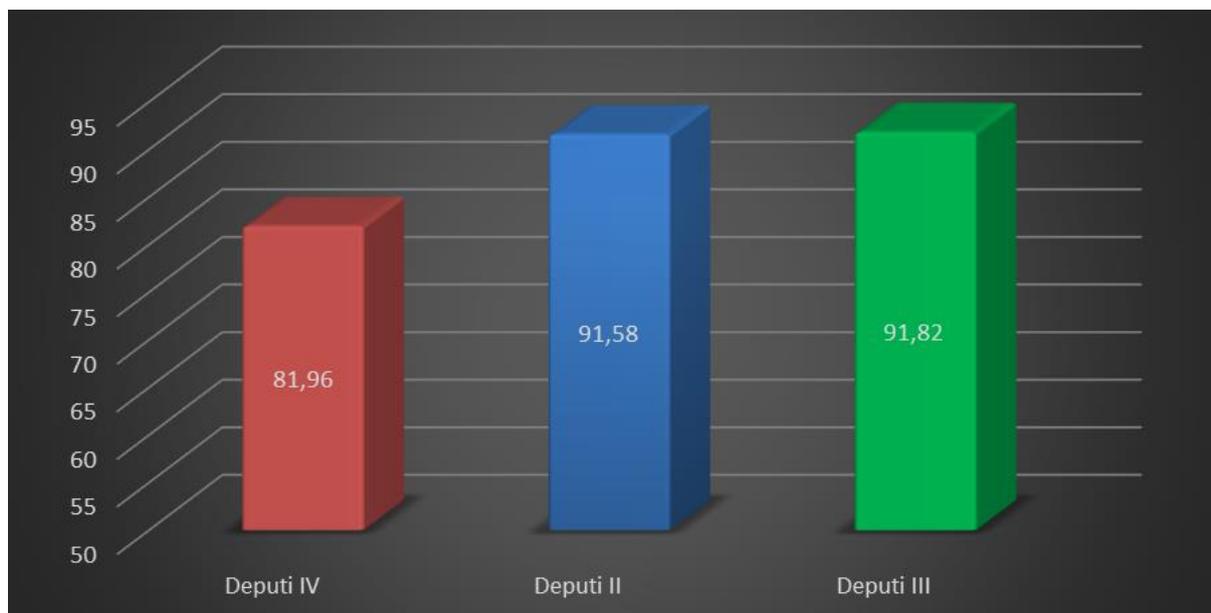
Table 55 Perbandingan realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

2020			2021			2022		
Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
85	82,21	96,72	82,90	83,03	100,16	85	91,58	107,74

Berdasarkan data tersebut terdapat capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mengalami kenaikan setiap tahun.

### Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Satker yang setara di BPOM

Grafik 14 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):

**Keberhasilan capaian kinerja ini disebabkan :**

Meskipun pada tahun 2022 target telah tercapai tetapi masih terdapat beberapa kendala yaitu:

- 1) Belum ada progress capaian atas target prioritas di masing-masing area perubahan.
- 2) Belum dilakukan perencanaan dan penetapan sasaran/target manfaat/dampak dari inovasi yang akan diimplementasikan.
- 3) Reviu dan perbaikan atas standar pelayanan telah dilakukan namun belum mendokumentasikan seluruh masukan dari stakeholder serta hasil SKM dan pengaduan masyarakat.

**Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan:**

- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap masing-masing dari 8 area perubahan.
- 2) Merencanakan dan menetapkan target manfaat dan dampak dari setiap inovasi yang akan diimplementasikan.
- 3) Melakukan reviu standar pelayanan dengan mempertimbangkan masukan dari stakeholder, hasil SKM, dan pengaduan masyarakat.
- 4) Melaksanakan perbaikan secara berkelanjutan dan meningkatkan kualitas dalam pembangunan ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta pelayanan publik yang prima.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja:

- 1) Pembentukan tim Reformasi Birokrasi yang terdiri dari 8 kordinator manajemen perubahan, dimana setiap tim bertanggung jawab untuk mengelola manajemen perubahannya masing-masing.
- 2) Melakukan internalisasi mengenai reformasi birokrasi kepada seluruh pegawai di Deputy II BPOM.
- 3) Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik dalam seluruh aktivitas pemerintahan yang dijalankan.
- 4) Melakukan pengelolaan arsip.
- 5) Melakukan perkuatan dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), ZI, dan WBK.

## IKSP 19 – Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya di lingkungan Deputy II diukur menggunakan Nilai AKIP oleh Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi Internal

### Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Table 56 Realisasi Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	%CAPAIAN	KRITERIA
Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	80,80	76,36	94,50	Belum Memenuhi Ekspektasi

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2022 diperoleh nilai Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebesar 76.36. Capaian kinerja tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 80.80, dengan Nilai Pencapaian Indikator (NPI) sebesar **94.50%** masuk dalam kategori **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

### Perbandingan Realisasi 2022 dengan Tahun sebelumnya

Table 57 Perbandingan realisasi Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

2020			2021			2022		
Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
81	77.79	96.04	79.30	79.69	100.49	80.80	76.36	94.50

Berdasarkan data tersebut terdapat capaian Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mengalami penurunan pada tahun 2022.

### Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah / Akhir Tahun Renstra

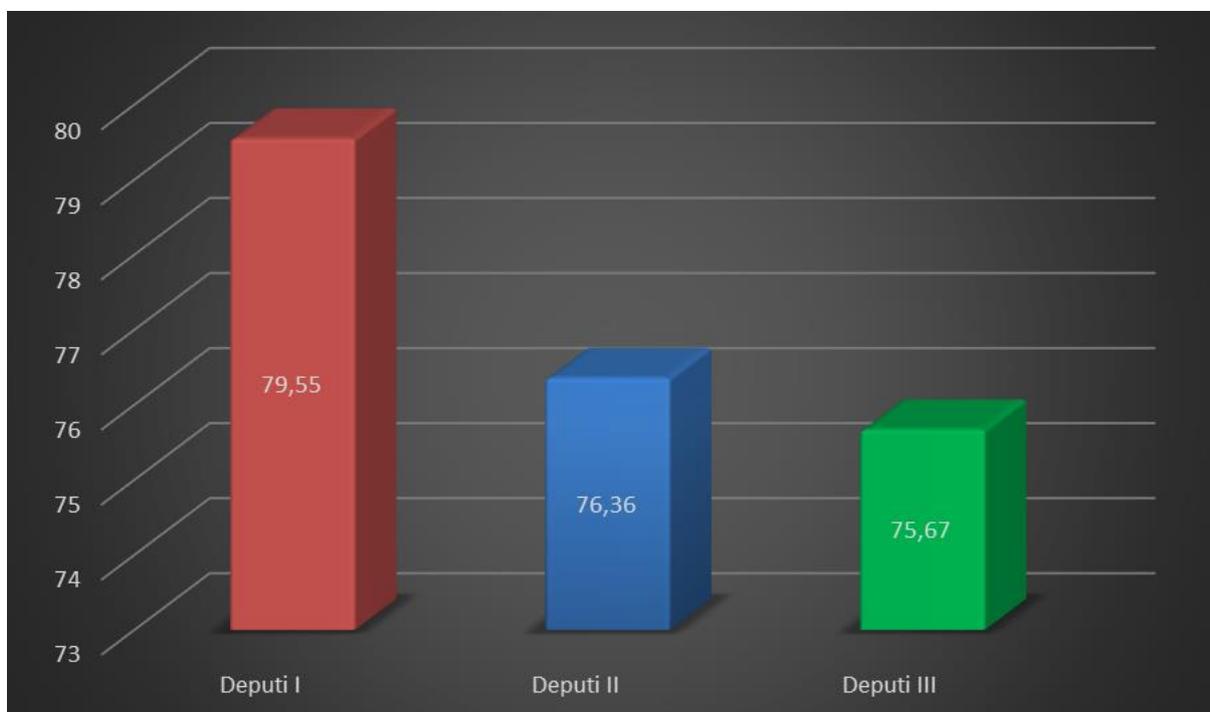
Table 58 realisasi Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	83,8	76.36	91,12	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2022 belum sepenuhnya mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria capaian belum memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

### Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Satker yang setara di BPOM

Grafik 15 Perbandingan Capaian Kinerja Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan Satuan Kerja Lain



Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):

**Kegagalan capaian kinerja ini disebabkan :**

- 1) belum disusun kertas kerja penetapan target dan target yang disusun belum berdasarkan basis data yang memadai maupun perhitungan data/justifikasi. RAPK belum mencantumkan subkegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja dikarenakan belum dilakukan pengisian data pada aplikasi simetris.
- 2) Laporan Kinerja Interim telah disusun namun tidak tepat waktu. Data capaian kinerja/sumber data belum dapat tertelusur dengan baik.
- 3) Pelaporan pada aplikasi SIMETRIS belum dilakukan dengan tertib, rencana aksi dan tindak lanjut belum diisi. Pada laporan kinerja belum terdapat penjelasan mengenai upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya. Laporan Kinerja belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra), belum menyajikan informasi upaya yang dilakukan dalam keberhasilan pencapaian target indikator.
- 4) Laporan Evaluasi Internal belum menyajikan data tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi pada periode sebelumnya. Rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi kinerja internal belum seluruhnya ditindaklanjuti dan tidak dilakukan monitoring pada periode selanjutnya.

**Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan berdasarkan hasil rekomendasi dari penilaian SAKIP oleh Inspektorat:**

- 1) Menetapkan target kinerja dengan baik, berdasarkan basis data yg memadai (data tahun sebelumnya, data nasional, database populasi, analisis sumber daya, maupun data lainnya yang relevan) serta telah berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target serta dokumentasi hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan.
- 2) Melakukan pengisian data RAPK pada aplikasi simetris secara tepat waktu untuk mengoptimalkan perencanaan kinerja
- 3) Menyusun SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria terkait jelas waktu delivery-nya dan terdapat mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data.
- 4) Menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja dengan menambahkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra), menyajikan informasi terkait upaya yang telah dilakukan dalam keberhasilan pencapaian target indikator.
- 5) Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil dan

mendokumentasikan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi periode sebelumnya serta memanfaatkan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/kegiatan

- 6) Memanfaatkan data capaian kinerja periode sebelumnya sebagai salah satu pertimbangan dalam perencanaan target pada periode selanjutnya

#### Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja:

- 1) Membentuk Tim RB di lingkup kedeputian II khususnya Kelompok Kerja 6 - Bidang Penguatan Akuntabilitas.
- 2) Meningkatkan kapasitas SDM terkait SAKIP melalui keikutsertaan dalam agenda Bimtek SAKIP yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan.
- 3) Melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi SAKIP.

### SP 8

#### *Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal*

Sumber Daya Manusia adalah faktor penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Oleh karena itu, sasaran program ini ditetapkan untuk mengetahui kinerja SDM di lingkup Kedeputian II.

Pada tahun 2022 Deputy II BPOM telah berhasil mewujudkan SDM yang berkinerja optimal dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 101,07% atau masuk dalam kriteria Memenuhi Ekspektasi. Capaian tersebut lebih tinggi 0,5% dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 100,51%.

Keberhasilan ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

#### **IKSP 20 - Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**

Pengukuran menggunakan indikator ini ditujukan untuk mengetahui gambaran kualitas ASN yang dimiliki Deputy II BPOM berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran

statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu: a. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai b. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan c. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS d. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

### Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Table 59 Realisasi Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	%CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	84.85	85.76	101.07	Memenuhi Ekspektasi

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2022 diperoleh nilai Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebesar 85.76. Capaian kinerja tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 8.85, dengan Nilai Pencapaian Indikator (NPI) sebesar **101,07%** masuk dalam kategori **Memenuhi Ekspektasi**.

### Perbandingan Realisasi 2022 dengan Tahun sebelumnya

Table 60 Perbandingan realisasi Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

2020			2021			2022		
Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
75	85,11	113,48	84,20	84,63	100,51	84,85	85,76	101,07

Berdasarkan data tersebut terdapat capaian indikator Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mengalami kenaikan setiap tahun.

### Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah / Akhir Tahun

#### Renstra

Table 61 realisasi Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	86.15	85.76	99.54	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi Indeks Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2022 belum sepenuhnya mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria capaian belum memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai

### Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Satker yang setara di BPOM

Grafik 16 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan Satuan Kerja Lain



Bila dibandingkan dengan kinerja satuan kerja lainnya, maka capaian ini lebih tinggi daripada capaian kinerja Deputy III, namun lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerja Deputy I.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):

**Keberhasilan capaian kinerja ini disebabkan :**

Meskipun capaian kinerja telah mencapai target namun masih terdapat beberapa kendala sebagai berikut:

- 1) Terdapat pejabat fungsional yang belum mengikuti diklat teknis jabatan dikarenakan instansi yang menyelenggarakan di luar Badan POM.
- 2) Terdapat pegawai yang belum melanjutkan pendidikan ke tingkat Sarjana/Strata I.
- 3) Adanya pegawai yang belum mengikuti diklat teknis dengan minimal jam pelajaran adalah 20 JP.

**Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan:**

- 1) Meningkatkan kualifikasi pendidikan formal pegawai dengan memberikan ijin belajar/tugas belajar kepada pegawai.
- 2) Memberikan penugasan kepada pegawai untuk mengikuti diklat teknis minimal 20 JP dan mengikutsertakan dalam seminar/ workshop/ kursus/ magang/ sejenisnya yang dapat menopang pelaksanaan tugas jabatan.
- 3) Meningkatkan hasil penilaian kinerja pegawai dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.
- 4) Melakukan monitoring data/informasi pegawai yang dikenakan hukuman disiplin dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja:

- 1) Peningkatan kompetensi pegawai melalui kegiatan pelatihan baik yang diadakan secara mandiri maupun berupa keikutsertaan pada program pelatihan yang dilaksanakan oleh unit lain / instansi lain.
- 2) Mendorong pegawai untuk mengikuti pendidikan formal melalui program tugas belajar jenjang pendidikan S1, S2 dan S3 yang diadakan oleh PPSDM.
- 3) Memfasilitasi pegawai yang akan mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi berupa workshop, seminar, kursus, ataupun diklat yang diadakan oleh pihak luar.
- 4) Meningkatkan peran serta aktif pegawai pada kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi, workshop, Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan oleh Deputy II BPOM.

SP 9

**Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**

Sasaran program ini ditetapkan untuk mengetahui kinerja Deputy II dalam melakukan tata kelola data dan informasi terkait pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Keberhasilan sasaran program ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks pengelolaan data dan informasi yang dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.

Pada tahun 2022 Deputy II BPOM telah berhasil mencapai target dari pelaksanaan kegiatan di bidang penguatan pengelolaan data dan informasi dengan Nilai Pencapaian Sasaran nya adalah (NPS) 128,89% atau masuk dalam kriteria Tidak Dapat Disimpulkan

Pencapaian sasaran program ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

**IKSP 21 - Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**

Gambaran tata kelola data dan informasi di lingkup Deputy II BPOM diukur dengan indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi.

**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Table 62 Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	%CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2,25	2,90	128,89	Tidak dapat disimpulkan

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2022 diperoleh nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebesar 2,90. Capaian kinerja tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 2.25, dengan Nilai Pencapaian Indikator (NPI) sebesar **128,89%** masuk dalam kategori **Tidak dapat disimpulkan**.

### Perbandingan Realisasi 2022 dengan Tahun sebelumnya

Table 63 Perbandingan realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

2020			2021			2022		
Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
1,50	0,125	8,33	2,00	1,60	80	2,25	2,90	128,89

Berdasarkan data tersebut terdapat capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mengalami kenaikan setiap tahun.

### Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah / Akhir Tahun Renstra

Table 64 realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3,00	2,90	96,67	Belum memenuhi ekspektasi

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2022 belum sepenuhnya mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria capaian belum memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

## Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Satker yang setara di BPOM

Grafik 17 Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan Satuan Kerja Lain



Bila dibandingkan dengan kinerja satuan kerja lainnya, maka capaian ini lebih tinggi daripada capaian kinerja Deputi I,II,III dan IV.

**Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):**

### **Keberhasilan capaian kinerja ini disebabkan :**

Deputi II telah memanfaatkan dan memaksimalkan penggunaan email bagi seluruh pegawai dan memanfaatkan dashboard BOC serta verifikasi data BOC

### **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan:**

Kedepanya Deputi II akan terus komitmen dalam pemanfaatan pengelolaan data dan informasi.

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja:**

Kegiatan yang telah dilakukan dalam mencapai sasaran program ini yaitu dengan melakukan pengadaan alat pengolah data berupa laptop dan komputer. Pengadaan laptop dilaksanakan dalam rangka mendukung kegiatan Work From Home sehingga pegawai dapat terus bekerja dan memanfaatkan data-data yang tersedia untuk pelaksanaan tugasnya.

SP 10

***Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik***

Sasaran Program ini ditetapkan untuk mengetahui kinerja Deputy II dalam melakukan pengelolaan keuangan secara akuntabel dan tepat sasaran. Pada tahun 2022 Deputy II BPOM telah berhasil pengelolaan keuangan secara akuntabel, dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 103,51% atau dalam kriteria Memenuhi Ekspektasi. Keberhasilan ini diukur dengan menggunakan indikator Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.

**IKSP 22 - Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**

Pengukuran menggunakan indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Deputy II BPOM dalam melakukan pengelolaan anggaran. Pengukuran dilakukan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

*Table 65 Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik*

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	%CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	92,90	96,16	103,51	Memenuhi Ekspektasi

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2022 diperoleh Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebesar 96.16. Capaian kinerja tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 92.90, dengan Nilai Pencapaian Indikator (NPI) sebesar **103,51%** masuk dalam kategori **Memenuhi Ekspektasi**.

### Perbandingan Realisasi 2022 dengan Tahun sebelumnya

Table 66 Perbandingan realisasi Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

2020			2021			2022		
Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
93,45	95,64	102,34	92,30	95,45	103,41	892,90	96,16	103,51

Berdasarkan data tersebut terdapat capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mengalami kenaikan setiap tahun.

### Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah / Akhir Tahun

#### Renstra

Table 67 realisasi Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	95,30	96,16	100,90	Memenuhi ekspektasi

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2022 telah mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria capaian memenuhi ekspektasi meskipun demikian masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

## Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Satker yang setara di BPOM

Grafik 18 Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan Satuan Kerja Lain



Bila dibandingkan dengan kinerja satuan kerja lainnya, maka capaian ini lebih tinggi daripada capaian kinerja Deputi I dan III.

### Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):

#### Keberhasilan capaian kinerja ini disebabkan :

- 1) Melaksanakan revisi halaman III DIPA
- 2) Memaksimalkan realisasi anggaran sesuai dengan RPD

#### Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan:

Dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran Deputi II mengikuti kaidah-kaidah yang mempengaruhi perhitungan IKPA dan smart Kemenkue.

### Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja:

- 1) Melakukan pelaporan kinerja melalui aplikasi SAKTI dan SMART DJA setiap bulan secara tepat waktu.
- 2) Melakukan revisi halaman III DIPA/Rencana Penarikan Dana secara berkala.
- 3) Meningkatkan penyerapan anggaran sehingga memenuhi target penyebaran anggaran

minimal 99% pada akhir tahun.

- 4) Melaksanakan kepatuhan terhadap regulasi dalam hal pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran.

### 3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Table 68 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Percepatan Pelaksanaan Kegiatan yang tertunda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan revisi POK</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan evkin ke deputian</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan public warning</li> </ol>		Triwulan 4
2	Membuat rencana pelaksanaan kegiatan		Membuat POA tahun 2023	Triwulan 1 tahun 2023
3	Peningkatan Capaian Persentase permohonan pelayanan publik untuk SKI,SKE,SAS yang diselesaikan tepat waktu		Intensifikasi koordinasi terkait kebijakan penerbitan SKI antar ke deputian	Triwulan 1 tahun 2023

### 3.3 Realisasi Anggaran

- 1) Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Dalam rangka pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik jumlah anggaran Deputy II DIPA awal sebesar Rp. 50,004,587,000,- (Lima Puluh Milyar Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), dan DIPA terakhir sebanyak Rp.43.854.522.000,- (Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), karena adanya revisi pemotongan untuk anggaran yang diblokir. Dari total anggaran tersebut, pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 43,845,541,410,- (Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Pulh Lima Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah ) atau 99,98%.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode   Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja								Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain		Transfer
1	445161   DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK	PAGU	0	41,698,835,000	2,155,687,000	0	0	0	0	0	0	43,854,522,000
		REALISASI	0.00%	41,689,857,509 (99.98%)	2,155,683,901 (100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	43,845,541,410 (99.98%)
		SISA	0	8,977,491	3,099	0	0	0	0	0	0	8,980,590
GRAND TOTAL		PAGU	0	41,698,835,000	2,155,687,000	0	0	0	0	0	0	43,854,522,000
		REALISASI	(0.00%)	41,689,857,509 (99.98%)	2,155,683,901 (100.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	43,845,541,410 (99.98%)
		SISA	0	8,977,491	3,099	0	0	0	0	0	0	8,980,590

Gambar 3 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022

Pengelolaan anggaran Deputy II senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan Deputy II dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah : Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala; Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan; Percepatan pengadaan barang dan jasa.

2) Realisasi anggaran per Sasaran Strategis/Kegiatan.

Table 69 Realisasi anggaran per sasaran program

Sasaran Program	Anggaran	Realisasi	%
Terwujudnya OT, SK dan Kos yang aman dan bermutu	4.486.535.000	4.485.337.356	100,00%
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	1.696.829.000	1.696.809.101	100,00%
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan OT, SK dan Kos	4.151.335.000	4.151.307.512	100,00%
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan OT, SK dan Kos	3.490.598.000	3.490.590.965	100,00%
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik OT, SK dan Kos	17.091.714.000	17.091.491.739	100,00%
Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	4.507.413.000	4.501.970.071	100,00%
Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama Deputy Bidang Pengawasan OTSKKOS yang optimal	2.373.838.000	2.371.822.923	99,90%
Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos yang berkinerja optimal	1.943.403.000	1.943.392.471	100,00%

Sasaran Program	Anggaran	Realisasi	%
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen	2.420.207.000	2.420.188.600	100,00%
Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan OTSKKOS secara Akuntabel	1.692.650.000	1.692.630.672	100,00%

### 3) Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan kinput yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila  $IE \geq SE$  maka kegiatan dianggap efisien, apabila:  $IE \leq SE$  maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran yang dilaksanakan Deputy II tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Table 70 Tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian Sasaran Strategis

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2022

IKSP	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	IE	SE	TE	Tingkat Efisiensi
Indeks Pengawasan OT, SK dan Kos	100,00%	100,12%	1,0	1	0,00	Efisien
Persentase OTSK dan Kos yang Memenuhi Syarat	99,95%	90,39%	0,9	1	-0,10	Tidak Efisien
Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang OT, SK dan Kos	100,00%	100,92%	1,0	1	0,01	Efisien
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap OT, SK dan Kos	100,00%	102,24%	1,0	1	0,02	Efisien
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan OT, SK dan Kos	100,00%	105,82%	1,1	1	0,06	Efisien
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan OT, SK dan Kos	100,00%	101,28%	1,0	1	0,01	Efisien
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan OTSKKos	100,00%	103,16%	1,0	1	0,03	Efisien
Indeks Kualitas kebijakan pengawasan OT, SK dan Kos	100,00%	89,58%	0,9	1	-0,10	Tidak Efisien
Persentase OTSK dan Kos yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	100,00%	91,40%	0,9	1	-0,09	Tidak Efisien
Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	100,00%	105,68%	1,1	1	0,06	Efisien
Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang OT SK dan Kos	100,00%	102,13%	1,0	1	0,02	Efisien
Tingkat efektifitas KIE dibidang OTSK dan Kos	100,00%	101,60%	1,0	1	0,02	Efisien
Indeks pelayanan publik di bidang OTSKKos	100,00%	104,13%	1,0	1	0,04	Efisien
Presentase pelayanan publik dibidang OTSK dan Kos yang diselesaikan tepat waktu	100,00%	103,79%	1,0	1	0,04	Efisien
Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	100,00%	100,85%	1,0	1	0,01	Efisien
Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	100,00%	106,54%	1,1	1	0,07	Efisien
Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB	99,47%	123,51%	1,2	1	0,24	Efisien
Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	99,90%	106,79%	1,1	1	0,07	Efisien
Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	100,00%	94,50%	0,9	1	-0,05	Tidak Efisien
Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	100,00%	101,07%	1,0	1	0,01	Efisien

IKSP	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	IE	SE	TE	Tingkat Efisiensi
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	100,00%	128,89%	1,3	1	0,29	Efisien
Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	100,00%	103,51%	1,0	1	0,04	Efisien

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy II BPOM pada tahun 2022 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi yang diembannya. Laporan ini menggambarkan capaian kinerja Deputy II BPOM selama tahun 2022, yang diukur dengan menggunakan 3 *perspective*, 10 sasaran program dan 22 indikator kinerja sasaran program.

### Kesimpulan

Nilai Pencapaian Sasaran Program Deputy 2 BPOM pada tahun ini adalah sebesar 103,05 masuk dalam kategori memenuhi ekspektasi. Sebanyak 7 (tujuh) Sasaran Program tercapai dengan kategori memenuhi ekspektasi, dan 2 (dua) program tercapai dengan kategori belum memenuhi ekspektasi dan 1 (satu) Sasaran Program dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Dari sisi Indikator Kinerja, 16 IKSP tercapai dengan kategori memenuhi ekspektasi, 2 IKSP tercapai dengan kategori tidak dapat disimpulkan, dan 4 IKSP tercapai dengan kategori tidak memenuhi ekspektasi,

Dalam hal pengelolaan anggaran, Deputy II BPOM menunjukkan kinerja yang baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 43,845,541,410,- setara dengan 99,98% dari pagu anggaran sebesar Rp. 43.854.522.000,-.

Kinerja Deputy II BPOM yang baik ini perlu terus dipertahankan, dengan memperhatikan catatan pada IKSP yang masih masuk dalam kategori tidak memenuhi ekspektasi, IKSP yang masuk dalam kategori tersebut yaitu yaitu:

1. Persentase OTSK dan Kos yang Memenuhi Syarat, dengan capaian 90,39%;
2. Indeks Kualitas kebijakan pengawasan OT, SK dan Kos, dengan capaian 89,58%
3. Persentase OTSK dan Kos yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan capaian 91,40%
4. Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos, dengan capaian 94,50

### Saran

Dari hasil capaian kinerja Deputy II BPOM pada tahun 2022, maka beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerjanya di masa yang akan datang, antara lain:

1. Indikator Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik belum memenuhi ekspektasi maka kedepannya perlu melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan melalui desk pendampingan kepada pelaku usaha sekaligus mencegah terjadinya temuan yang berulang dan bimbingan teknis kepada

pelaku usaha kosmetik terkait ketentuan penandaan dan iklan kosmetik terutama bagi para start-up di bidang kosmetik.

2. Indikator Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik belum memenuhi ekspektasi maka perlu dilakukan perbaikan kedepannya yaitu melakukan penyusunan regulasi termasuk sosialisasinya dengan juga memperhatikan kaidah-kaidah yang terdapat dalam penilaian IKK dan melakukan penyesuaian target kinerja sesuai dengan kategori penilaian IKK yang terbaru
3. Indikator Persentase OTSK dan Kos yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan belum memenuhi ekspektasi maka perlu dilakukan upaya kedepannya yaitu Ketepatan analisis pemilihan sampel targeted berdasarkan trend hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
4. Indikator Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik belum memenuhi ekspektasi maka perlu dilakukan upaya perbaikan sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DEPUTI II  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si

Jabatan : Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan,  
dan Kosmetik

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Jakarta, 16 Desember 2021

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DEPUTI II

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan OTSK dan Kos di Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan OTSKKos yang optimal	2.25
2	Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan OTSKKos	86
3	Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	Persentase OT, SK dan Kos yang memenuhi syarat	95
4	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang OTSKKos	86
5	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap OTSKKos	78
6	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan OTSKKos	89.3

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan OT,SK dan Kos	75
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputy Bidang Pengawasan OTSKKOS	84.38
9	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kualitas kebijakan pengawasan OTSKKos	89
10	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase OTSKKos yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91.5
11	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase rekomendasi hasil pengawasan OTSKKos yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	78
12	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase lintas sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang OT, SK dan Kos	82
13	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks pelayanan publik di bidang OTSKKos	4.36
14	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Tingkat Efektivitas KIE dibidang OT, SK dan Kos	94.19

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
15	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Presentase pelayanan publik di bidang OT, SK dan Kos yang diselesaikan tepat waktu	90
16	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Deputy Bidang Pengawasan OTSKKos yang optimal	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan OTSKKos	85
17	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Deputy Bidang Pengawasan OTSKKos yang optimal	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan OTSKKos	80.8
18	Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan OTSKKos	84.85
19	Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan OTSKKOS secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan OTSKKOS	92.9
20	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	Persentase inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	85
21	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	Persentase UMKM OT yang mendapat sertifikat CPOTB Bertahap	90
22	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	Persentase UMKM Kosmetik yang Mendapat sertifikat CPKB	87
23	Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan OTSKKOS secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	

Program :  
Pengawasan Obat dan Makanan

Anggaran :  
Rp. 50,004,587,000.00

Pihak Kedua

Jakarta, 16 Desember 2021  
Pihak Pertama



Dr. Penny K. Lukito, MCP



Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si

Lampiran 2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DEPUTI II  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan OTSKKos yang optimal			2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.097.917.000, 00
2.	Indeks Pengawasan OTSKKos												86	2.414.330.300, 00
3.	Persentase OT, SK dan Kos yang memenuhi syarat	0	0	40	50	60	65	70	75	80	85	90	95	2.836.412.500, 00
4.	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang OTSKKos												86	1.654.566.100, 00
5.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap OTSKKos												78	2.437.637.000, 00
6.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan OTSKKos												89.3	2.001.883.700, 00
7.	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan OT,SK dan Kos												75	986.656.500, 00
8.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputy Bidang Pengawasan OTSKKOS												84.38	2.147.731.600, 00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
9.	Indeks kualitas kebijakan pengawasan OTSKKos												89	4.652.857.000,00
10.	Persentase OTSKKos yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	0	0	40	50	60	65	70	75	80	85	90	91.5	5.768.881.500,00
11.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan OTSKKos yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	1.344.795.800,00
12.	Persentase lintas sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang OT, SK dan Kos	0	12	23	23	35	47	47	59	70	70	70	82	203.357.500,00
13.	Indeks pelayanan publik di bidang OTSKKos												4.36	3.203.591.500,00
14.	Tingkat Efektivitas KIE di bidang OT, SK dan Kos	0	15	15	30	30	45	60	75	90	91	92	94.19	5.411.730.000,00
15.	Persentase pelayanan publik di bidang OT, SK dan Kos yang diselesaikan tepat waktu	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	3.809.261.000,00
16.	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan OTSKKos												85	1.500.624.000,00
17.	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan OTSKKos												80.8	34.500.000,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
18.	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan OTSKKos												84.85	3.322.158.000,00
19.	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan OTSKKOS												92.9	1.766.177.000,00
20.	Persentase inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	703.039.000,00
21.	Persentase UMKM OT yang mendapat sertifikat CPOTB Bertahap	0	10	16	20	25	25	30	40	50	60	70	90	1.199.329.000,00
22.	Persentase UMKM Kosmetik yang Mendapat sertifikat CPKB	0	10	16	20	25	25	30	40	50	60	70	87	507.151.000,00
Total													50.004.587.000,00	

Jakarta, 16 Desember 2021

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,  
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik



Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si

Lampiran 3. PEMETAAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG CAPAIAN PETA STRATEGI

Sasaran Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% ase	PIC
<b>SP 1. Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu</b>	<b>4.486.535.000</b>	<b>4.485.337.356</b>	<b>99,97%</b>	
Perluasan Hasil Kegiatan Peningkatan Efektitas dan Efisiensi Pengawasan Obat Tradisional Berbasis Risiko, melalui Mapping Fasilitas Produksi Obat Tradisional	89.901.000	89.899.520	100,00 %	Was OTSK
Optimalisasi Dukungan Ekspor dan Perlindungan Daya Saing Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Nasional Melalui Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor	218.589.000	218.588.070	100,00 %	Was OTSK
Pertemuan Koordinasi Inspektur OT dan SK dalam Rangka Memaksimalkan Kinerja Pengawasan	33.457.000	33.455.782	100,00 %	Was OTSK
Pengembangan Petugas Pengawas OT dan SK melalui partisipasi aktif dalam Pameran/Meeting/ Workshop/ Pelatihan/ Inspeksi/ Forum Nasional/Internasional	49.630.000	49.629.600	100,00 %	Was OTSK
Peningkatan Kualifikasi Inspektur Dalam Menghadapi Trend Isu Pengawasan OT dan SK	218.661.000	218.659.740	100,00 %	Was OTSK
Intensifikasi Pengawasan Iklan dan Penandaan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	200.438.000	200.430.264	100,00 %	Was OTSK
Optimalisasi Hasil Pelaksanaan Sampling OT dan SK melalui Perkuatan Perencanaan, Pengawasan dan Koordinasinya di Tingkat Pusat dan Daerah	129.309.000	129.307.824	100,00 %	Was OTSK
Intensifikasi Pengawasan Promosi Kosmetik di Era Digital	186.964.000	186.941.460	99,99 %	Was Kos
Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Pengawasan Promosi Kosmetik di Era Revolusi Industri 4.0	172.767.000	172.764.468	100,00 %	Was Kos
Intensifikasi Pemeriksaan dan Penelusuran Sarana Produksi, Distribusi dan Importir yang Berdasarkan Hasil Pengawasan Diduga Memproduksi dan Mengedarkan Kosmetika Ilegal dan Tidak Memenuhi Syarat	499.544.000	499.542.862	100,00 %	Was Kos

Sasaran Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% ase	PIC
Intensifikasi Pemeriksaan dan Penelusuran Sarana Produksi, Distribusi dan Importir yang Berdasarkan Hasil Pengawasan Diduga Memproduksi dan Mengedarkan Kosmetika Ilegal dan TMS	168.269.000	168.267.919	100,00 %	Was Kos
Pemeriksaan sarana dalam rangka perizinan dan sertifikasi CPOTB pada sarana produksi OT	223.242.000	223.240.802	100,00 %	Was OTSK
Peningkatan Kapasitas Petugas UPT dalam rangka Layanan Publik Sertifikasi CPOTB Bertahap	283.245.000	283.244.344	100,00 %	Was OTSK
Monitoring dan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	62.349.000	62.347.748	100,00 %	Was OTSK
Peningkatan Kualifikasi Inspektur dalam Rangka Updating Regulasi Terkini Persyaratan Mutu Sarana Produksi OT dan SK	147.605.000	147.604.808	100,00 %	Was OTSK
Monitoring dan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	93.656.000	93.654.704	100,00 %	Was OTSK
Perkuatan Forum Komunikasi Pengawasan Post Market untuk Optimalisasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan OT dan SK Tidak Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu	157.750.000	157.750.000	100,00 %	Was OTSK
Pemeriksaan sarana dalam rangka perizinan dan sertifikasi CPOTB pada sarana produksi OT	65.993.000	65.992.671	100,00 %	Was OTSK
Coaching Clinic Pengawasan Mutu dan Keamanan Kosmetik bagi Petugas	8.260.000	8.259.820	100,00 %	Was Kos
Penguatan Pengawasan Pemasukan Kosmetik Impor Post Border melalui Jejaring Kerjasama Lintas Sektor	386.239.000	386.206.959	99,99 %	Was Kos
Intensifikasi Penelusuran Bahan Berbahaya/ Dilarang dalam Kosmetik	183.802.000	183.784.537	99,99 %	Was Kos
Rapat Koordinasi Pusat dan Balai dalam Manajemen Sampling	212.597.000	212.532.336	99,97 %	Was Kos
Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Regulasi di Bidang Informasi dan Promosi Kosmetik	457.539.000	456.502.918	99,77 %	Was Kos
Forum Komunikasi Pemeriksaan Sarana Kosmetik	23.410.000	23.410.000	100,00 %	Was Kos
Rapat Koordinasi dan Penilaian Dokumen Registrasi OT dan SK bersama lintas sektor dan Tim Ahli dalam rangka Percepatan Izin Edar	8.785.000	8.785.000	100,00 %	Registrasi

Sasaran Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% ase	PIC
Analisis Evaluasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Resiko Tinggi	67.231.000	67.230.200	100,00 %	Registrasi
Penyusunan Pedoman Petunjuk Teknis Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	88.242.000	88.242.000	100,00 %	Registrasi
Risk Analisis Data Produk Kosmetik	9.636.000	9.636.000	100,00 %	Registrasi
Pembahasan Notifikasi Kosmetika dengan Stakeholder	39.425.000	39.425.000	100,00 %	Registrasi
<b>SP 2. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>	<b>1.696.829.000</b>	<b>1.696.809.101</b>	<b>100,00%</b>	
Penguatan Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan UMOT yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus	340.167.000	340.164.399	100,00 %	Was OTSK
Inspeksi Komprehensif dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Berbasis Risiko	338.727.000	338.726.290	100,00 %	Was OTSK
Pengembangan UMKM Obat Tradisional Berbasis Hasil Kemandirian Pelaku Usaha dalam Mematuhi Ketentuan	317.877.000	317.875.289	100,00 %	Was OTSK
Pendampingan UMKM Kosmetik dalam rangka Percepatan Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) secara Bertahap	44.042.000	44.042.000	100,00 %	Was Kos
Workshop Tindak Lanjut mitigasi risiko paradigma baru pengawasan kosmetik	132.486.000	132.485.100	100,00 %	Was Kos
Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat Melalui Intensifikasi Informasi Hasil Pengawasan Keamanan dan Mutu OT dan SK	182.395.000	182.393.749	100,00 %	Was OTSK
Intensifikasi Pengawasan Keamanan dan Mutu Produk OT dan SK melalui Pendekatan Desain Baru Pengawasan	83.546.000	83.544.678	100,00 %	Was OTSK
Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam rangka Pengawasan Kosmetik bersama Mitra BPOM	257.589.000	257.577.596	100,00 %	Was Kos
<b>SP 3. Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>	<b>4.151.335.000</b>	<b>4.151.307.512</b>	<b>100,00%</b>	

Sasaran Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% ase	PIC
Peningkatan Kemampuan Industri di Bidang Obat Tradisional dalam Rangka Persiapan Maturasi Sertifikasi CPOTB	339.903.000	339.901.410	100,00 %	Was OTSK
Fasilitasi UMKM dalam rangka Implementasi Pemenuhan Aspek CPOTB dan Peningkatan Kualitas Bahan Baku Produk Obat Tradisional	809.822.000	809.817.083	100,00 %	Was OTSK
Penilaian Penerapan CPKB pada Industri Kosmetik dalam rangka Sertifikasi	357.996.000	357.995.454	100,00 %	Was Kos
Perluasan Cakupan Monitoring dan Penajaman Tindak Lanjut Monitoring Efek Samping OT dan SK Melalui Peningkatan Peran Tenaga Medis, Pelaku Usaha dan Masyarakat	266.911.000	266.909.199	100,00 %	Was OTSK
Intensifikasi Pengawasan Keamanan Kosmetik	466.192.000	466.183.310	100,00 %	Was Kos
Percepatan Pelayanan Publik melalui Desk CAPA Sertifikasi CPOTB	50.334.000	50.332.000	100,00 %	Was OTSK
KIE di Bidang Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan bersama Tokoh Masyarakat	1.043.644.000	1.043.640.291	100,00 %	Was OTSK
Percepatan Ekspor Jamu melalui Pembentukan Ekosistem Ekspor Jamu	346.909.000	346.906.500	100,00 %	Was OTSK
Percepatan Pelayanan Publik dalam Upaya Peningkatan Daya Saing melalui Peningkatan Pengetahuan Petugas dan Pelaku Usaha	278.960.000	278.959.950	100,00 %	Was Kos
Peningkatan Kualitas Layanan Publik	156.510.000	156.508.315	100,00 %	Registrasi
Survei Kepuasan Pelanggan	34.154.000	34.154.000	100,00 %	Registrasi
<b>SP 4. Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>	<b>3.490.598.000</b>	<b>3.490.590.965</b>	<b>100,00%</b>	
Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat dibidang Obat Tradisional	184.795.000	184.795.000	100,00 %	Standardisasi
Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat dibidang Suplemen Kesehatan	195.800.000	195.800.000	100,00 %	Standardisasi
Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat dibidang Kosmetik	69.405.000	69.405.000	100,00 %	Standardisasi
Review dan Penyusunan Standar di bidang Obat Tradisional	816.794.000	816.793.338	100,00 %	Standardisasi
Review dan Penyusunan Standar di bidang Suplemen Kesehatan	630.017.000	630.016.021	100,00 %	Standardisasi
Review dan Penyusunan Standar dibidang Kosmetik	697.561.000	697.559.981	100,00 %	Standardisasi
Brainstorming / Perencanaan penyusunan standar dibidang OT, SK dan Kos	118.424.000	118.423.400	100,00 %	Standardisasi
Sosialisasi Regulasi di bidang Kosmetik	89.978.000	89.977.300	100,00 %	Standardisasi
Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	72.964.000	72.962.594	100,00 %	Standardisasi

Sasaran Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% ase	PIC
KIE Obat dan Makanan Bersama Tokoh Masyarakat	442.500.000	442.498.831	100,00 %	Standardisasi
Sosialisasi Regulasi di bidang Obat Tradisional	51.684.000	51.684.000	100,00 %	Standardisasi
Sosialisasi Regulasi di bidang Suplemen Kesehatan	120.676.000	120.675.500	100,00 %	Standardisasi
<b>SP 5. Meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>	<b>17.091.714.000</b>	<b>17.091.491.739</b>	<b>100,00%</b>	
Penguatan Upaya Peningkatan Kepatuhan UMKM Memenuhi Ketentuan Iklan Dan Penandaan Secara Konsisten	104.840.000	104.836.080	100,00 %	Was OTSK
Perkuatan Jejaring Dalam Rangka Perluasan Cakupan Dan Perkuatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Iklan Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan Pada Media Online	54.615.000	54.615.000	100,00 %	Was OTSK
Perkuatan Peran Pelaku Usaha dan Masyarakat dalam Pengawasan Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diedarkan Secara Online	629.959.000	629.958.090	100,00 %	Was OTSK
Perluasan Penanganan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Mengandung Bahan Kimia Obat Melalui Perkuatan Sinergitas Lintas Fungsi	433.288.000	433.283.022	100,00 %	Was OTSK
Public Awareness Bahaya Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya / Dilarang dan Penyelenggaraan Public Warning	350.313.000	350.308.271	100,00 %	Was Kos
Intensifikasi Pengawasan Post Market Penandaan Kosmetik	319.354.000	319.313.236	99,99 %	Was Kos
Forum Komunikasi Pengawasan Post Market Penandaan dan Promosi Kosmetik Pusat dan Daerah	101.508.000	101.486.127	99,98 %	Was Kos
Pembentukan Agent of Change dalam Pelaporan Efek Samping Kosmetik	140.097.000	140.083.000	99,99 %	Was Kos
Farmakovigilans bagi Pelaku Usaha	108.080.000	108.080.000	100,00 %	Was Kos
Intensifikasi Peran PIC Balai Dalam Rangka Pemberdayaan UPT BPOM Melalui Program Magang	62.873.000	62.873.000	100,00 %	Registrasi
Intensifikasi Data Permohonan Notifikasi Kosmetika	100.360.000	100.359.100	100,00 %	Registrasi
Bimbingan Teknis Penilaian DIP Bagi Petugas Pusat dan Daerah	12.093.000	12.093.000	100,00 %	Registrasi
Bimbingan Teknis CUKB di bidang OT dan SK kepada peneliti, komisi etik, sponsor, organisasi riset kontrak	99.240.000	99.240.000	100,00 %	Registrasi

Sasaran Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% ase	PIC
Komunikasi Informasi dan Edukasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan Tokoh Masyarakat	1.182.202.000	1.182.200.452	100,00 %	Registrasi
Pendampingan UMKM Jamu Berbasis Kearifan Lokal Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Napak Tilas Jejak Empiris Penggunaan Bahan Alam di Indonesia	67.203.000	67.200.630	100,00 %	Registrasi
Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	207.685.000	207.680.591	100,00 %	Registrasi
Kunjungan Kerja Luar Negeri dalam rangka Peningkatan Kerjasama Internasional	134.241.000	134.240.168	100,00 %	Was OTSK
Forum Komunikasi Perkuatan Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan di Tingkat Pusat dan Daerah	357.698.000	357.695.929	100,00 %	Was OTSK
Dialog Interaktif Prospek Ekspor Kosmetik Tematik/Natural Cosmetics dan Dukungan Pemerintah dalam Ekspor Kosmetik	70.859.000	70.857.720	100,00 %	Was Kos
Pemantapan Kerja Pengawasan Kosmetik serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	162.391.000	162.388.566	100,00 %	Was Kos
Pemantapan Kerja Pengawasan Kosmetik serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor (Sumber Dana PNBK)	94.023.000	93.990.749	99,97 %	Was Kos
Pembentukan dan Pemberdayaan Duta/Kader Kosmetik /Jamu /Suplemen Kesehatan Aman	1.077.716.000	1.077.714.220	100,00 %	PMPU
Sinergisitas Bersama Lintas Sektor dalam rangka Pendampingan UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang OT, SK dan kosmetika	994.394.000	994.390.987	100,00 %	PMPU
Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam rangka Pengawasan Kosmetik bersama Mitra BPOM	847.707.000	847.694.574	100,00 %	Was Kos
KIE Keamanan dan Manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Melalui Strategi Komunikasi Berbasis Digital	777.388.000	777.386.200	100,00 %	PMPU
KIE Pemberdayaan Masyarakat terkait Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1.396.908.000	1.396.905.635	100,00 %	PMPU
Kampanye obat dan makanan aman di media marketplace	3.410.000	3.410.000	100,00 %	PMPU
Pilot Project Kota Lombok Timur sebagai Kota Kosmetik Garam	263.606.000	263.603.539	100,00 %	PMPU

Sasaran Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% ase	PIC
Rumah Sentra Informasi Kosmetik	109.439.000	109.437.000	100,00 %	PMPU
Penyebarluasan dan Pembuatan Kosmetik dari UMKM Kosmetik untuk UMKM Kosmetik	442.445.000	442.443.051	100,00 %	PMPU
Perkuatan Kooordinasi Lintas Sektor dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Publik dan Pengawasan Terhadap Ekspor dan Importasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	200.520.000	200.515.614	100,00 %	Was OTSK
Forum Sosialisasi Regulasi dalam rangka Peningkatan Iklim Usaha OT dan SK yang Kondusif	287.542.000	287.540.971	100,00 %	Was OTSK
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan OT dan SK	112.887.000	112.886.596	100,00 %	Was OTSK
Evaluasi Pelayanan Publik Pengawasan Keamanan dan Mutu Kosmetik	340.539.000	340.534.483	100,00 %	Was Kos
Penanganan Pandemi Covid-19 Direktorat Pengawasan Kosmetik	199.806.000	199.800.515	100,00 %	Was Kos
Honor Pramubakti Direktorat Pengawasan Kosmetik	224.692.000	224.682.501	100,00 %	Was Kos
Workshop Pelayanan Prima	417.072.000	417.071.200	100,00 %	Registrasi
Pelayanan Prima Registrasi OTSK bagi UMKM di Daerah dalam Rangka Percepatan Izin Edar	493.484.000	493.482.749	100,00 %	Registrasi
Pelayanan Prima Notifikasi Kosmetik	293.031.000	293.027.906	100,00 %	Registrasi
Workshop Uji Praklinik/Klinik	44.604.000	44.604.000	100,00 %	Registrasi
Pengembangan Inovasi dan Kreativitas dalam Bidang Kosmetik	162.359.000	162.359.000	100,00 %	PMPU
Evaluasi Kinerja PMPUs	225.115.000	225.115.000	100,00 %	PMPU
Verifikasi Teknis Permohonan Ekspor dan Impor OT dan SK	13.980.000	13.980.000	100,00 %	Was OTSK
Bimbingan teknis pelayanan publik SKI/SKE/SAS OT dan SK	77.439.000	77.439.000	100,00 %	Was OTSK
Percepatan Pelayanan Publik melalui Desk Konsultasi Pelayanan Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetik dan/atau CAPA Sertifikasi CPKB	137.208.000	137.208.000	100,00 %	Was Kos
Penilaian Penerapan CPKB pada Industri Kosmetik dalam rangka Sertifikasi (sumber dana PNBPN)	303.201.000	303.194.568	100,00 %	Was Kos
Verifikasi Teknis Permohonan SKI pada Sarana Importir Produk Jadi dan Bahan Baku Kosmetika	21.178.000	21.172.000	99,97 %	Was Kos

Sasaran Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% ase	PIC
Intensifikasi dan Desk Registrasi Permasalahan Registrasi Produk dan Iklan Dalam Rangka Percepatan Izin Edar Obat Tradisional	656.444.000	656.443.400	100,00 %	Registrasi
Pembahasan Pre Review Rancangan Iklan Obat Tradisional	107.893.000	107.892.400	100,00 %	Registrasi
Intensifikasi dan Desk Registrasi Permasalahan Registrasi Produk dan Iklan Dalam Rangka Percepatan Izin Edar Suplemen Kesehatan	652.281.000	652.279.800	100,00 %	Registrasi
Pembahasan Pre Review Rancangan Iklan SK	88.450.000	88.449.500	100,00 %	Registrasi
Review Hasil Penilaian Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	16.752.000	16.752.000	100,00 %	Registrasi
Pembahasan aspek keamanan dan klaim kosmetika	89.139.000	89.138.700	100,00 %	Registrasi
Forum Komunikasi Tentang Tindak Lanjut Penilaian DIP	104.033.000	104.031.800	100,00 %	Registrasi
Percepatan Notifikasi untuk UMKM Kosmetik	122.056.000	122.055.777	100,00 %	Registrasi
Forum Komunikasi, Advokasi dan bimbingan Teknis Notifikasi Kosmetik	242.648.000	242.647.604	100,00 %	Registrasi
Coaching Clinic Sistem dan Tata Cara Registrasi Produk dan Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	99.965.000	99.963.800	100,00 %	Registrasi
Coaching Clinic Notifikasi Kosmetik	200.984.000	200.982.700	100,00 %	Registrasi
Clustering Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	37.885.000	37.885.000	100,00 %	Registrasi
Clustering Notifikasi Kosmetik	2.340.000	2.340.000	100,00 %	Registrasi
Penilaian DIP	170.849.000	170.847.438	100,00 %	Registrasi
Evaluasi Hasil Penilaian DIP	30.695.000	30.695.000	100,00 %	Registrasi
Coaching clinic DIP online	73.636.000	73.635.500	100,00 %	Registrasi
Pengembangan Tools Penilaian DIP	90.140.000	90.138.100	100,00 %	Registrasi
Penilaian Pelaksanaan Uji Praklinik dan Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan	44.932.000	44.931.180	100,00 %	Registrasi
<b>SP 6. Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik</b>	<b>4.507.413.000</b>	<b>4.501.970.071</b>	<b>99,88%</b>	
Evaluasi Dokumen dan Data Uji Praklinik/Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan	546.868.000	546.867.300	100,00 %	Registrasi
Pembahasan Percepatan Uji Praklinik/Klinik dalam Rangka Percepatan Penanganan Wabah Covid 19	63.894.000	63.894.000	100,00 %	Registrasi

Sasaran Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% ase	PIC
Pertemuan Pembahasan Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka	255.602.000	255.600.500	100,00 %	Registrasi
Pencanangan Destinasi Wisata Jamu	538.103.000	538.098.017	100,00 %	PMPU
Pemberdayaan Orang Tua Angkat Dalam Rangka Peningkatan UMKM Obat Tradisional Berdaya Saing	392.647.000	392.644.593	100,00 %	PMPU
Penguatan dan Perluasan Program Pendampingan UMKM OT melalui Fasilitator	793.548.000	793.543.730	100,00 %	PMPU
Penguatan Dan Perluasan Program Pemberdayaan Jamu Gendong	476.010.000	476.007.873	100,00 %	PMPU
Herbal Indonesia Expo	32.155.000	32.154.550	100,00 %	PMPU
Pengembangan Bahan Obat Tradisional untuk mendukung daya saing UMKM Obat Tradisional	115.783.000	115.781.810	100,00 %	PMPU
Tindak Lanjut Eksplorasi Jamu sebagai Bahan Pengembangan Jamu Nusantara	232.397.000	232.394.816	100,00 %	PMPU
Peningkatan Kompetensi Pelayanan Publik Fasilitator UMKM OT	29.638.000	29.638.000	100,00 %	PMPU
Sinergisme Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Bidang Kosmetik	1.030.768.000	1.025.344.882	99,47 %	PMPU
<b>SP 7. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal</b>	<b>2.373.838.000</b>	<b>2.371.822.923</b>	<b>99,92%</b>	
Pemeliharaan kendaraan operasional Direktorat Pengawasan OT dan SK	5.449.000	5.448.650	99,99 %	Was OTSK
Biaya Penanganan Pandemi Direktorat Pengawasan OT dan SK	113.563.000	113.561.070	100,00 %	Was OTSK
Capacity Building Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	128.800.000	128.800.000	100,00 %	Was OTSK
Pemenuhan Keperluan Perkantoran	270.947.000	270.940.834	100,00 %	Was Kos
Penyusunan dan Internalisasi Kebijakan Kedeputian II	35.067.000	35.067.000	100,00 %	Was Kos
Penataan Arsip Direktorat Pengawasan Kosmetik	32.307.000	32.298.000	99,97 %	Was Kos
Penggalangan komitmen bersama stakeholder dan lintas sektor dalam rangka Direktorat Pengawasan Kosmetik mencapai WBBM	399.136.000	399.136.000	100,00 %	Was Kos

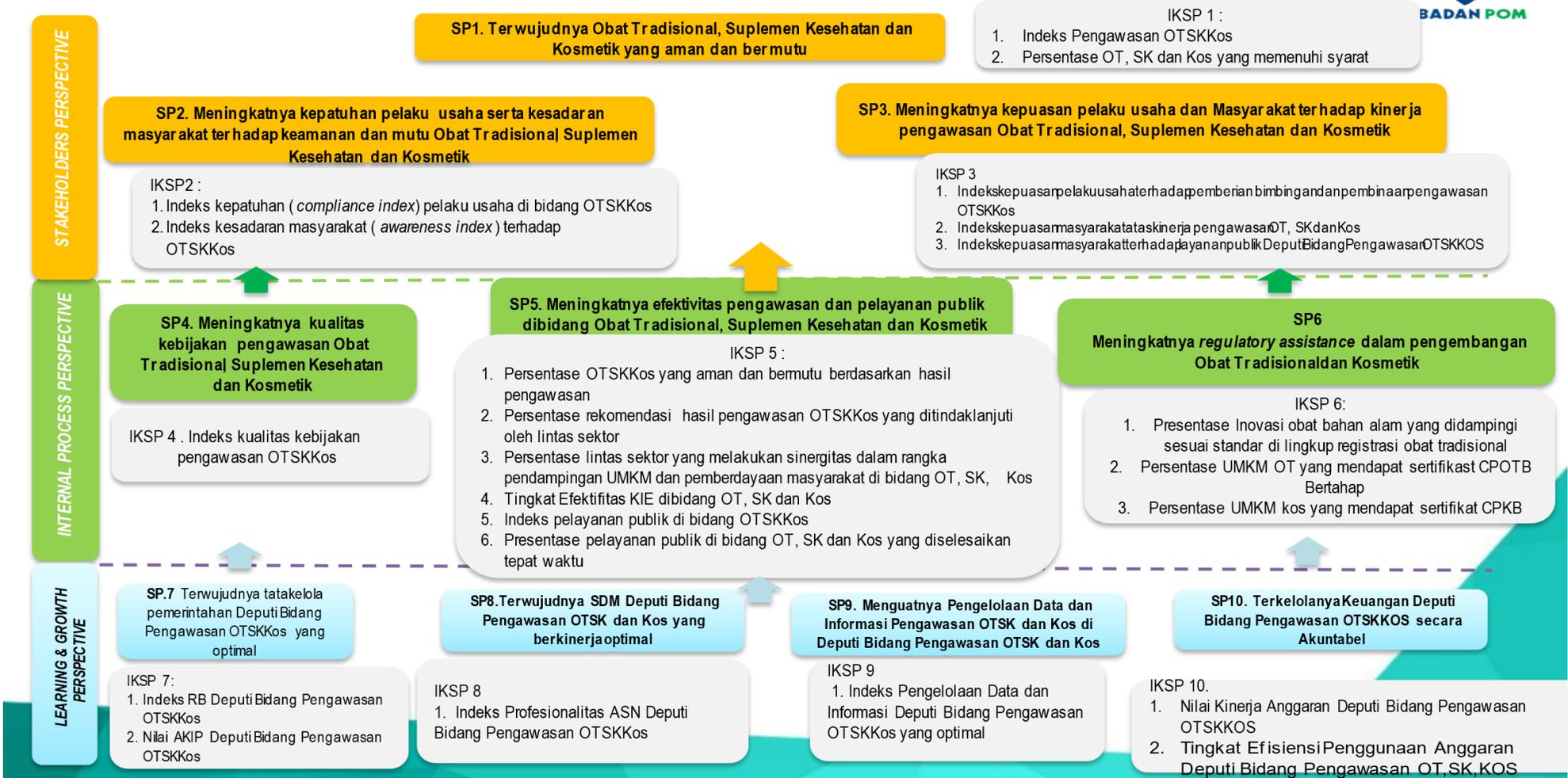
Sasaran Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% ase	PIC
Pemantapan dan Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Pengawasan Kosmetik	8.769.000	8.739.000	99,66 %	Was Kos
Pemantapan Sistem Manajemen Mutu	86.401.000	86.400.700	100,00 %	Registrasi
Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Registrasi OT, SK dan Kos	3.800.000	3.800.000	100,00 %	Registrasi
Penataan dan Pengelolaan BMN	13.379.000	13.379.000	100,00 %	Registrasi
Audit dalam Rangka Resertifikasi QMS System ISO 9001:2015	17.839.000	17.839.000	100,00 %	Registrasi
Capacity Building Kedeputian II	236.665.000	236.665.000	100,00 %	Registrasi
Pembahasan Masalah Aktual	35.664.000	35.664.000	100,00 %	Registrasi
Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran di Masa Pandemic Covid 19	483.862.000	483.843.306	100,00 %	Registrasi
Pemantapan dan Internalisasi Reformasi Birokrasi	40.809.000	40.809.000	100,00 %	Standardisasi
Pengadaan fasilitas Kantor di Kedeputian II BPOM	82.094.000	82.092.451	100,00 %	Standardisasi
Koordinasi Pemberdayaan OT, SK dan Kos serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	110.588.000	108.641.272	98,24 %	PMPU
Operasional pengelolaan kegiatan pada satker kedeputian 2	26.700.000	26.700.000	100,00 %	Was OTSK
Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi di Direktorat Pengawasan OT dan SK	231.999.000	231.998.640	100,00 %	Was OTSK
Penyusunan LAKIP dan LAPTAH	10.000.000	10.000.000	100,00 %	Standardisasi
<b>SP 8. Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal</b>	<b>1.943.403.000</b>	<b>1.943.392.471</b>	<b>100,00%</b>	
Kursus Intensif Bahasa Inggris Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	116.061.000	116.061.000	100,00 %	Was OTSK
Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh Direktorat Pengawasan OT dan SK	147.290.000	147.286.100	100,00 %	Was OTSK
Pengembangan Kompetensi Inspektur Kosmetik	91.039.000	91.038.041	100,00 %	Was Kos
Pembekalan Evaluator OT dan SK Tematik	170.740.000	170.738.750	100,00 %	Registrasi
Pembekalan Evaluator Kosmetik	276.969.000	276.968.700	100,00 %	Registrasi
Honorarium PPNPN	358.683.000	358.682.330	100,00 %	Registrasi
Honorarium Pengelola Keuangan	7.200.000	7.200.000	100,00 %	Registrasi

Sasaran Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% ase	PIC
Pembekalan staff Untuk Peningkatan Kompetensi Staff	720.000	720.000	100,00 %	Registrasi
Pengayaan Uji Praklinik/Klinik	112.133.000	112.131.600	100,00 %	Registrasi
Peningkatan Kompetensi Pegawai	273.400.000	273.399.040	100,00 %	Standardisasi
Pengembangan Kompetensi SDM Di Direktorat PMPU OT, SK, Kos	127.348.000	127.347.110	100,00 %	PMPU
Kompetensi Tersertifikasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional dan Kosmetik	261.820.000	261.819.800	100,00 %	PMPU
<b>SP 9. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>	<b>2.420.207.000</b>	<b>2.420.188.600</b>	<b>100,00%</b>	
Layanan Perkantoran Direktorat Pengawasan OT dan SK	347.835.000	347.824.218	100,00 %	Was OTSK
Pemantapan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Pengawasan Kosmetik	31.377.000	31.376.500	100,00 %	Was Kos
Penatalaksanaan Data Arsip	102.112.000	102.107.800	100,00 %	Registrasi
Pembuatan subsite	68.500.000	68.500.000	100,00 %	Standardisasi
Pengadaan Alat Pengolah Data Deputy II BPOM	1.426.956.000	1.426.955.050	100,00 %	Standardisasi
Evaluasi Program Kerja	148.115.000	148.114.692	100,00 %	PMPU
Pemutakhiran dan Inventarisir Data Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kosmetik	20.904.000	20.903.100	100,00 %	PMPU
Digitalisasi Perizinan Kosmetik	247.268.000	247.267.580	100,00 %	PMPU
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	27.140.000	27.139.660	100,00 %	PMPU
<b>SP 10. Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara Akuntabel</b>	<b>1.692.650.000</b>	<b>1.692.630.672</b>	<b>100,00%</b>	
Honor Pengelola Keuangan Dit Pengawasan OT dan SK dan Satker Deputy II	12.720.000	12.720.000	100,00 %	Was OTSK
Honorarium Pengelola Keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik	3.300.000	3.300.000	100,00 %	Was Kos
Honorarium Pengelola PNBK Direktorat Pengawasan Kosmetik	11.280.000	11.280.000	100,00 %	Was Kos
Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja	7.566.000	7.566.000	100,00 %	Registrasi
Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan	8.501.000	8.501.000	100,00 %	Registrasi
Pemenuhan Keperluan perkantoran	409.374.000	409.359.607	100,00 %	Registrasi
Koordinasi Laporan Penerimaan PNBK	50.478.000	50.478.000	100,00 %	Registrasi
Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja	402.836.000	402.834.443	100,00 %	Standardisasi

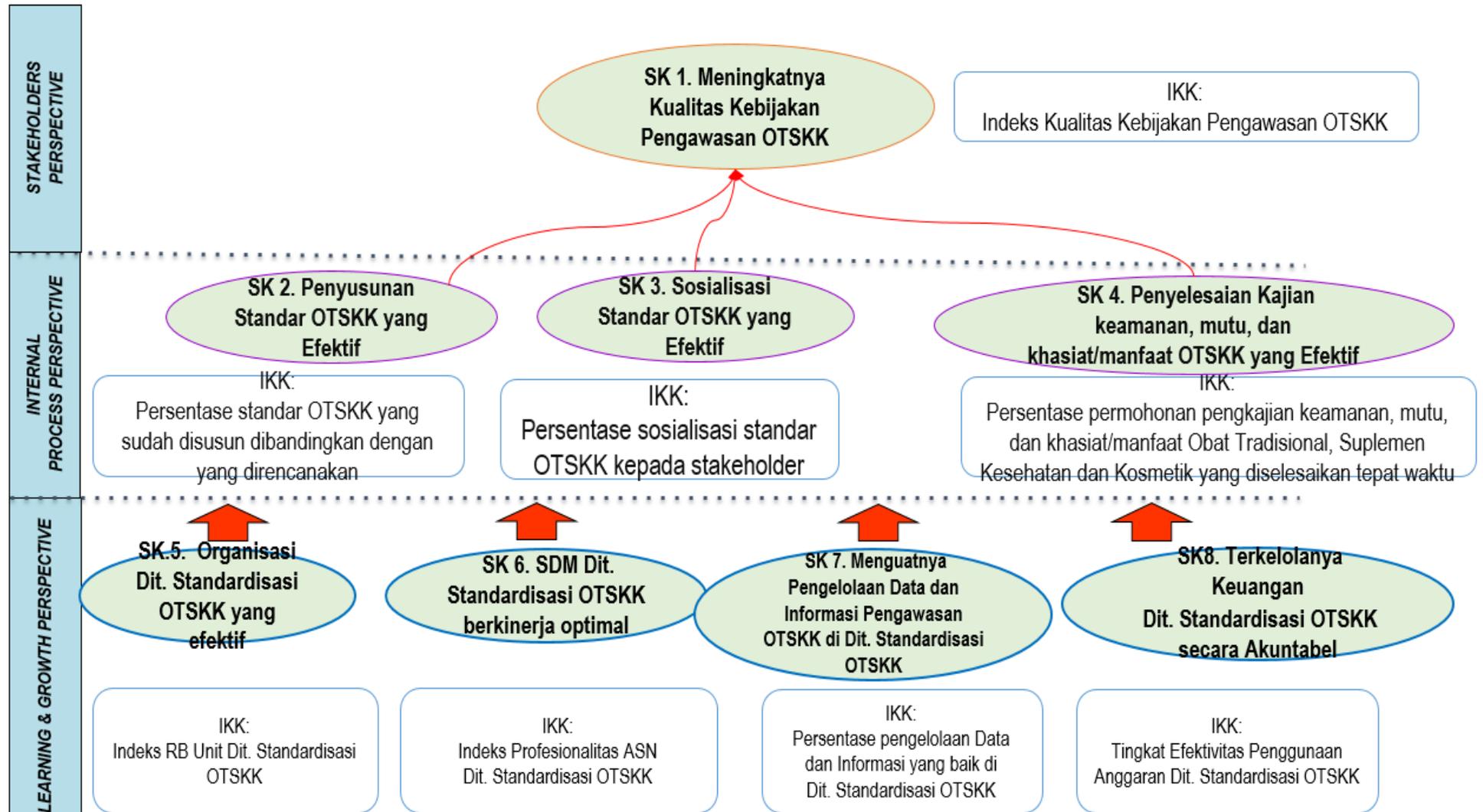
Sasaran Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% ase	PIC
Sewa Rumah Dinas Jabatan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	165.000.000	165.000.000	100,00 %	PMPU
Layanan Perkantoran Direktorat PMPU OT, SK, Kos	348.692.000	348.689.534	100,00 %	PMPU
Pemeliharaan kendaraan operasional Direktorat PMPU OT, SK dan Kos	9.181.000	9.180.800	100,00 %	PMPU
Honor Pramubakti Direktorat PMPU OT, SK, Kos	63.154.000	63.154.000	100,00 %	PMPU
Penanganan Pandemi Covid19 Di Direktorat PMPU OT, SK, Kos	200.568.000	200.567.288	100,00 %	PMPU

Lampiran 4. Capaian Kinerja Unit Eselon II di Lingkungan Kedeputan Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

## PETA STRATEGI BSC LEVEL 1 – (2020 – 2024) DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK



## PETA STRATEGI BSC LEVEL 2 (2020 – 2024) DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK



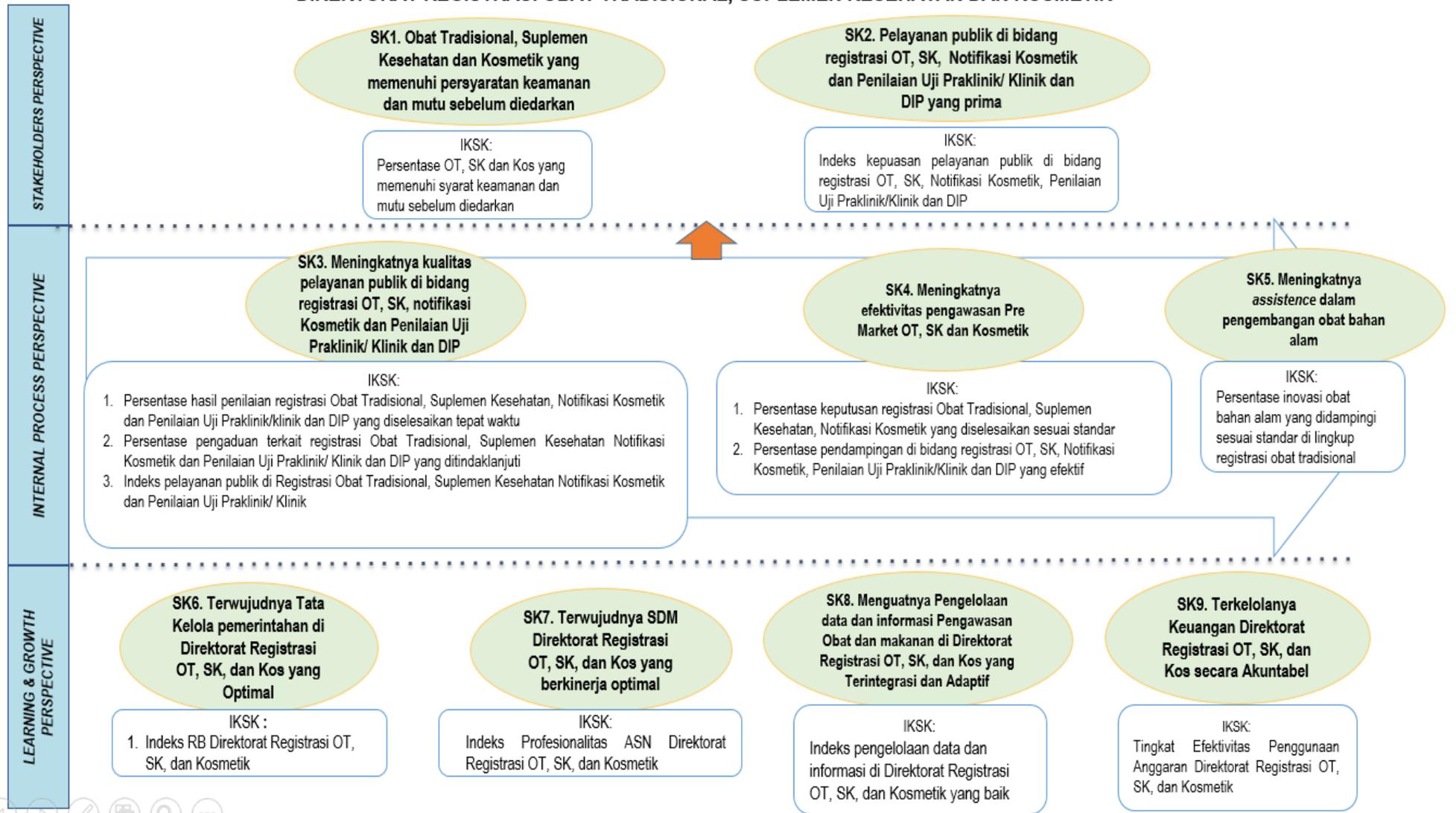
Capaian Kinerja Direktorat Standardisasi Obat Tradisional,  
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik  
Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89	79,73	89,53%
2	Persentase kesesuaian perencanaan penyusunan standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan Roadmap	Indeks kesesuaian standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	-	-
3	Penyusunan standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif	Persentase standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	95,5%	100%	104,7%
4	Sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif	Persentase Sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif kepada stakeholder	91%	117%	128,57%
5	Penyelesaian Kajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat OTSKK yang Efektif	Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	95,25%	99%	103,93%
6	Terwujudnya organisasi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif	Indeks RB Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	86,30	94	108,8%
7	Terwujudnya SDM Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	88	88	100%
8	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi	Indeks pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan OTSKK	2,75	3	109%

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2022*

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
	Pengawasan OTSKK di Dit. Standardisasi OTSKK	yang baik di Dit. Standardisasi OTSKK			
9	Terkelolanya Keuangan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100	100	100%

**PETA STRATEGI BSC LEVEL 2 – (2020 – 2024)**  
**DIREKTORAT REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK**



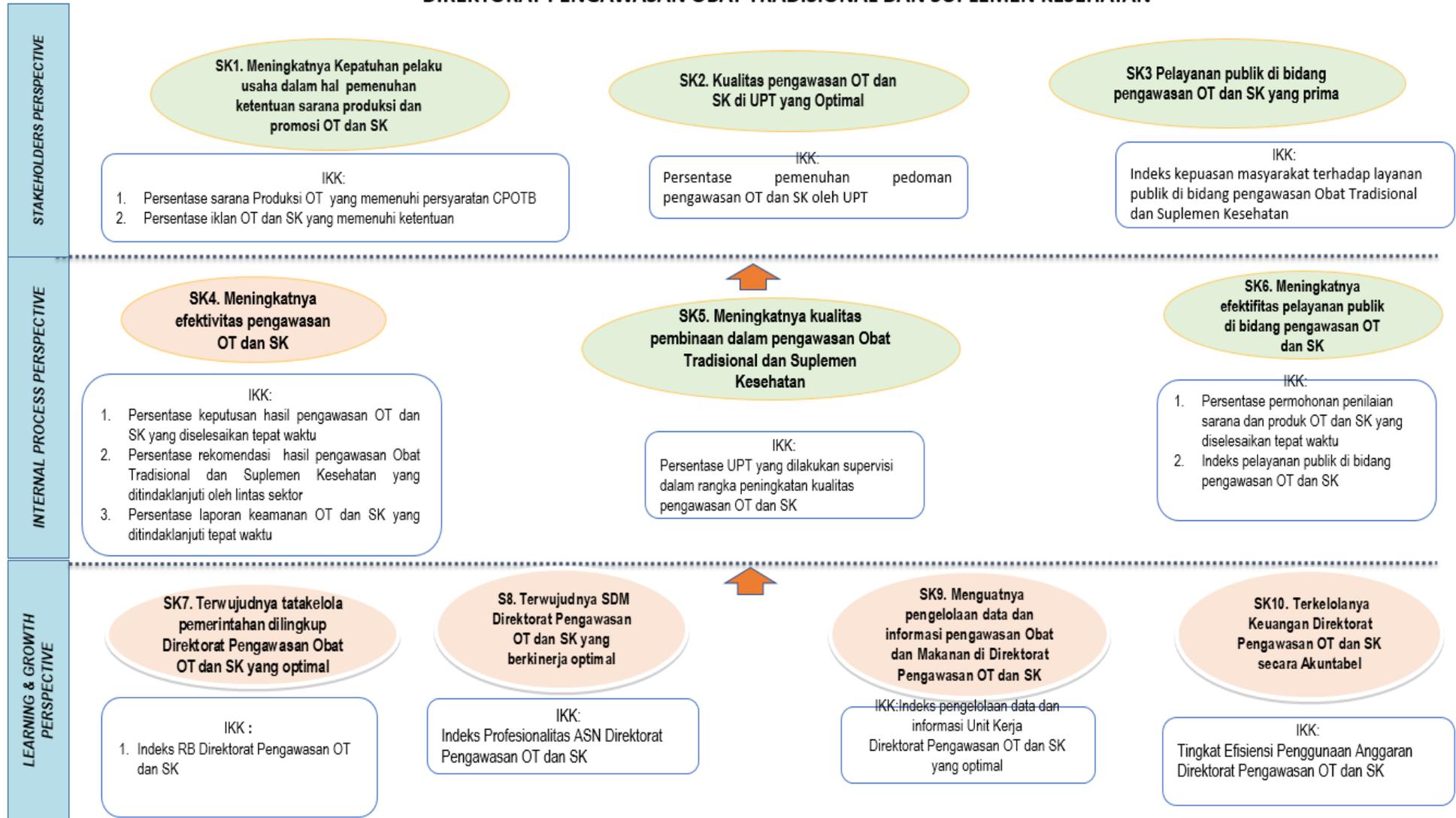
Capaian Kinerja Direktorat Registrasi Obat Tradisional,  
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik  
Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	93,5	92,80	99,25
2	Pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP	84	86,96	103,52
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP	Persentase hasil penilaian registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/klinik dan DIP yang diselesaikan tepat waktu	82,5	94,20	115,07
		Persentase pengaduan terkait registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP yang ditindaklanjuti	74	86,33	116,66
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4,45	4,79	107,64
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan	Persentase keputusan registrasi Obat Tradisional,	82,5	86,45	104,78

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
	Pre Market OT, SK dan Kosmetik	Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan sesuai standar			
		Persentase pendampingan di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP yang efektif	77	93,14	120,96
5	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan obat bahan alam	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional	85	85,72	100,85
6	Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan di Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang Optimal	Indeks RB Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik	87,2	91,5	104,93
7	Terwujudnya SDM Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik	86,5	86,85	100,40
8	Menguatnya Pengelolaan data dan informasi Pengawasan Obat dan makanan di Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang Terintegrasi dan Adaptif	Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik yang baik	2,25	2,5	111,11
9	Terkelolanya Keuangan Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik	97	100	103,09

**PETA STRATEGI BSC LEVEL 2 – (2020 – 2024)**  
**DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN**



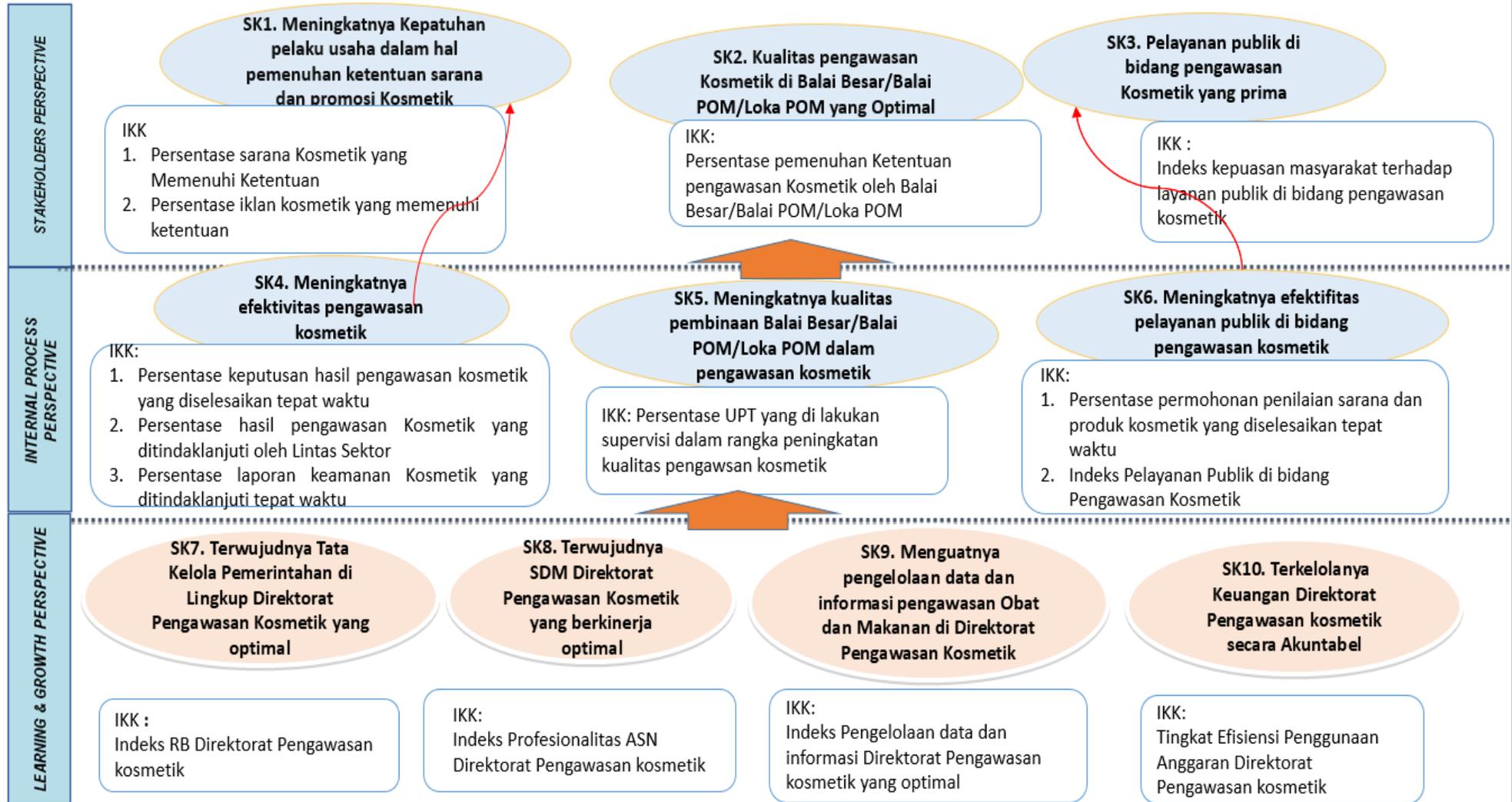
Capaian Kinerja Direktorat Pengawasan Obat Tradisional  
dan Suplemen Kesehatan  
Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana produksi dan promosi OT dan SK	Persentase sarana Produksi OT yang memenuhi persyaratan CPOTB	83	94.13	113,41
		Persentase iklan OT dan SK yang memenuhi ketentuan	76	76.38	100,50
2	Kualitas pengawasan OT dan SK di UPT yang Optimal	Persentase pemenuhan pedoman pengawasan OT dan SK oleh UPT	84	100	119,05
3	Pelayanan publik di bidang pengawasan OT dan SK yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	88	88.83	100,94
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan OT dan SK	Persentase keputusan hasil pengawasan OT dan SK yang diselesaikan tepat waktu	79	91.05	115,25
		Persentase hasil pengawasan OT dan SK yang ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor	76	80.33	105,69
		Persentase laporan keamanan OT dan SK yang ditindaklanjuti tepat waktu	94	100	106,38
5	Meningkatnya kualitas pembinaan dalam pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan OT dan SK	62	64.29	103,69
6	Meningkatnya efektifitas pelayanan	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk OT	90	89.52	99,47

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
	publik di bidang pengawasan OT dan SK	dan SK yang diselesaikan tepat waktu			
		Indeks pelayanan publik di bidang pengawasan OT dan SK	4.45	4.65	104,49
7	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Direktorat Pengawasan Obat OT dan SK yang optimal	Indeks RB Direktorat Pengawasan OT dan SK	85,5	90.08	105,36
8	Terwujudnya SDM Direktorat Pengawasan OT dan SK yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan OT dan SK	82.75	86.99	105,12
9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pengawasan OT dan SK	Indeks pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Direktorat Pengawasan OT dan SK yang optimal	2.26	3	132,74
10	Terkelolanya Keuangan Direktorat Pengawasan OT dan SK secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan OT dan SK	99	100	101,01

**PETA STRATEGI BSC LEVEL 2 – (2021)  
DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK**



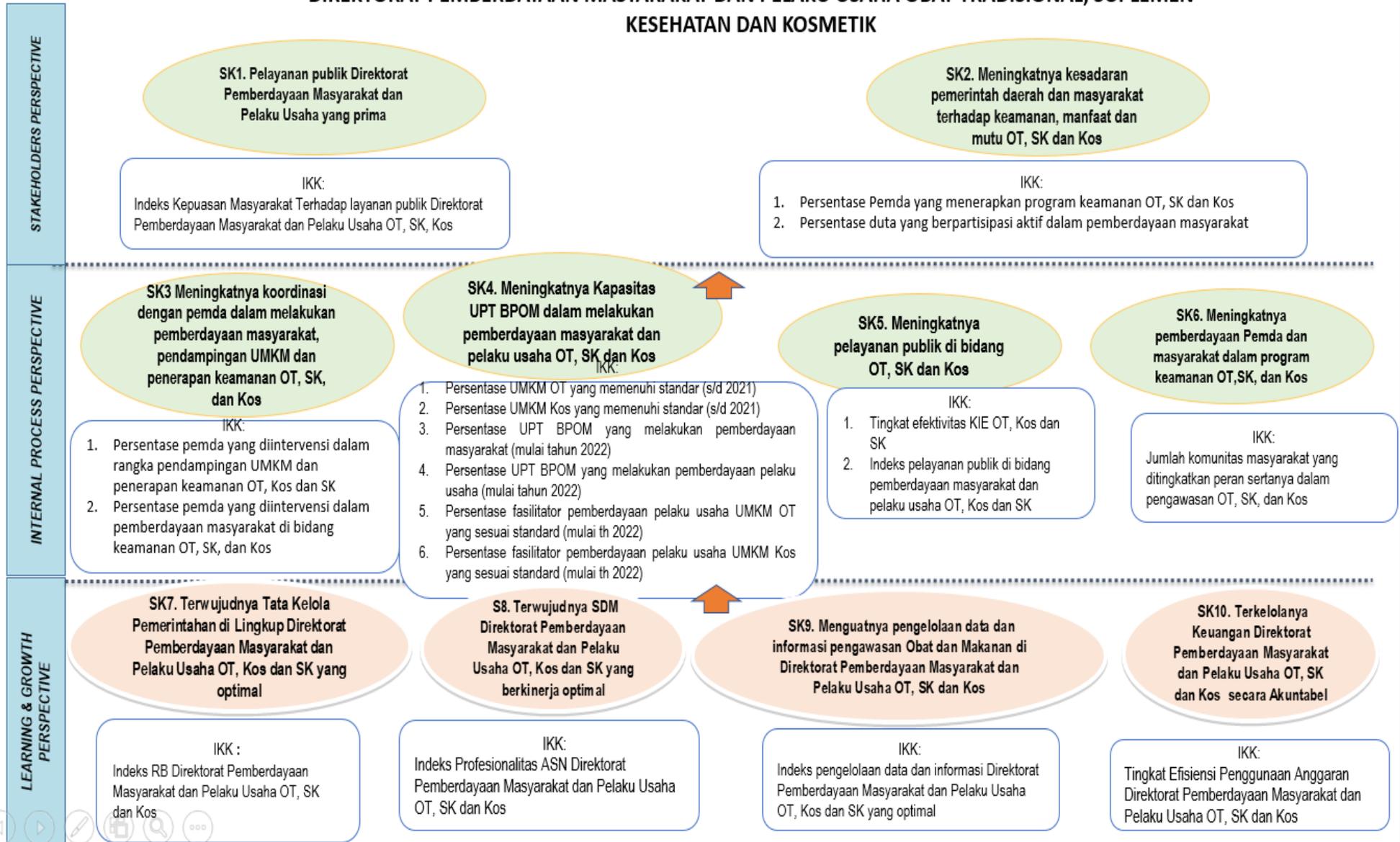
Capaian Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik  
Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi kosmetik	Persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan	87%	71,47%	82,15%
		Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan	87%	79,79%	91,71%
2	Kualitas pengawasan kosmetik di Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal	Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	85%	97,26%	114,42%
3	Pelayanan Publik di bidang pengawasan kosmetik yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	84,5	85,35	101,01%
4	Meningkatnya efektifitas pengawasan kosmetik	Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	87%	87,26%	100,29%
		Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder	83%	84,52%	101,83%
		Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	90%	98,81%	109,79%
5	Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik	Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	82%	92,86%	113,24%
6	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	92%	96,52%	104,91%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	4,51	4,66	103,33%
7	Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang Efektif	Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik	81	90,74	112,02%
8	SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik	82	85,59	104,38%
9	Sistem Operasional termasuk TIK terintegrasi dan adaptif di Direktorat Pengawasan Kosmetik	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	2,25	3	133,33%
10	Terkelolanya keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik secara Akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik	100%	100%	100,00%

**PETA STRATEGI BSC LEVEL 2 – (2021 – 2024)**  
**DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK**



Capaian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	82	92,44	112,73%
2	Meningkatnya kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu OT, SK dan Kos	Persentase Pemda yang menerapkan program keamanan OT, SK dan Kos	50%	83,33%	166,67%
		Persentase duta yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat	84%	94,22%	112,16%
3	Meningkatnya koordinasi dengan pemda dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pendampingan UMKM dan penerapan keamanan OT, SK, dan Kos	Persentase pemda yang diintervensi dalam rangka pendampingan UMKM dan penerapan keamanan OT, Kos dan SK	76%	80%	105,26%
		Persentase pemda yang diintervensi dalam pemberdayaan masyarakat di bidang keamanan OT, SK, dan Kos	50%	87,5%	175%
4	Meningkatnya Kapasitas UPT BPOM dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, SK dan Kos	Persentase UMKM OT yang memenuhi standar	95%	95,89%	100,94%
		Persentase UMKM Kos yang memenuhi standar	95%	107,45%	113,10%
5	Meningkatnya pelayanan publik di bidang OT, SK dan Kos	Tingkat efektivitas KIE OT, Kos dan SK	94,19	95,70	101,60%
		Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan	4,01	4,06	101,25%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
		masyarakat dan pelaku usaha OT, Kos dan SK			
6	Meningkatnya pemberdayaan Pemda dan masyarakat dalam program keamanan OT,SK, dan Kos	Jumlah komunitas masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OT, SK, dan Kos	274	277	101,09%
7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, Kos dan SK yang optimal	Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	81	88,14	108,81%
8	Terwujudnya SDM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, Kos dan SK yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	80	86,97	108,71
9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, Kos dan SK yang optimal	2,1	3	142,86%
10	Terkelolanya Keuangan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	99%	99,96%	100,96%